

# KEPENDUDUKAN INDONESIA

**Women Labor Migration in Asia: Mother Migration and Its Impacts on Left-Behind**

*Meirina Ayumi Malamassam*

**Mengurai Jaringan Migrasi: Kajian Komunitas Petani Migran Bugis di Sulawesi**

*Elok Mulyoutami, Ekawati Sri Wahyuni, Lala M Kolopaking*

**Kerentanan Ekologi dan Strategi Penghidupan Pertanian Masyarakat Desa Persawahan Tadah Hujan di Pantura Indramayu**

*Ali Yansyah Abdurrahim, Arya Hadi Dharmawan, Satyawan Sunito, I Made Suidiana*

**Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Kota Tegal, Jawa Tengah**

*Deshinta Vibriyanti*

**Relevansi Pendidikan Kejuruan Terhadap Pasar Kerja di Kota Salatiga**

*Ngadi*

**JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA**

Jurnal Kependudukan Indonesia merupakan media informasi, komunikasi, dan pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah kependudukan, ketenagakerjaan dan ekologi manusia. Jurnal ini merupakan *peer-reviewed* jurnal Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI) yang diterbitkan dua kali dalam setahun. Artikel dapat berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan buku, dan jenis tulisan ilmiah lainnya yang ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.

**Penanggung Jawab  
Pemimpin Redaksi  
Dewan Redaksi**

Haning Romdiati (Kepala PPK-LIPI/Director of PPK-LIPI)  
Makmuri Sukarno  
Titik Handayani  
Widayatun  
Rusli Cahyadi  
Ade Latifa Soetrisno  
Gutomo Bayu Aji  
Ngadi  
Vanda Ningrum  
Zainal Fatoni  
Deshinta Vibriyanti  
Sutarno

**Mitra Bestari**

Gavin W. Jones, National University of Singapore-Singapore  
Haruo Kuroyanagi, Sugiyama Jogakuen University-Japan  
Djoko Hartono, Konsultan  
Deny Hidayati, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Terence H. Hull, Australian National University- Australia  
Sukamdi, Universitas Gadjah Mada  
Semiarto Aji Purwanto, Universitas Indonesia

**Alamat Redaksi**

Pusat Penelitian Kependudukan,  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Widya Graha LIPI, lantai X  
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12190-Indonesia  
Tromol Pos 250/JKT 1002,  
Telp. +62 21 5207205, 5225711, 5251542 Pes/ext. 745, 720, 721  
Fax: +62 21 5207205  
*E-mail:* [jki.ppklipi@yahoo.com](mailto:jki.ppklipi@yahoo.com)  
*Web-site:* [kependudukan.lipi.go.id](http://kependudukan.lipi.go.id)

# Jurnal KEPENDUDUKAN INDONESIA

Women Labor Migration in Asia: Mother Migration and Its Impacts on Left-Behind

*Meirina Ayumi Malamassam*

Mengurai Jaringan Migrasi: Kajian Komunitas Petani Migran Bugis di Sulawesi

*Elok Mulyoutami, Ekawati Sri Wahyuni, Lala M Kolopaking*

Kerentanan Ekologi dan Strategi Penghidupan Pertanian Masyarakat Desa Persawahan Tadah Hujan di Pantura Indramayu

*Ali Yansyah Abdurrahim, Arya Hadi Dharmawan, Satyawan Sunito, I Made Suidiana*

Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Kota Tegal, Jawa Tengah

*Deshinta Vibriyanti*

Relevansi Pendidikan Kejuruan Terhadap Pasar Kerja di Kota Salatiga

*Ngadi*



LIPI

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

**DAFTAR ISI**

Women Labor Migration in Asia: Mother Migration and Its Impacts on Left-Behind <i>Meirina Ayumi Malamassam</i>	1-10
Mengurai Jaringan Migrasi: Kajian Komunitas Petani Migran Bugis di Sulawesi <i>Elok Mulyoutami, Ekawati Sri Wahyuni, Lala M Kolopaking</i>	11-24
Kerentanan Ekologi dan Strategi Penghidupan Pertanian Masyarakat Desa Persawahan Tadah Hujan di Pantura Indramayu <i>Ali Yansyah Abdurrahim, Arya Hadi Dharmawan, Satyawan Sunito, I Made Sudiana</i>	25-44
Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Kota Tegal, Jawa Tengah <i>Deshinta Vibriyanti</i>	45-59
Relevansi Pendidikan Kejuruan Terhadap Pasar Kerja di Kota Salatiga <i>Ngadi</i>	59-70

## KATA PENGANTAR

**Jurnal Kependudukan Indonesia (JKI)** pada Volume 9 No 1 Tahun 2014 ini menyajikan lima artikel ilmiah yang ditulis oleh peneliti dari berbagai institusi. Pada edisi ini tema yang disajikan cukup beragam namun tetap menonjolkan isu kependudukan, ketenagakerjaan, dan ekologi manusia yang menjadi ciri khas jurnal ini.

Artikel pertama mengangkat isu migrasi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan pengaruhnya terhadap perubahan pola pengasuhan anak yang ditinggalkan. Kajian ini menunjukkan bahwa migrasi yang dilakukan oleh ibu yang meninggalkan anaknya untuk bekerja di luar negeri, memiliki dampak signifikan terhadap proses perkembangan anak yang ditinggalkan di daerah asal. Artikel ini mengangkat kasus di Indramayu, Jawa Barat yang merupakan kantong 'pengekspor' TKW ke luar negeri. Artikel ini sekaligus merupakan satu-satunya artikel yang ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Artikel lainnya yang juga mengangkat isu migrasi dalam edisi ini adalah artikel tentang petani migran Bugis di daerah Sulawesi Tenggara. Artikel ini mengungkapkan bagaimana jaringan migrasi pada komunitas migran Bugis di Sulawesi Tenggara dan mengkaji peran aktor dalam proses migrasi tersebut.

Isu ekologi manusia turut mewarnai edisi kali ini melalui artikel ketiga yang berjudul: Kerentanan Ekologi dan Strategi Penghidupan Pertanian Masyarakat Desa Persawahan Tadah Hujan di Pantura Indramayu. Artikel ini menjelaskan bentuk-bentuk strategi penghidupan yang dilakukan oleh masyarakat desa dalam menghadapi kerentanan ekologi berupa kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan. Jika artikel ketiga menampilkan isu di sektor pertanian, maka artikel keempat akan mengangkat isu pemberdayaan pada nelayan tangkap di Kota Tegal, Jawa Tengah. Salah satu temuan dalam kajian ini adalah program-program pemberdayaan yang diberikan pemerintah masih menghadapi beberapa kendala di lapangan, terutama dalam hal pemerataan akses baik terhadap program yang berdimensi fisik maupun nonfisik.

Sedangkan artikel terakhir pada edisi ini mengangkat isu ketenagakerjaan yang dilihat dari relevansi pendidikan kejuruan terhadap pasar kerja terutama dilihat dari aspek penyerapan tenaga kerja dan produktivitas. Artikel ini menunjukkan bahwa *rate of return* pendidikan kejuruan masih lebih rendah dibanding pendidikan menengah umum, sehingga pendidikan kejuruan perlu berbenah baik dari sisi *input* maupun proses belajar mengajar agar lulusannya memiliki daya saing yang lebih tinggi.

Atas semua sumbangan artikel ini, Redaksi mengucapkan terimakasih terutama kepada para penulis, mitra bestari, dan tim pendukung JKI hingga jurnal ini dapat kami berharap artikel yang disajikan dapat berguna bagi para pembaca. Selamat membaca!

Salam Hangat,

**Redaksi JKI**

# WOMEN LABOR MIGRATION IN ASIA: MOTHER MIGRATION AND ITS IMPACTS ON LEFT-BEHIND CHILDREN<sup>1</sup>

Meirina Ayumi Malamassam

Researcher at Research Centre for Population – LIPI (PPK-LIPI)  
ayumi.malamassam@gmail.com

## Abstrak

Migrasi tenagakerja wanita (TKW) telah menjadi bagian utama migrasi tenaga kerja di Asia sejak tahun 1980an. Negara utama pengirim TKW ini adalah Indonesia, Filipina dan Sri Lanka. Sebagian besar TKW melakukan migrasi secara individual. Hal ini berakibat pada terjadinya perubahan pola pengasuhan anak di keluarga migrant perempuan tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PPK-LIPI pada tahun 2011 di Indramayu, Jawa Barat, artikel ini membahas proses yang dialami oleh anak yang ditinggalkan ibunya yang bekerja di luar negeri. Dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu ini, khususnya dalam konteks Asia, artikel ini juga mendiskusikan pustaka dengan isu serupa di Filipina dan Sri Lanka. Kajian di artikel ini menunjukkan bahwa migrasi oleh ibu untuk bekerja di luar negeri memiliki dampak signifikan terhadap proses perkembangan anak yang ditinggalkan di daerah asal. Dari beragam dampak yang dialami oleh anak para migrant wanita tersebut, komunikasi yang bermigrasi memegang peranan yang sangat penting dalam proses adaptasi anak terhadap situasi absennya ibu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di lingkup yang lebih luas, persepsi masyarakat terkait nilai-nilai normative keberadaan ibu dalam kehidupan keluarga sehari-hari turut menentukan proses penerimaan anak terhadap situasi pekerjaan ibunya.

## 1. INTRODUCTION

International labor migration is considered as an alternative solution to overcome unemployment and poverty problem in some developing countries. One of the important labor movements in international migration literature is the migration of female labors in Asia. This phenomenon has started since 1980s and known as 'feminization of migration'. The main characteristic of this type of migration is a large number of female labors migrate from developing countries in Asia to Gulf regions as well as to industrialize countries within Asia, and they mainly work as domestic helpers. The involvement of women as workers abroad has contributed significantly to the

## Abstract

*Female labor migration has been a prominent feature of labor migration in Asia since 1980s. Indonesia, along with Philippines and Sri Lanka, have been major sending countries of this type of migrants. Since the majority of the migrants are go abroad unaccompanied, this situation resulted in changes of left-behind family arrangement. Changes majorly apply to caregiving arrangement of left-behind children. Based on the research by PPK-LIPI in 2011, this article discuss the impacts of mother migration on left-behind children in Indramayu, West Java and their adaptation process to such situation. In order to get more comprehensive understanding of this issue, particularly in Asian context, this article also discuss similar cases on Philippines and Sri Lanka by reviewing related literatures. It appears that mothers' migration has a significant impact on left-behind children's development process. While there are different extent of the impacts, the children's communication with migrate mothers play an important role on the coping strategies of the children. In community context, the opinion of the children's surroundings in regards to mothers' absence in their daily lives would also determine the children's acceptance of their mother migration.*  
*Keywords: mother migration, left-behind children, impact, women labor migration*

economic wellbeing of left-behind families in areas of origin through remittances.

The female migrants are usually work as contract labors who have to work in two continuous year period without having return to their countries of origin. Since many of them engage in multiple overseas work contracts or long-term migration (Hugo and Ukwatta 201), this would bring implications to left-behind family arrangement, particularly when the female workers are married and has children. The main implication is the change in caregiving arrangement of left-behind children. For example, instead of being taken care by both parents, children of migrants are only looked after by their

fathers. In some cases, they have to live with their extended family, such as grandparents or aunts. This situation put the children on vulnerable situation due to their mothers' absence during their physical and psychological development stages.

As expressed on reports by Save the Children (2006, p.27), the absence of mothers has an enormous impact on left-behind children's lives and their development. It can be seen from the gain that the children had from remittances sent by their migrating mothers. The money could provide opportunities to them to access better educational and health facilities. However, mothers' migration may also create psychological costs and emotional problems for the children. Thus, Save the Children (2006 p.2) argues that mothers migration "could violate a child's right to development, survival and education".

This article aims to discuss impacts of mother migration on left-behind children in Indonesia as well as to examine adjustment and adaptation strategies of left-behind children in the situation of their mothers' absence. This paper, in particular, would highlight the implication of the mothers' absence to the emotional development as well as the health and education outcomes of the children with migrant mothers. Data on this study based on a PPK-LIPI's research on the social cost of migration in Indramayu. In order to get more comprehensive framework on the left-behind children condition, this article would also discuss issues on left-behind children by migrant mothers in other prominent sending countries of female migrants in Asia, namely Philippines and Sri Lanka. The discussion would be conducted by reviewing findings from several literatures on left-behind children by migrant mothers, such as Parrenas (2005a & 2005b)'s study in Philippines on young adult children in transnational mother families and Save the Children (2006) study on young left-behind children by migrant mothers in two prominent migrants' area of origin in Sri Lanka.

This article is presented in six sections, with the introduction being the first. Next, it discusses the theories and setting context of mother migration. The next three sections address several issues related to the impacts of mother migration on left-behind children, namely caregiving arrangement, children's communication, and children's coping strategy, respectively. The final section concludes the study.

## **2. WHY DO THE MOTHERS MIGRATE?**

Migration is a complex process and it is difficult to examine a certain international movement based on a

single theory. However, in order to get better comprehension on the feminized labor migration issues, particularly in Asia, it is important to revisit conceptual context on this issues by reviewing several prominent migration theories. One of the prominent theories regarding this issue is dual labor market theory. The theory focuses on the importance of pull factors or demand for labor from destination countries rather than push factors or labor supply in sending countries to initiate immigrant worker flows, particularly in industrialized countries (Massey et al. 1993). Piore (1979) as one of the major proponent of this theory hypothesized that there are two distinct parts of labor market in migrants' destination countries, namely primary and secondary labor market. While primary labor market characterized with skilled and secure employment as well as high wages, secondary labor market described as unskilled and instability employment with low wages (Piore 1979, Heisler 2008). Since occupational type reflects social status, natives refuse to work in low wage employment and this situation opens up job opportunities to foreign labors. Therefore, the former market type attach to the natives while the latter seems to be destined for the immigrants. Besides that, since this movement derived from labor demand, recruitment practices by employers hold important role in enabling individuals from foreign countries to enter the labor market in industrialized countries.

Female labor migration from Indonesia, and other developing countries in Asia, to work as domestic workers in Middle East as well as East and Southeast Asia countries can also be explained by the theory above. The migration flow, which also known as feminization of migration, started in the late 1970s and 1980s when there was an increased demand of domestic workers from oil-rich countries in Gulf States as well as newly industrialized countries in East and Southeast Asia (Asis 2005). In Middle East countries, the domestic worker demands driven by increased household economic status in those countries that affected many affluent local women prefer to delegate household tasks to domestic helpers (Kaur 2007). Similarly, Surtees (2003) notes that one of the major cause of female labor migrant flows is increased demand in destination countries for subservient female workers to do domestic works or household tasks. Meanwhile, the demand for domestic workers in East and Southeast Asia countries, such as Hong Kong, Taiwan, Singapore and Malaysia, accounts for the increasing need of domestic helpers due to increased participation of local women in labor market (Asis 2005). Thus, the existence of these female labors has contributed to the improvement of quality of life and living standards of people in

destination countries (Moniaga 2008) and this situation may create long-run demand for unskilled immigrants to be occupied in such jobs (Massey et al. 1993).

Examination on the worker recruitment process of Indonesian female workers migration shows a similar fashion that put forward by dual labor migration theory. Kaur (2007) argues that workers from Southeast Asia that classified in unskilled migration flows are those who employed on particular job with temporary basis and recruited through private agencies or under sponsorship system by citizens of destination countries. According to Raharto (2002), recruiters play a major position in the migration process since they are the main source information for the potential migrants regarding employment opportunities as well as migration cost and administrative requirements. One prominent characteristic of female migrant workers from Indonesia is unskilled and have low level of education (Raharto et al. 2002, Raharto 2011). Besides that, the situation where there is only slight increase of wages of domestic workers or even stable wages, especially those who work in Gulf countries (Raharto 2011) could be explained by this theory. Instead of supply-demand mechanism, wages in this type of jobs are determined, and generally held down, by social and institutional mechanisms.

However, not all postulates described in dual labor market theory can be applied in the international movement of unskilled female workers from Indonesia. A major postulate in this theory is wage differential between sending and destination countries is not a necessary condition for labor migration to occur (Massey et al. 1993). In the case of domestic workers from Indonesia, Noveria et al. (2010) find that there is huge income gap for the same job between Indonesia and destination countries. For example, while domestic helpers in Indonesia are paid a salary on average US\$ 60-100 per month, their counterparts can get a salary US\$ 200-250 per month while working in Middle East countries and US\$ 500-600 per month in Hong Kong or Taiwan. On the sending countries' point of view, this situation may have influence on migration decision making by the potential female migrants although they have to work in bottom position of jobs hierarchy in destination countries.

Despite some problem faced by several migrant workers while living abroad (Raharto 2011), the female labor migration from less developed countries in Asia are still persisted. One of the theories that can explain the perpetuation of this movement in the

micro level is cumulative causation theory. This theory, proposed by Massey (1990), believes that initial migration can cause change in social, economic and cultural aspects, not only at the individual level but also in the community level. Therefore, it can lead to more migration acts in community where the initial migrants originated. People in a community might be motivated to participate in foreign labor market after witnessing the successful of migrant households to increase their economic welfare by the migrants' remittances and resulted in increased social status in their community. Therefore, in a migrant-dominant community, working abroad not only acts as source of household income but also a way to reach and maintain certain life style and social status. This situation can lead to repetitive migration by the same migrants or chain migration by other household members in the migrant families as well as deploy migration behavior among their communities.

The continuity flow of Indramayu's female workers to go abroad can be seen as the application of the theory above. As a major source of female labor migrants from Indonesia, its population movement to go abroad has been started in the beginning 1980s when a few number of women decide to take the job opportunity abroad in order to alleviate their family's poverty burden (Raharto *et al.* 2013). The limitation to send only female family member due to limited job opportunities abroad for male. The phenomenon of sending woman migrants was mainly occurred in parts of the regency that were known as poor areas due to infertile paddy field. From their movement abroad, the households of female migrant were gained significant economic improvement, that indicated by having a new or renovated house, buying furniture and vehicles, or celebrating their son's circumcision with huge traditional ceremonies (Raharto *et al.* 2013). In addition, their economic improvement also raised the social status of the migrant family in the community. This situation, subsequently, encouraged non-migrant family to send its female member working abroad as well in expectation to have similar economic and social gain.

Furthermore, the cumulative causation theory also highlight the importance of network and institutions aspects for maintaining international migration flows, particularly in creating migration network as well as forming commercialized migrant institutions, such as brokers or local recruitment agents. In the context of female migration in Indramayu, a study by Raharto (2011) shows that one of female worker migrants' major reason working abroad is follow neighbors or relatives who previously had worked in those countries. Besides that, most of the migrants accessed

the foreign labor force through local recruitment agencies that affiliate with recruitment agencies in the destination countries. Local agencies also provide related services, such as money loans for left-behind family, passport and visa arrangement as well as work training. Similarly, World Bank (2006) finds that local recruitment agencies has a huge influence on female workers movement from rural area in Indonesia.

By reviewing theories and setting of female migrants in Indonesia, particularly in Indramayu, it can be seen that this type of movement has been a long-standing practice and the women's mobility from this area can be attributed to the social and economic condition in the areas of origin. Thus, it is important to examine several aspects related to the issues of feminization of migration, including issues of left-behind family. The Indramayu study that would be discussed in this article was conducted by PPK-LIPI in Juntinyuat and Juntikebon villages, the two main areas of origin of women migrants from this regency. By using household surveys, the study asked 200 pair of respondents from migrant households (caregivers and left-behind children aged 13 to 21 years old) about information on socio-economic dynamics and coping strategies of left-behind households, as well as their perception on migration of their household members. The selection of the respondents used purposive sampling method, based on a list provided by staffs of village head's office. In addition, in-depth interviews were also conducted in order to gather qualitative information related to mother migration's impact on left-behind children.

### **3. CAREGIVING ARRANGEMENT WHILE MOTHERS' AWAY**

Indonesia, along with Philippines and Sri Lanka, are well-known as the prominent sending countries of female labor migrants. Asis (2002) suggests that around 60-80 percent of labor migrants from these countries are women. In addition, most of the female migrants are on married status (Hugo 2002). Most of the time, these migrants must go abroad unaccompanied, so this results on the situation of the married migrants have to leave their family in their areas of origin. This type of migration leads to change in family structure and composition of the woman migrants' family. As found in the study in Indramayu, about 90 percent of children from migrant families surveyed are children with migrant mothers. In Philippines, ECMI (2004) finds that about 35 percent of children ages 10-12 years old come from mother migrant families. In addition, the study by Save the Children (2006), which studied households of migrant

mothers in districts with highest number of female labor migrants in Sri Lanka, finds that nearly half of the left-behind children of migrant mothers were less than six years old at the time their mother worked abroad at the first time.

When mother migration takes place, there is a shift of parents' role in migrant families. As the mothers work abroad to support the economic wellbeing of the left-behind families, mothers play a role as breadwinner of the family. However, this type of family arrangement is not very common in Indonesia, as in some other countries in Asia. This is because most people in these countries still adopt patriarchal view where wives are assigned childbearing and childrearing roles in the family (Hugo 2002). As they change their role to far-distant breadwinner of their household, mothers need to shift their nurturing responsibilities to other family members in their origin of areas. Generally, left-behind husbands are those who act as the main caregivers of the left-behind children. The study in Indramayu finds that most of migrating decisions by the migrant mothers are done without family discussion on childcare and domestic chores arrangement prior to the mother's migration. Therefore, the shift of caregiving roles to the left-behind fathers is usually not something that done by options or voluntarily, but by default since there is no other persons that would look after the left-behind children.

When fathers become the main caregivers for the left-behinds, they could face some difficulties to adjust with their new tasks. The Indramayustudy finds that those with left-behind toddlers, particularly, need to perform intensive caregiving and this situation forced them to be stay-at-home dad. For some fathers, this situation is such an uncomfortable situation since it means it is difficult for them to do economy activities outside their home. Besides that, it reflects the situation of husband's full dependency on income from their wives' migration. Similar with what migrant mothers did before migrated, the fathers need to do various domestic chores and caregiving activities, ranged from cooking, bathing the children, taking children to school, cleaning the house, washing clothes, attending parent-teacher association meetings, to feeding the children. As reported by Save the Children (2006), this could result on fathers in migrant mother families are experiencing more stress in their lives compared with fathers in non-migrant families. In certain areas, it is found that drinking alcohol become habits for most of the fathers to cope with the stress. In other cases, Asiset *al.* (2004) finds some left-behind husbands who got confused or shocked after realized all the household works

become their responsibilities since their wives migrated. This is because they are not accustomed to perform the domestic chores while their wives still at home. It took months for them to adjust for the responsibility changes.

The study in Indramayu, as well as findings in Philippines (Parrenas 2005a), also reveal some fathers who reluctant to work on their new caregiving responsibility and prefer to ignore it. This situation could be attributed to patriarchal paradigm in the migrant communities that distinguish father and mother roles in the family (Parrenas2005b). This paradigm make left-behind fathers have not change their view on their roles on the family despite their wives' migration. Some left-behind fathers still believe that the nurturing responsibility is not their domain as husbands and fathers. In some cases, in Philippines, fathers hire domestic workers to do all the household tasks (Parrenas 2005b). Alternatively, the fathers delegate their new responsibility to older children or extended kin. For example, there is a small portion of left-behind children who are nurtured by their extended families, such as grandmothers or aunts. Save the Children (2006)'s study in Sri Lanka reports about three fourth of left-behind children acknowledge their grandmothers as their primary caregivers. Therefore, it can be said that extended families, particularly female relatives, also play a role in childcare arrangement in the migrant mother families.

#### **4. CHILDREN'S COMMUNICATION WITH CAREGIVERS AND MIGRANT MOTHERS**

The study in Indramayu reports the main challenge of nurturing responsibility's shift in households with migrant mother is communication between the left-behind children and the caregivers. It is found that, in general, the children only have limited interaction with their main caregivers. Many left-behind children prefer to only talk about general issues with their caregivers. Most children feel more comfort to share their specific issues, such as school problems or other difficulties, with their peers or even choose not talk about it to anyone. According to Graham *et al.* (2012), this communication problem arises because it is quite hard for the children to feel emotion closeness with their caregivers despite their physical nearness. In Sri Lanka, Save the Children (2006) reports that left-behind children have more communication difficulties when their primary caregivers are their grandparents or those that are over 60 years old. Due to the huge generation gap, children feel unable to communicate with them. Regardless who act as caregivers for left-behind children, it is argued that

this communication problem results on caregivers' less attention to the children's problems. In addition, from the children's perspective, this situation could make children to feel ignored. It could lead to emotional disorders in children and thus have negative implications to their development.

Despite the geographical detachment with their children, many of the migrant mothers still carry out mothering activities while they are away. The Indramayu study finds that the mothers conduct this role through communication with their children in the areas of origin, by several means such as text messages, phone calls, letters. In Philippines, it is found that means of communications are more varied by also using online chatting (Parrenas 2005a). It is argued that when migrant mothers able to build intensive communication with their children, it would help children to cope with mothers' absence as well as to prevent negative impacts of migration (Parrenas 2005b). Besides that, this distant mothering practice is not only to ensure the emotional stability of the children, but also to help the migrant mothers cope with the pain of separation with their children (Parrenas 2005a). Furthermore, this situation implicates the double burden that carried out by the migrant mothers. This is because not only they provide financial support for their left-behinds, but also they still nurture their children from a distant (Parrenas 2005a).

However, there is limitation on how intense the migrating mothers can perform their roles. Graham *et al.* (2012) argue that the mothers' employment conditions as well as lack of financial resources may restrict migrant mothers to have intensive communication with their left-behind children. As domestic workers in their migration destination countries, the mothers could work long hours and without day off. This situation makes them unable to have enough spare time to maintain regular communication with the left-behinds. Besides that, migrant mothers might consider the expensive rates that apply when they make international phone calls or send text messages. Migrant mothers might need to prioritize on utilization of their salary, whether to maintain intensive communication with their children or to send it as remittances to their left-behind family. In terms of communication intensity between migrant mothers and their children, the study in Indramayu finds only about a third of left-behind children who had regular communication with their migrating parents, while the rest reveals they only have occasional contacts with their mothers. Mobile phone calls are found to be the most common way of communication in this study. Similarly, a study by Hugo & Ukwatta (2010) in Sri Lanka finds that most

of migrant mothers from Sri Lanka have difficulties to make frequent communication with their left-behind children. Their contact with the children is mostly conducted once a month through landline phone calls. In addition, many migrant mothers, particularly those who come from rural area, still prefer to use letters to communicate with the left-behinds.

In contrast, studies by Parrenas (2005a), which studied young adult children in transnational mother families in Philippines, shows that most migrant mother and left-behind children have very intensive communication through various means. Not only sending text messages on a daily basis for waking them up and preparing them go to school as well as making phone calls at a certain time of the week, but migrant mothers also send gifts and letters on certain periods of months. Additionally, Graham *et al.* (2012) reveal that many children of migrant in Philippines has access to internet network that enables them to have more intensive communication with the migrating parents through instant messages or video call. The utilization of advanced communication tools such in Philippines is rarely found in Indonesia and Sri Lanka. Hugo & Ukwatta (2010) argues that this situation is influenced by the lower level of education and earnings of female migrants from those countries, compared with their counterparts from Philippines.

In every communication means that link migrating mother and her children, mother is the one who usually initiate the first attempt. While communicating with their parents, most children talk about their daily life activities and school routines. The Indramayu study finds children prefer to only share the good news to make their mother happy. This is because they do not want to feel worry if their mothers heard about their concerns or difficulties.

Communication between migrant mothers and left-behind children plays an important role on the children's acceptance of the situation of their mothers' absence as well as their emotional development. Through intensive and frequent communications, the left-behind children would be able to feel their mothers' presence in their daily lives as well as maintain strong emotional connection with their mother (Asis 2002). In addition, the patriarchal paradigm or the narratives build in the communities might also influence the different ways of children's coping strategy to their mothers' absence. Since the children believe that mothers' main role is to nurture and take care their kids, many of them believe that their mother should stay at home and be physically present in their daily life (Parrenas 2005b). Therefore, many left-behind children still cannot accept their mothers' migration even though some of them have

intensive and frequent communication with their migrant mothers.

## **5. HOW LEFT-BEHIND CHILDREN COPE WITH MOTHER'S ABSENCE?**

Studies on left-behind children of migrant mothers find different level of acceptance of mothers' absence by children's age group. For older children, there is a two-sided opinion regarding their mothers' migration. The study in Indramayu shows that in one side, adolescent children of migrant mother realize the reasons why their parents need to work overseas. In other side, they still generally feel less love, attention and support from their mothers in their daily lives. Similarly, Parrenas (2005b) in her study on young adult children in transnational mother families in Philippines also found that the left-behind children consider the nurturing acts of their distant mothers are not enough and expect to have more intensive mothering, although they highly acknowledge their mother's contribution on financial condition of their family.

Furthermore, the Indramayu study finds that absence of parents is quite easily accepted for most of children under five years old in this study. It is because they are too young to comprehend and feel detachment with their parents. However, this situation are easily changed as they grow up and learn about their mother's missing on daily basis. As argued by Tobin (2008), young children perceived their parents' migration as a form of abandonment as they get older. Besides that, young left-behind children are more likely to grow up and grow apart from their mothers (Asis 2002). In addition, Save the Children (2006) assumes that although younger children of migrant mother may not yet able to understand the separation, but if they did, they probably cannot cope with this situation. This is because children aged less than six years old are in their critical development stage that greatly needs sufficient physical and emotional nurturing.

The implication of the left-behind children's acceptance on mothers' migration could be observed through the well-being of the children. In term of happiness, ECMI (2004)'s study in Philippines finds that children of migrants, in general, are less happy in comparison with children of non-migrants. Children of migrant mothers, particularly, reported to be less happy compared with children of migrant fathers. Similarly, a study by Graham *et al.* (2012) finds that compared with children from non-migrant families, there is less proportion of children of mother migrants in Indonesia who said they were happy. Besides that,

this study also finds that left-behind children with infrequent contact with their migrating parents are more likely to express unhappiness compared with those who have regular communication with their migrating parents. This unpleasant feelings could be results their poor social adjustment and suffer from impeded social and psychological development (Battistella&Conaco 1998). In addition, Asis (1995) suggests that left-behind children's surroundings notice bad behavior of left-behind children, such as undisciplined behavior, no interest in academic matters and lavishness.

The study in Indramayu finds some left-behind daughters who express disappointment and suffering feelings regarding their mothers' migration. This is highly attributed to their additional burden on household tasks due to their mothers' absence. Most of the time, with or without help from their caregivers, they have to carry out some domestic chores, such as look after their younger siblings, clean the house, cook and wash clothes. This may cause emotional problems for left-behind daughters because they have to experience drastic changing in their daily routines after their mothers go abroad. It might also result in decline of their quality of life (Parrenas 2005a).

Health condition and education performance of the left-behind children could serve as reflections of their emotional development in the absence of their mothers. Several studies have shown the mother migration may create health problems on children left-behind. For example, in her study in Central Java (Indonesia), Purwaningsih (1994) claims that separation from migrating mothers causes emotional difficulties for left-behind young children that led to their poor health. For example, absence of mother may affect children's appetite, resulting in malnutrition. Similarly, study by Save the Children (2006) reports some negative impacts to children in Sri Lanka after their mothers' migration, such as weight loss of children under five years old. In addition, a study by ECMI (2004) in Philippines shows that children left by their mother tend to have poorer health compared with those who left by their father based on physical health indicators, such as height, weight and incidence of common illness.

However, it is argued that the bad health condition of the left-behind children is only occurred in short time or in several months after their mothers' departure. In the long run, it is suggested that parental migration would have positive impacts on the health condition of children (Kanaiaupuni& Donato 1999). This situation could be happened when remittances from

migrating parents are used for improving the children's access to healthcare facilities.

In terms of education performance, the study in Indramayu finds that it is hard to determine whether mother migration brings negative impacts to children's education or not. This is because most children of migrants have been abandoned by their migrating parents since their pre-school age. Consequently, it is impossible to make comparison between their school performance before and at the time of their parents' migration. However, it is revealed that, in general, the left-behind children's caregivers do not impose strict monitoring to the children's daily school activities. Instead of paying attention to the children's academic performance, the children's caregivers usually only care about whether the children leave home to go to school in the morning and return home in the afternoon. This situation, subsequently, results on some school drop-out cases among left-behind children. The cases are claimed as the impact of the absence of mother. The drop-out children in this study reveals that since there is a lack of support and concern on their education from the caregivers, they suffer academically which result in low school attendance and academic achievement. At the end, they tend to prefer drop out from the school.

In contrast, a study by ECMI (2004) in Philippines shows the positive relationship between remittances and academic achievement of left-behind children. This study shows that children of migrants perform better than the non-migrant children, particularly in the elementary grade. Besides that, this study shows that many children from migrant families could enroll in private schools due to the financial benefit they hold from remittances. However, this study also pointed out that children left by mother tended to have more academic difficulties in comparison with children left by father or both parents. Similarly, a study by Save the Children (2006) shows that level of attendance and school performance of left-behind children by migrating mothers in Sri Lanka tended to be lower compared with children from non-migrant families. This study argues that not only because the mothers' absence, the low educational attainment by the left-behind children also influenced by the low educational level of caregivers as well as the fact that most of the caregivers are senior citizen.

## 6. CONCLUSION

Mothers' migration obviously has impacts on the development of left-behind children. Not only because the displacement in family arrangement will

influence the emotional development of left-behind children, but also the absence of mothers made them vulnerable to experience negative impacts of parental migration. Besides that, due to the traditional view that still holds by most Asian communities that suggests good mothers are those who stay at home and do not leave their children, it is no surprise no matter how intensively mothers keep in touch with their left-behind offspring, many children still require their migrant mothers to perform more nurturing acts when the mothers are away.

Findings from the study in Indramayu as well as literatures on left-behind children studies in Philippines and Sri Lanka suggest the different extent of mother migration's impact on education and health condition as well as on emotional problems of left-behind children. The extent of the impact greatly depends on the children's acceptance regarding their mothers' migration. Therefore, good communication with the migrating mothers as well as with the caregivers is an important key to minimize the extent of possible problems that may appear in terms of mothers' absence. Furthermore, migrant parents should maintain regular and intensive communication with their children since it can help left-behind children to reduce the feeling of being lonely or abandoned by their parents. Advanced technology, as shown in the study in Philippines, could ease the geographical barriers in transnational mothering and help children to easily keep in touch with the absent mothers. However, it might be difficult for left-behind children in Indonesia and Sri Lanka to adopt the technology due to the financial limitation as well as lack of high technology skills.

In addition, government and surrounding communities are expected to support left-behind children on their adjustment process to their mothers' absence. Government could play a role on providing a support system, such as counseling and assistance, for left-behind children, particularly the younger ones. Meanwhile, community leaders, such as teachers and religious leaders, could also contribute in helping the left-behind children by acknowledging the issues on parental migration in their lectures or sermons. In broader context, it is also important to rebuild new narratives that support migrant mothers' role as breadwinners for the family while they still perform as mothers from a distance. When migrant communities do not perceive labor migration as a negative thing to do by a mother, it can make an easier adjustment process for left-behind children.

## References

- Asis, M.M.B. 1995. Overseas employment and social transformation in source communities: Findings from the Philippines. *Asian and Pacific Migration Journal* 4 (2-3): 327-346.
- . 2002. From the life stories of Filipino women: Personal and family agendas in migration. *Asian and Pacific Migration Journal* 11 (1): 67-93.
- . 2005. Recent trends in international migration in Asia and the Pacific. *Asia-Pacific Population Journal* 20 (3) (December 2005): 15-38.
- Asis, M.M.B., S. Huang & B.S.A. Yeoh. 2004. When the light of the home is abroad: Unskilled female migration and the Filipino family. *Singapore Journal of Tropical Geography* 25 (2): 198-215
- Battistella, G. & M. Conaco. 1998. The impact of labour on the children left behind: A study of elementary school children in the Philippines. *Southern Journal* 13 (2): 220-241.
- Episcopal Commission for the Pastoral Care of Migrants & Itinerant People (ECMI). 2004. *Hearts apart: Migration in the eyes of Filipino children*. Manila: Scalabrini Migration Centre.
- Graham, E., L.P. Jordan, B.S.A. Yeoh, T. Lam, M. Asis & Sukamdi. 2012. Transnational families and the family nexus: Perspectives of Indonesian and Filipino children left behind by migrant parent(s). *Environment and Planning* 44: 793-815.
- Heisler, B. S. 2008. The sociology of immigration: From assimilation to segmented assimilation, from the American experience to the global arena, in C.B. Brettel & J.F. Hollifield (eds), *Migration theory: talking across disciplines*. New York: Routledge, pp. 83-112
- Hugo, G. 2002. Effects of international migration in Indonesia. *Asian and Pacific Migration Journal* 11 (1): 13-45.
- Hugo G. & S. Ukwatta. 2010. Sri Lankan female domestic workers overseas – The impact on their children. *Asian and Pacific Migration Journal* 19 (2): 237-263.
- Kanaiaupuni, S.M. & K.M. Donatto. 1999. Migradollars and mortality: The effects of migration on infant survival in Mexico. *Demography* Vol 36 No 3 (August 1999): 339-353.
- Kaur, A. 2007. On the move: International migration in Southeast Asia since the 1980s, *History Compass* 5/2(2007): 302-313.

- Massey, D.S. 1990. Social structure, household strategies, and the cumulative causation of migration. *Population Index* 56: 3-26.
- Massey, D.S., J. Arango, G. Hugo, A. Kouaouci, A. Pellegrino & J. E. Taylor. 1993. Theories of international migration: A review and appraisal. *Population and Development Review* 19 (3): 431-466.
- Moniaga, R. 2008. Indonesian migrant domestic workers: An analysis on human rights, gender and migration. [http://gpia.info/files/u96/R\\_Moniaga\\_FALL08\\_Migrant\\_Domestic\\_ANALYSIS.pdf](http://gpia.info/files/u96/R_Moniaga_FALL08_Migrant_Domestic_ANALYSIS.pdf). Accessed 30 June 2012.
- Noveria, M., H. Romdiati, B. Setiawan & M.A. Malamassam. 2010. *Laporan penelitian insentif tahap I: Dampak migrasi tenaga kerja keluar negeri terhadap keluarga dan daerah asal di kabupaten Tulung Agung provinsi Jawa Timur*. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan–Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Parrenas, R.S. 2005a. The gender paradox in the transnational families of Filipino migrant women. *Asian and Pacific Migration Journal* 14 (3): 243-267.
- . 2005b. *Children of global migration: Transnational families and gendered woes*. Stanford: Stanford University Press.
- Piore, M.J. 1979. *Birds of passage: Migrant labor in industrial society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Purwaningsih, S. 1994. 'When Indonesian mothers work in the Middle East, what happens to the children they leave behind: A case study in a rural area of Central Java', *Asian Studies Association of Australia Biennial Conference*, 13-14 July, Perth.
- Raharto, A. 2002. Indonesian female labor migrants: Experiences working overseas (a case study among returned migrants in West Java). Paper presented at the 2002 IUSSP Regional Population Conference on Southeast Asia's Population in a Changing Asian Context. Bangkok, 10–13 June.
- . 2011. The migratory experience of returned migrant domestic workers: The example of Indonesia. Paper presented at the Workshop on Strengthening Dialogue between ESCWA and ESCAP Countries on International Migration and Development. Beirut, 28-30 June.
- Raharto, A., H. Romdiati, M. Noveria & S. Bandiyono. 2002. *Kebutuhan informasi bagitenagakerjamigran Indonesia: Studikamus di provinsi Jawa Barat, Kalimantan Timur dan Riau*. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan–Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Raharto, A., H. Romdiati, M. Noveria, Fitranita, M.A. Malamassam & I. Hidayati. 2013. Indonesian labor migration: Social cost and family left behind, in *Valuing the social cost of migration: An explanatory study*. Bangkok: UN Women.
- Save the Children. 2006. *Left behind, left out: The impact on children and families of mothers migrating for work abroad*. Colombo: Save the Children in Sri Lanka.
- Surtees, R. 2003. Female migration and trafficking in women: The Indonesian context. *Development* 46(3): 99-106
- Tobin, V. 2008. 'Gender, migration & children's rights', *International Conference on Gender, Migration and Development : Seizing Opportunities, Upholding Rights*, 25-26 September, Manila.
- World Bank. 2006. Fact sheet: Migration, remittance and female migrant workers. [http://siteresources.worldbank.org/INTINDON/ESIA/Resources/fact\\_sheet-migrant\\_workers\\_en\\_jan06.pdf](http://siteresources.worldbank.org/INTINDON/ESIA/Resources/fact_sheet-migrant_workers_en_jan06.pdf). Accessed 30 May 2012.



# MENGURAI JARINGAN MIGRASI: KAJIAN KOMUNITAS PETANI MIGRAN BUGIS DI SULAWESI TENGGARA<sup>1</sup>

## (UNRAVELING THE MIGRATION NETWORK: STUDY OF BUGINESE MIGRANT COMMUNITY IN SOUTHEAST SULAWESI)

Elok Mulyoutami<sup>1</sup>, Ekawati Sri Wahyuni<sup>2</sup>, Lala M Kolopaking<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Pedesaan (e.mulyoutami@cgiar.org), <sup>2</sup>Dosen Pascasarjana Sosiologi Pedesaan (ekawatisri@yahoo.com), <sup>3</sup>Dosen Pascasarjana Sosiologi Pedesaan (lalakolopaking@gmail.com)

### Abstrak

Migrasi spontan dari desa ke desa berdampak pada hampir setiap dimensi kehidupan manusia. Migrasi dapat memicu terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur keluarga dan struktur sosial masyarakat. Perubahan ini disertai pula dengan perubahan pola penghidupan, pengelolaan lahan serta keputusan terhadap migrasi lain. Migrasi dapat disebabkan karena sebab yang berbeda dan akumulasi sebab yang satu dengan yang lain. Studi mengenai jaringan migrasi berkontribusi terhadap potret migrasi yang berlangsung terus menerus, para aktor yang terkait dalam proses tersebut dan perannya dalam memfasilitasi migrasi dan pengaruhnya terhadap keputusan bermigrasi. Tulisan ini bertujuan mengungkapkan bagaimana jaringan migrasi pada komunitas migran Bugis di Sulawesi Tenggara dan mengkaji peran aktor dalam proses migrasi tersebut. Jaringan keluarga dan pertemanan berperan penting di tahap awal migrasi. Jaringan ini juga dimanfaatkan oleh aktor sentral dalam proses migrasi, yaitu perantara migrasi atau perantara lahan, yang menjadi salah satu simpul pada jaringan yang membuka jaringan tersebut dengan jaringan-jaringan lainnya.

**Kata Kunci:** Migrasi Desa ke Desa, Jaringan Migrasi, Sulawesi, Jaringan Keluarga, Perantara Tanah.

### PENDAHULUAN

Studi mengenai migrasi dan perpindahan penduduk telah banyak dilakukan para ahli dari berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, geografi, demografi, dan sosiologi. Isu migrasi dari desa ke desa merupakan isu yang belum banyak didiskusikan kendati tren migrasi ini mengalami peningkatan di sebagian wilayah di Indonesia. Kajian yang menitikberatkan pada proses pembentukan migrasi dari pola hubungan migran pendahulu belum cukup mendapat perhatian, terutama

### Abstract

*Spontaneous rural to rural migration have impacts on every dimension of human being, as it can lead to changes in social and family structure. These changes will be also followed by changes in livelihood, land management and decision for subsequent migration. Migration has various causes and could also resulted from cumulative causation. Study on migration network will contribute on a good portrait on continuous migration, the related actors and their roles in facilitating migration and influencing the decision for migration. Study on Buginese migrant community in Southeast Sulawesi portrays how migration network and the related actors orchestrate the migration process. Family and friendship networks play a very important role in the initial process of migration. This network is also used by another central actor in the process, namely migrant broker and land broker, who become the node on the network as well as open the network to different villages and families.*

**Keywords:** Rural to Rural Migration, Migration Network, Sulawesi, Family Network, Land Broker.

dalam konteks migrasi dari desa ke desa. Kajian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan memberikan sumbangan analisis sosiologis dalam tinjauan peranan jaringan yang menjadi instrumen dalam proses migrasi.

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah tujuan migrasi komunitas Bugis dan Tana Toraja dari Sulawesi Selatan. Sekitar 80 persen dari kelompok migran tersebut merupakan petani coklat dan merica. Proses migrasi ini telah berlangsung cukup lama dan

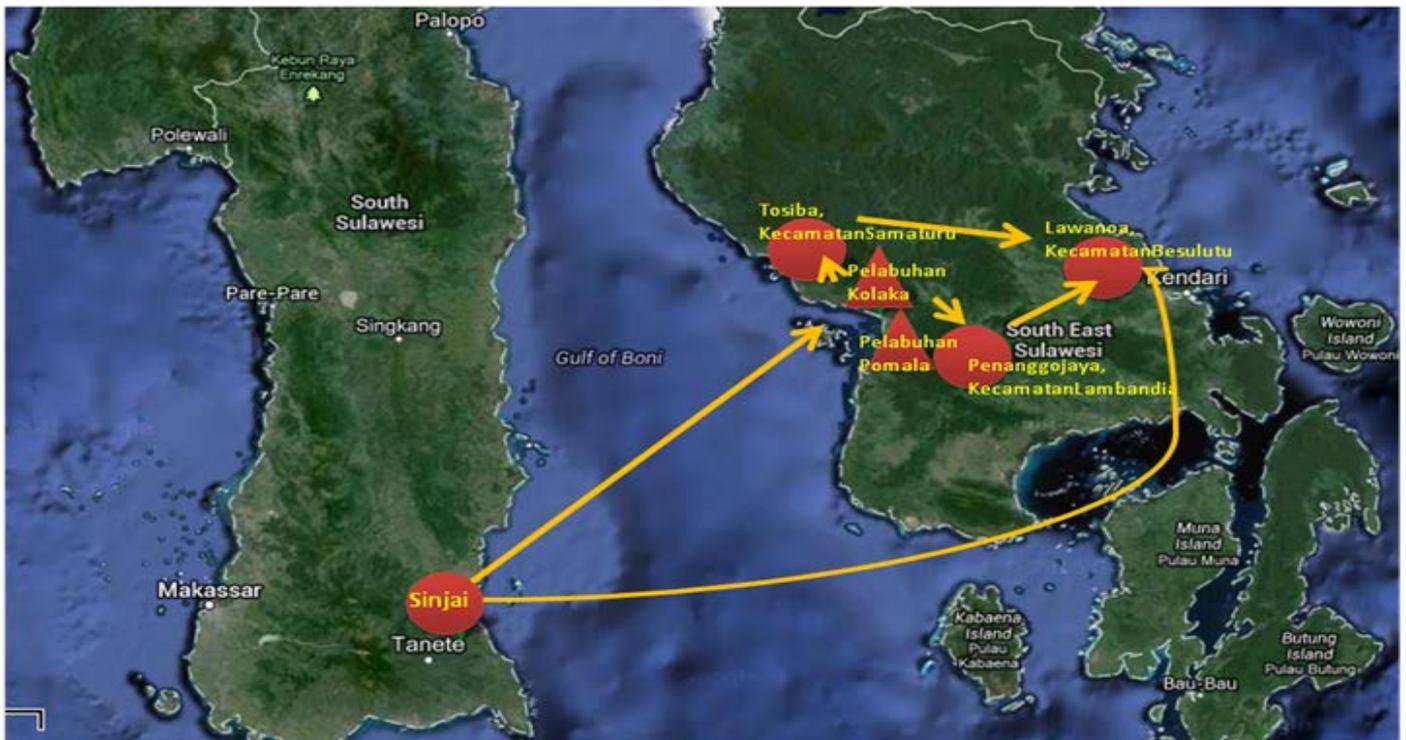
terus berlangsung secara berkala. Kondisi ini, pada akhirnya, membentuk banyak komunitas migran dari etnis Bugis yang hidup dan menetap di Sulawesi Tenggara untuk berkebun coklat. Selanjutnya, rantai migrasi komunitas Bugis ini terbentuk ketika kepulauan para migran pionir ke desa asal mereka memengaruhi keputusan komunitas asal mereka di Sulawesi Selatan untuk turut bermigrasi. Artikel ini membahas mengenai struktur jaringan yang dibentuk oleh komunitas petani coklat yang mayoritas beretnis Bugis dan tinggal di Sulawesi Tenggara sehingga membentuk terjadinya rantai migrasi. Tidak hanya di Sulawesi Tenggara, suku Bugis telah menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Mereka telah dikenal sejak jaman dulu sebagai perantau yang ulet dan selalu sukses di daerah tujuan (Lineton 1975, Acciaioli 1998, Pelras 2006). Artikel ini merupakan cuplikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2013 mengenai jaringan migrasi dan pola pengambilan keputusan bermigrasi. Tulisan ini berfokus pada aspek jaringan migrasi dan aktor utama yang terlibat di dalamnya. Pertanyaan utama yang dijawab dalam studi ini adalah mengapa migrasi dari desa ke desa oleh petani coklat beretnis Bugis dari Sulawesi Selatan terus berlangsung dan bertujuan ke wilayah Sulawesi Tenggara.

Manfaat dan tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan wawasan mengenai proses migrasi internal yang terjadi dari wilayah pedesaan ke wilayah pedesaan lainnya yang difasilitasi oleh jaringan sosial. Dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan sosiologi, kependudukan, demografi, dan psikologi, artikel ini menganalisis dinamika para aktor dalam proses migrasi internal. Diskusi mengenai jaringan sosial dan migrasi sudah banyak dilakukan dalam konteks migrasi internasional. Artikel ini menguraikan teori dan temuan empiris dalam proses migrasi internal (dari satu wilayah desa ke wilayah desa lainnya) yang dimotivasi dari kebutuhan atas lahan. Sebagai suatu kajian sosiologis, tulisan ini menggambarkan struktur masyarakat dan struktur jaringan pada komunitas migran Bugis di Sulawesi Tenggara secara eksploratif. Tulisan ini juga melihat bahwa jaringan migrasi merupakan suatu bentuk jaringan sosial, yang terdiri dari struktur dan hubungan antar aktor yang terlibat dalam proses migrasi. Fazito (2009) mendefinisikan jaringan sosial sebagai distribusi simpul (*node*) dan ikatan atau hubungan antar simpul yang dapat menggambarkan dinamika perilaku dalam suatu sistem. Simpul-simpul tersebut digambarkan sebagai individu yang terhubung dengan simpul lain melalui ikatan atau garis hubungan. Coleman (2008) menilai bahwa hubungan interpersonal yang melekat pada aktor ini tidak dapat dipindah-pindah begitu saja, dan bahkan

bisa patah atau putus, bisa memanjang, dan bisa pula memendek. Granovetter (1985) dan Burt (2005) melihat jaringan sosial sebagai sebuah ikatan yang bisa sangat kuat mengikat (*binding*), mengait (*bonding*), dan menjembatani (*bridging*), namun juga bisa sangat lemah. Kuat dan lemahnya ikatan ini dipengaruhi banyak faktor. Untuk mengurai proses terbentuknya jaringan migrasi dan peran tiap aktor dalam proses migrasi, studi ini melakukan analisis jaringan sosial atau *social network analysis* (SNA). Analisis ini diterapkan untuk menganalisis hubungan interpersonal atau antarpribadi dalam komunitas migran petani coklat beretnis Bugis di Sulawesi Tenggara. Analisis ini tidak hanya berfokus pada aktor dalam jaringan migrasi, tetapi juga posisi dan hubungan antar pelaku (*interconnection*) dalam jaringan tersebut.

Sebagai suatu kegiatan eksploratif, pendekatan kualitatif diimplementasikan dalam studi ini untuk mendapatkan gambaran yang mendalam dan menyeluruh mengenai proses migrasi. Jaringan sosial tidak hanya melibatkan aktor yang melakukan migrasi, tetapi juga aktor lain yang memengaruhi keputusan mereka untuk migrasi (Massey 1990, Portes 1998, Fazito 2009). Oleh karena itu, komunitas yang tidak bermigrasi juga perlu dilihat posisinya dalam jaringan tersebut. Dengan demikian, metode penelusuran sejarah migrasi ke daerah asal menjadi penting dilakukan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadaptasi pendekatan Wahyuni (2007) yaitu penelusuran migrasi dari daerah tujuan ke daerah asal. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana jaringan sosial yang terbentuk, baik di daerah asal maupun tujuan, dalam memengaruhi pola pengambilan keputusan migran. Eksplorasi ini tidak hanya dilakukan di Sulawesi Tenggara, sebagai lokasi tujuan komunitas migran Bugis, tetapi juga dilakukan di daerah asal mereka di Sulawesi Selatan.

Gambar 1 menunjukkan lokasi penelitian di kedua provinsi ini. Daerah tujuan adalah sebuah desa di Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara yang didominasi komunitas migran beretnis Bugis dengan sumber penghidupan utama dari kebun coklat. Sementara itu, daerah asal adalah sebuah desa yang mayoritas penduduknya petani dan pekebun yang berada di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Jika merujuk pada tipologi desa yang dikemukakan oleh Abustam (1987), daerah asal ini termasuk desa tipe pinggiran, dengan karakteristik lokasi yang tidak terpencil tetapi memiliki keterbatasan sumber daya dan tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi.



Gambar 1. Lokasi desa asal di Sulawesi Selatan dan desa tujuan di Sulawesi Tenggara, serta rute migrasi

Pengumpulan data lapangan yang dilakukan di desa tujuan maupun di desa asal dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama dilakukan di desa tujuan untuk menelusuri rantai migrasi yang dibangun oleh para migran. Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2013 selama 3-4 minggu. Wawancara mendalam dilakukan terhadap sejumlah informan kunci yang dipilih dengan teknik bola salju. Selain itu, survei rumah tangga juga dilakukan dengan 30 rumah tangga sebagai sampel. Survei rumah tangga ini dilakukan dengan menggunakan kuota sampel yang sangat minimal dan tidak memadai untuk dianalisis secara statistik. Sehubungan dengan pendekatan penelitian ini yang lebih bersifat kualitatif, hasil survey ini hanya dianalisis secara deskriptif, serta ditujukan untuk memahami karakteristik migran dan nonmigran.

Tahapan kedua dilakukan di desa asal migrasi di Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Kriteria pemilihan desa asal berdasarkan informasi dari desa tujuan, yaitu wilayah yang penduduknya masih atau belum lama mengalami proses migrasi dan terdapat 20 persen penduduk yang berstatus migran. Penelitian di daerah asal dilakukan selama kurang lebih dua minggu pada bulan April 2013. Informan kunci yang dipilih adalah penduduk yang memiliki keterkaitan migrasi dengan komunitas migran di daerah tujuan.

### DINAMIKA MIGRASI KELUAR DI DAERAH ASAL

Desa asal para migran merupakan sebuah desa yang sumber penghidupan utama komunitasnya adalah berkebun dengan mempraktikkan model kebun campur dengan sumber daya lahan terbatas. Abustam (1987) menyatakan bahwa komunitas seperti ini memiliki tingkat perpindahan penduduk yang cukup tinggi. Migrasi ini berkaitan dengan keterbatasan pilihan sumber penghidupan masyarakat dan kecilnya pendapatan dari sektor pertanian dan perkebunan (Abustam 1987), serta peluang ekonomi yang rendah bagi komunitas di desa asal ini. Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah merupakan daerah tujuan migrasi yang cukup diminati dalam rangka perluasan produksi pertanian dan perkebunan. Permasalahan lahan di desa asal ini, yang sebagian wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung dan sisanya dikuasai oleh masyarakat di luar desa, membuat masyarakat yang membutuhkan mencari lahan di luar wilayah desa mereka. Sebagian masyarakat pindah secara permanen, tetapi sebagian lainnya berkebun di daerah tujuan migrasi dan tetap kembali secara reguler ke kampung halamannya untuk mengolah lahan pertanian yang masih ada.

Migrasi penduduk di komunitas ini lebih banyak bersifat semipermanen dan musiman. Sebagian besar migran dari desa ini masih memiliki keterikatan sosial dengan keluarga yang ditinggalkan. Penduduk yang

berusia remaja (di bawah 25 tahun) dan belum menikah umumnya lebih memilih daerah Kalimantan atau Malaysia agar mendapatkan penghasilan tunai yang lebih cepat. Sementara itu, tujuan migrasi ke Sulawesi Tenggara maupun Sulawesi Tengah lebih banyak diminati oleh kelompok migran yang berusia lebih mapan (berumur sekitar 30 tahun dan sudah menikah). Hal ini dikarenakan aktivitas berkebun coklat memerlukan modal yang cukup besar untuk pembelian lahan dan bibit. Pengetahuan mengenai perkebunan coklat menjadi faktor penting sebagai modal bermigrasi bagi kelompok migran ke Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, umumnya, jaringan keluarga dan pertemanan dengan migran yang terlebih dulu ada di Sulawesi Tenggara menjadi penting.

Keputusan untuk bermigrasi ditentukan oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, budaya atau tradisi merantau, keluarga, dan keberadaan jaringan. Kebutuhan komunitas Bugis akan lahan merupakan respons terhadap tekanan ekonomi dalam konteks luas akibat adanya *booming* atau ledakan tanaman komoditi. Migrasi pada periode 1970-1980an utamanya didorong oleh ekspansi lahan untuk pertanian sawah dan perkebunan merica. Sejak tahun 1997 hingga saat ini, migrasi lebih didorong untuk kepentingan ekspansi coklat. *Booming* tanaman coklat ini dipicu oleh kondisi krisis akibat situasi politik yang dialami Pantai Gading, yang merupakan produsen utama coklat dunia, sehingga kebutuhan coklat dunia mulai diarahkan ke Indonesia (Li 2012). Keinginan mengakumulasi modal melalui program perkebunan dan kesuksesan para pionir petani coklat di wilayah Sulawesi Tengah menjadi *pull factor* bagi komunitas Bugis di Sulawesi Selatan untuk bermigrasi keluar. Budaya merantau yang sangat kental pada komunitas Bugis membentuk jaringan yang kuat antara perantau terdahulu (migran pionir) dan migran-migran berikutnya.

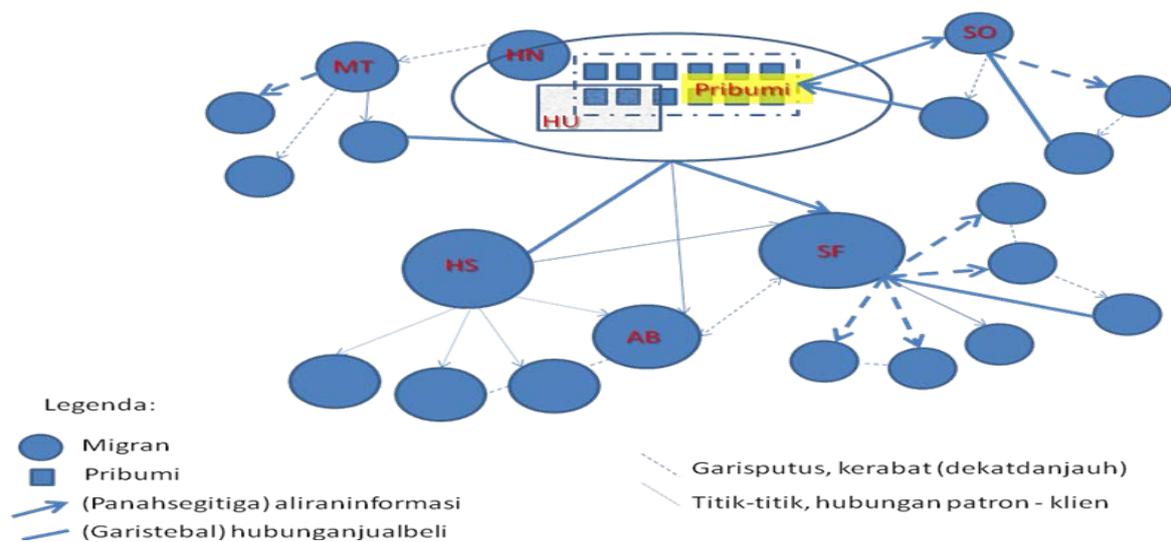
Keputusan bermigrasi merupakan suatu keputusan rumah tangga yang memperhatikan alokasi sumber daya manusia untuk mengantisipasi biaya dan risiko migrasi yang cukup tinggi. Alokasi sumber daya keluarga berdasarkan atas sumberdaya yang dimiliki oleh komponen pembentuk keluarga. Anggota keluarga laki-laki berperan untuk mengatasi risiko dengan berangkat terlebih dahulu dan memastikan keadaan di daerah tujuan sudah cukup kondusif bagi

seluruh keluarga untuk ikut pindah. Bagi komunitas migran Bugis, meskipun migrasi ke Sulawesi Tenggara bukanlah hal yang baru, dukungan dari komunitas di daerah tujuan tetap dibutuhkan untuk memberikan iklim kondusif bagi keberlangsungan migrasi. Jika keputusan akhirnya tidak ikut pindah, anggota keluarga perempuan yang ditinggalkan di desa asal tetap melakukan aktivitas pertanian rutin, secara sendiri atau dengan menggunakan tenaga kerja tambahan. Meskipun begitu, dalam periode tertentu, mereka membantu kegiatan berkebun di daerah tujuan dengan melakukan migrasi musiman. Satu contoh yang cukup nyata adalah saat migran perempuan dari Sulawesi Selatan pergi ke Sulawesi Tenggara untuk membantu suaminya panen pada bulan Mei – Juli dan menetap disana selama 3-4 bulan.

Jaringan informasi mengenai ketersediaan lahan, harga lahan, dan peluang-peluang lain untuk meningkatkan pendapatan keluarga menjadi faktor yang cukup menentukan keputusan migrasi. Selain kesamaan daerah asal, faktor kekerabatan dari beberapa migran pergi menjadi faktor penentu untuk bermigrasi. Dua dusun di desa asal migran di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, sangat terkenal sebagai daerah pengirim migran ke Sulawesi Tenggara. Jika ditelusuri lebih lanjut, para migran tersebut umumnya memiliki hubungan kekerabatan. Arus informasi yang berkaitan dengan daerah tujuan migrasi, yang umumnya bersifat cukup provokatif, telah membuka peluang para migran atau calon migran untuk mendapatkan lahan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan pelaku migran sebelumnya (migran pionir).

## JARINGAN DI DESA TUJUAN MIGRASI

Migran etnis Bugis dan Makassar datang secara bergelombang ke desa tujuan migrasi, yang berlokasi di Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. Saat ini, proporsi penduduk migran dari kedua etnis tersebut mencapai sekitar 54 persen dari jumlah penduduk desa ini. Jika dilihat dari pola kedatangan migran ke desa ini, gelombang masuknya migran terbagi menjadi tiga model, yaitu model migrasi mandiri, model migrasi yang memanfaatkan hubungan kekerabatan dari daerah yang sama, dan model pola hubungan patron-klien. Model tersebut diilustrasikan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Pola migrasi dan model jaringan yang terbentuk

Model migrasi mandiri adalah migrasi yang dilakukan atas inisiatif para migran dengan motivasi untuk mencari lahan. Mereka adalah sekelompok orang yang pergi bersama karena memiliki kesamaan tujuan yaitu mencari lahan untuk lokasi berkebun coklat. Berdasarkan informasi yang telah mereka terima sebelumnya, para migran mandiri ini bermigrasi ke wilayah-wilayah yang masih memiliki lahan yang dapat diakses. Mereka tidak mengandalkan hubungan kekerabatan ketika masuk ke desa tujuan migrasi, melainkan mereka mencari sendiri informasi lahan yang akan dijual. Mereka membangun hubungan dengan sejumlah tokoh masyarakat lokal yang penting di desa tujuan untuk mendapatkan lahan dan tempat tinggal sementara. Kelompok migran ini umumnya sudah memiliki dana yang cukup untuk membeli lahan. Mayoritas migran dalam model ini merupakan migran atau keturunan migran dari generasi yang datang tahun 1970 – 1980an dan berasal dari wilayah lain di Sulawesi Tenggara. Pada Gambar 2, pola migrasi mandiri ini ditunjukkan oleh aktor dengan inisial SO.

Pada model migrasi yang memanfaatkan hubungan kekerabatan dari daerah yang sama, hampir 50 persen migran di desa tujuan merupakan kelompok-kelompok yang berasal dari daerah yang sama atau memiliki hubungan kekerabatan. Sebagian dari mereka berasal dari Kabupaten Bulukumba dan Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka umumnya datang berdasarkan informasi dari kerabat atau tetangga mereka yang telah terlebih dahulu pindah ke desa tujuan migrasi. Jaringan kekerabatan ini memungkinkan mereka mendapatkan informasi tentang lahan yang dijual dan mendapatkan tempat tinggal sementara selama menunggu proses negosiasi lahan. Sebagian dari mereka bahkan pindah terlebih

dahulu ke desa ini sebelum mendapatkan lahan yang akan diolah. Migran tipe ini datang secara bergelombang, namun diperkirakan terdapat 1-2 kepala keluarga (KK) per tahun yang masuk ke desa ini dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Selanjutnya, model pola hubungan patron-klien antara pemilik tanah (*Ajjoa'raeng*) dan pengikutnya (*Joa'*) menjadi salah satu pintu masuk terjadinya migrasi pada sekitar periode 1997an. Hubungan mereka merupakan manifestasi dari nilai *siri'* yang menjadi pendorong terjadinya mobilisasi antar keduanya (Pelras 2006). Pemilik tanah memiliki modal untuk membuka kebun dan merekrut beberapa pengikut dari desa asal yang sama untuk membuka lahan, menanam dan merawat kebunnya. Setelah lima tahun dan coklat mulai menghasilkan, sistem bagi hasil diterapkan. Di satu sisi, *ajjoa'raeng* berupaya menjaga hubungan dengan para klien untuk mendukung kegiatan ekonomi serta mempertahankan jaringan kuasa mereka (Pelras, 2006). Di sisi lain, klien, yang umumnya berasal dari kelompok ekonomi bawah, dapat tetap mempertahankan sumber pendapatannya. Selain itu, proses migrasi klien ke daerah baru menjadi tidak berisiko besar serta dapat menekan biaya migrasi. Pada Gambar 2, pola hubungan patron-klien ini dapat dicermati pada aktor HS yang berperan sebagai patron.

### JARINGAN MIGRASI DI DESA TUJUAN

Dalam studi migrasi, simpul atau *node* merupakan para aktor, baik pelaku maupun bukan pelaku migran, yang saling berhubungan dan membentuk jaringan migrasi (Fazito 2009). Jaringan migrasi merupakan bentuk modal sosial yang terbentuk ketika para pelaku migran membangun ikatan sosial dan budaya antara

daerah tujuan dengan daerah asalnya. Dengan demikian, jaringan sosial yang dikembangkan oleh komunitas migran dalam proses pengambilan keputusan migrasi dapat ditelusuri, baik di daerah asal maupun di daerah tujuan migrasi. Di kedua daerah tersebut, penelitian ini menemukan tiga bentuk jaringan yang merupakan strategi para migran yang memengaruhi keputusan migrasi. Pertama, jaringan atas dasar hubungan kekerabatan, baik kerabat dekat atau keluarga inti maupun kerabat jauh atau *extended family*. Strategi ini umumnya dilakukan oleh komunitas migran yang cenderung lebih matang, memiliki modal dana yang cukup untuk bekal bermigrasi, serta pengetahuan bertanam coklat sebagai syarat untuk berkebun.

Kedua, jaringan yang dibentuk dari dua pihak yang memiliki status ekonomi atau status sosial tidak setara. Jaringan ini dibangun melalui mekanisme patron-klien, ketika pemilik modal yang berperan sebagai patron membutuhkan tenaga kerja dari komunitas yang berada di level bawah atau yang berperan sebagai klien. Patron memberikan pekerjaan dan dukungan finansial, termasuk biaya untuk melakukan migrasi dan memenuhi kebutuhan hidup di masa awal migrasi. Klien ini membutuhkan patron untuk meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga dengan bekerja mengolah lahan patron, sekaligus untuk meminimalkan risiko migrasi. Pada pola hubungan seperti ini, keputusan klien untuk bermigrasi seringkali bukan merupakan keputusan sukarela, tetapi karena adanya keterpaksaan akibat tekanan ekonomi atau karena adanya hubungan horizontal dengan patronnya.

Ketiga, pola hubungan yang terbentuk karena kesamaan tujuan. Pola hubungan ini umumnya dipengaruhi karena kesamaan identitas, lokasi asal, ataupun tempat tinggal saat ini. Pola hubungan ini umumnya terdapat pada komunitas migran pionir yang telah lama menetap di Sulawesi Tenggara. Dari pengalamannya bermigrasi, kelompok ini membangun jaringan ketetangaan atau kesamaan identitas sebagai orang Bugis. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperluas kepemilikan lahan perkebunan dengan melakukan ekspansi ke desa-desa yang masih memiliki lahan luas. Pola-pola hubungan ini seringkali tumpang tindih, contohnya pola hubungan vertikal, seperti patron-klien, juga dapat diperkuat dengan adanya pola hubungan kekerabatan dan ketetangaan yang bersifat horizontal. Dengan kata lain, dalam hubungan patron-klien, hubungan kekerabatan yang dimiliki antar keduanya dapat mendorong keputusan klien untuk bermigrasi menjadi lebih besar, tidak hanya sekedar karena kebutuhan ekonomi, tetapi juga rasa tidak enak menolak tawaran dari kerabat.

## SENTRALITAS KEANTARAAN DAN SENTRALITAS PENGARUH

Analisis jaringan migrasi atau analisis jaringan sosial dilakukan menggunakan piranti lunak NodeXL yang mampu mengukur dan memvisualisasikan hubungan para aktor. Dalam piranti lunak tersebut, aktor dalam migrasi divisualisasikan dalam simpul (*node*) yang dihubungkan dengan garis-garis yang menggambarkan keterhubungan satu sama lain. Pada skala mikro, yaitu pada komunitas yang tidak terlalu besar ukurannya, analisis jaringan sosial dapat dilakukan dengan cukup baik karena aktor yang terlibat belum terlalu kompleks hubungannya. Namun, jika pemetaan dan analisis jaringan ini dilakukan dalam skala yang lebih besar, yaitu meliputi masyarakat yang sangat besar dan kompleks, maka teknik komputasi perlu dilakukan. Piranti Node XL<sup>1</sup> dibangun atas dasar kebutuhan tersebut dan merepresentasikan data secara lebih sistematis. Pada analisis ini, ikatan atau hubungan antar simpul atau aktor terdiri dari beragam model. Kekerabatan (baik keluarga inti maupun keluarga jauh/*extended family network*), hubungan jual beli, hubungan patron-klien, dan transfer informasi merupakan indikator yang digunakan untuk melihat posisi dan hubungan antar-individu atau simpul. Dengan bersandar pada pemikiran Burt (2005) mengenai lubang struktur atau *structural hole* yang mampu memecah dan mempersatukan jaringan yang terdapat dalam modal sosial, studi ini berupaya melihat simpul mana yang berperan penting dalam lubang struktur tersebut. Untuk itu, Mitchell (1974) menekankan pentingnya melihat keterhubungan, kerapatan dan ukuran dari jaringan tersebut.

Studi ini mengacu pada pemikiran Borgatti (2005) yang melihat dua model sentralitas dalam jaringan sosial, yaitu sentralitas keantaraan (*betweenness centrality*) dan sentralitas pengaruh atau kekuasaan (*eigenvector centrality*). Untuk mengukur kedua sentralitas tersebut, jaringan migrasi diuraikan dengan menggunakan arus informasi mengenai lahan sebagai indikator utama yang menentukan posisi aktor (*node*) yang penting dalam struktur jaringan migrasi. Indikator informasi lahan yang berkaitan dengan lokasi dan harga menjadi faktor penting dalam

---

<sup>1</sup>Meskipun tidak dilakukan dalam lingkup masyarakat yang sangat luas, studi ini menggunakan piranti NodeXL. Hal ini dilakukan dengan harapan studi serupa dapat diimplementasikan di daerah-daerah lainnya, sehingga data antardaerah dapat disimpan dan dapat menggambarkan kondisi yang lebih umum. Dengan kata lain, piranti ini dapat membantu mengorganisir data dengan lebih baik, terutama jika skala studi ditingkatkan.

menentukan keputusan bermigrasi. Menurut Borgatti (2005), sentralitas keantaraan (*betweenness centrality*) merujuk pada aktor atau simpul yang menjadi pusat dalam jaringan berdasarkan perannya sebagai mediator atau pengendali informasi jaringan. Aktor ini memiliki peran penting sebagai pemberi informasi terhadap aktor lain yang dapat menentukan keputusan mereka untuk bermigrasi. Aktor dengan nilai sentralitas keantaraan tertinggi adalah aktor yang berperan dalam memberikan informasi kepada para migran. Dalam menentukan keputusan untuk bermigrasi, reputasi atau kekuatan aktor adalah hal yang sangat krusial. Dengan demikian, sesuai pemikiran Borgatti, sentralitas pengaruh (*eigenvector centrality*) menjadi ukuran untuk melihat simpul atau aktor mana yang menjadi sentral dalam studi ini. Aktor atau simpul yang memiliki nilai sentralitas pengaruh atau kekuasaan cukup besar adalah aktor yang mampu memengaruhi keputusan komunitas migran Bugis untuk berpindah ke desa tujuan migrasi.

Hasil pemodelan NodeXL dalam jaringan migrasi di Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa aliran migrasi ke desa tujuan migrasi lebih dikendalikan oleh aktor SF dan AB yang memiliki reputasi atau kekuatan mengikat yang tinggi (Tabel 1). Informasi dari wawancara mendalam menunjukkan bahwa kedua aktor tersebut merupakan migran pionir, sekaligus makelar tanah atau pengendali pasar lahan. Kedua aktor ini memiliki peran sentral karena aktif mencari dan membuka jaringan dengan daerah baru. Mereka menggabungkan beberapa jaringan yang ada di beberapa daerah yang ditentukan oleh kesamaan daerah tujuan migrasi sebelumnya di Sulawesi Tenggara, kesamaan daerah asal di Sulawesi Selatan, serta hubungan persaudaraan.

Nilai sentralitas keantaraan tertinggi ditunjukkan oleh aktor SPE, AB, dan SF secara berurutan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa SPE dan AB memanfaatkan jaringan kekerabatan dekat (*closed family network*) maupun jauh (*extended family network*) dalam membentuk aliran migrasi. Hal ini menunjukkan bahwa peranan jaringan kekerabatan dalam mediasi atau mengendalikan informasi dalam proses migrasi cukup penting. Informasi mengenai ketersediaan lahan yang dapat diakses, khususnya mengenai harga dan kondisi lahan, menjadi salah satu faktor penentu yang cukup penting dalam proses pengambilan keputusan bermigrasi. Keputusan ini juga ditentukan oleh pengaruh aktor/individu/organisasi yang terkait. Nilai sentralitas pengaruh

dapat menunjukkan apakah aktor/individu/organisasi/kelompok mampu memengaruhi keputusan individu/kelompok. Nilai ini juga menunjukkan aktor atau organisasi yang mampu menembus batas-batas kelompok yang ditunjukkan dari jauh dekatnya (*distance*) hubungan antar aktor/kelompok tersebut. Selain itu, nilai ini juga mengindikasikan banyaknya relasi yang terjalin dengan aktor/individu pada kelompok yang berbeda. Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai sentralitas pengaruh SPE lebih kecil dibandingkan dengan SF. Nilai sentralitas yang dimiliki SF dan AB dapat menunjukkan kekuatan keduanya untuk menembus batas-batas kelompok, yaitu jaringan patron-klien yang dibuat oleh HS. Kondisi ini tentunya dapat memengaruhi keputusan patron HS dan klien-kliennya. Kedua aktor ini, SF dan AB, tidak hanya memiliki relasi dengan individu/kelompok yang berasal dari kelompok migran dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, tetapi juga kelompok migran yang sudah terlebih dahulu menetap di Sulawesi Tenggara.

Sementara itu, nilai sentralitas pengaruh dari BAS dan TON juga tergolong cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kedua aktor ini cukup berpengaruh atas keputusan bermigrasi dan pemilihan desa tujuan migrasi. Meskipun begitu, mereka tidak memiliki nilai sentralitas keantaraan yang cukup signifikan yang dapat menunjukkan kemampuan mereka dalam mengendalikan informasi tentang lahan.

Tabel 1. Nilai sentralitas keantaraan (*betweenness centrality*) dan sentralitas pengaruh (*eigenvector centrality*) pada beberapa aktor dalam jaringan migrasi Sulawesi Tenggara

Inisial aktor dalam jaringan	Sentralitas keantaraan	Sentralitas pengaruh
AB***	824.333*	0.095*
H	490.000	0.003
SPE**	871.133*	0.042
SF***	475.067	0.094*
UC	570.000	0.013
BAS	0.008	0.082
TON	0.008	0.082
GN	0.006	0.052
SUP	0.006	0.057
TGL	0.006	0.052

Catatan:

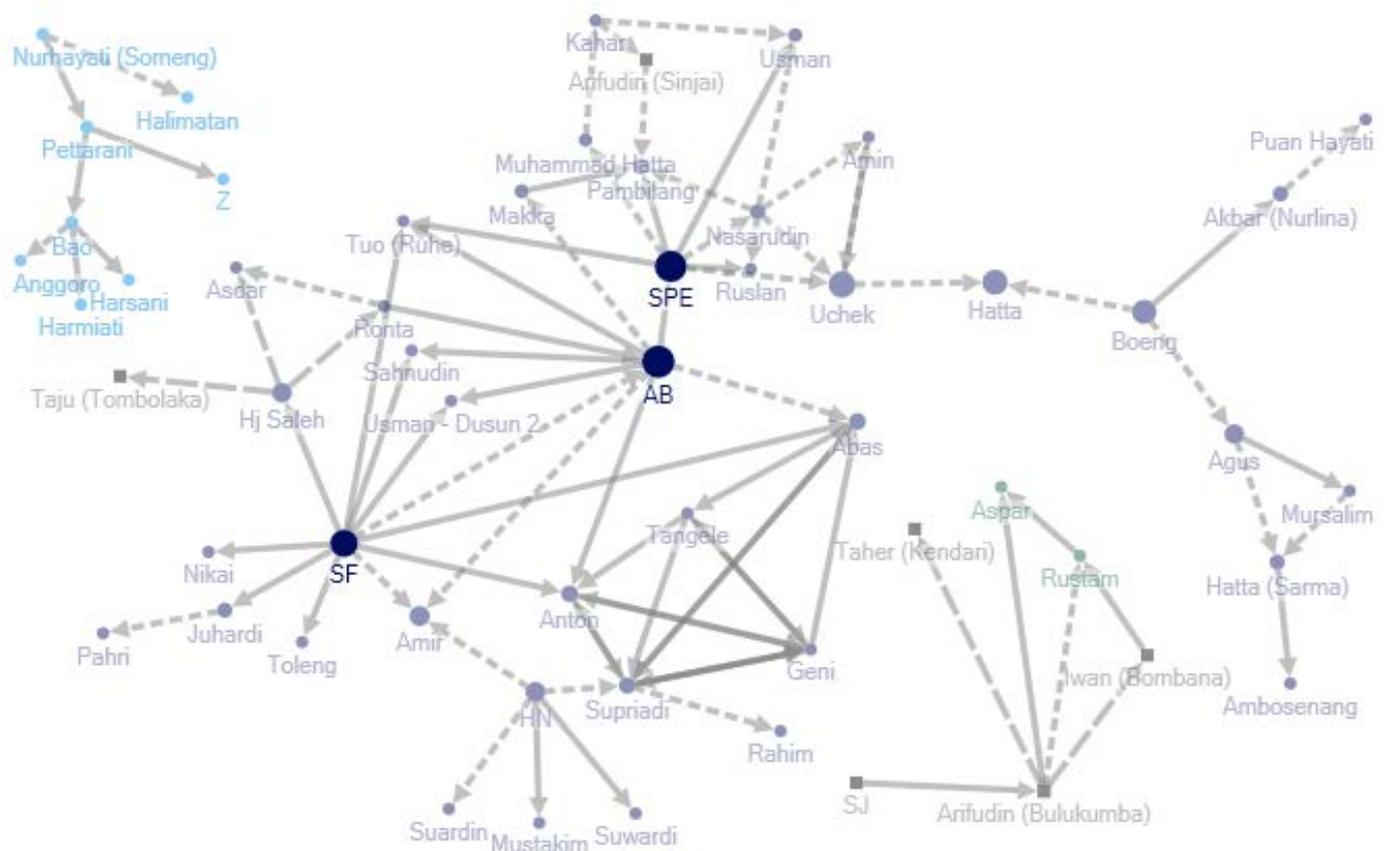
AB, H, SPE, SF, UC, BAS, TON, GN, SUP, TGL adalah inisial nama-nama aktor

yang terlibat dalam jaringan migrasi.

\* Nilai tertinggi untuk masing-masing kategori

\*\*Aktor/Individu/Kelompok yang menjadi pusat/sentralitas kedua dalam jaringan tersebut

\*\*\* Aktor/Individu/Kelompok yang menjadi pusat/sentralitas utama dalam jaringan



Gambar 3. Jaringan migrasi dan sentralitas para aktor

Visualisasi hubungan antar aktor/individu ditampilkan pada Gambar 3 di atas. Jika dicermati, tiga aktor SPE, AB, dan SF memiliki simpul yang paling tebal di antara simpul lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga aktor tersebut merupakan pusat dari jaringan sosial ini. Pada gambar ini juga terlihat kelompok jaringan yang terputus dari lainnya. Mereka merupakan kelompok jaringan yang memanfaatkan jaringan yang dibangun berdasarkan kesamaan identitas sebagai migran Bugis yang telah cukup lama menetap di Sulawesi Tenggara. Jaringan lain yang terpisah adalah jaringan yang terbangun dari pola hubungan vertikal yang dibangun oleh AFN. AFN membentuk jaringan dari hubungan kekerabatan, tetapi tidak memanfaatkan jaringan perantara yang dibangun oleh AB dan SF. Kelompok migran ini adalah kelompok migran yang relatif cukup baru (sekitar 5 tahun terakhir).

### SIMPUL UTAMA DALAM JARINGAN MIGRASI

Migrasi yang terjadi di desa tujuan migrasi di Sulawesi Tenggara difasilitasi oleh broker atau perantara yang memiliki pengaruh cukup besar pada ketiga model migrasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Broker ini menjembatani kelompok-kelompok migran dari berbagai daerah untuk memilih lahan dan memutuskan

bermukim di desa tersebut. Burt (2005) menjelaskan bahwa broker adalah aktor yang mampu menjembatani individu atau kelompok individu yang awalnya tidak saling berhubungan. Burt (2005) menekankan bahwa broker memiliki kemampuan untuk membangun *trust* atau rasa percaya migran sehingga pada akhirnya mereka memutuskan tinggal di desa tersebut. Fungsi broker juga ditekankan oleh Stove dkk. (2011) yang mengemukakan bahwa karakteristik penting aktor ini adalah menjembatani kesenjangan informasi, serta peredaran barang dan jasa dalam struktur sosial masyarakat.

Stovel dan Shaw (2012) mengungkapkan dua aspek terkait dengan posisi dan struktur broker dalam komunitas pendatang dan komunitas asli yang saling bertentangan. Di satu sisi, broker memudahkan terjadinya interaksi sosial, meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan meminimalkan risiko para migran. Di sisi lain, broker seringkali dikaitkan dengan eksploitasi dan pengalihan risiko migrasi menjadi akumulasi keuntungan bagi pihak broker itu sendiri. Hal ini terlihat ketika migran Bugis membutuhkan perantara tanah untuk meminimalkan risiko mereka dalam mengakses lahan di daerah tujuan. Untuk memudahkan proses migrasi, para migran harus membayar lebih mahal untuk lahan dan jasa yang didapatkan dari broker. Sementara itu,

keberadaan broker juga dibutuhkan oleh masyarakat lokal di desa tujuan migrasi. Ketika masyarakat membutuhkan uang, keberadaan broker dapat membantu penjualan tanah mereka. Situasi ini cukup sering dijumpai karena masyarakat setempat umumnya tidak terlalu berminat untuk menanam coklat. Petani lokal umumnya lebih tertarik terhadap tanaman semusim. Meskipun begitu, broker juga terkadang meminta masyarakat untuk menjual lahan yang tidak/belum dikelola.

Dalam konteks migrasi internasional, McKeown (2012) mengemukakan bahwa broker acapkali dicap sebagai sumber kejahatan migrasi. Mereka 'menggerogoti' manfaat migrasi demi mengeruk keuntungan finansial. Berbagai upaya hukum dikembangkan untuk mengatasi dan mengantisipasi kemunculan para broker tersebut. McKeown (2012) membahas regulasi yang mengatur wilayah perbatasan sebagai pintu masuk migrasi agar dapat memudahkan proses migrasi. Bagi McKeown (2012), aturan ini justru semakin membuat peran broker menjadi tak terlihat dan solusi mengatasi persoalan migrasi belum terlihat nyata. Pada konteks migrasi internal, khususnya migrasi spontan dari desa ke desa, yang dikaji dalam studi ini, peran broker perlu dilihat dalam struktur masyarakat migran dan masyarakat luas. Hal ini penting dilakukan untuk membantu pemetaan dan pemahaman persoalan tipe migrasi seperti ini. McKeown (2012) mengkritisi bahwa upaya solusi persoalan migrasi seharusnya meninjau proses migrasi, serta posisi dan peran broker dalam struktur yang membentuk migrasi.

Selanjutnya, Stovel dan Shaw (2012) mengemukakan bahwa pandangan struktural berakar pada konsepsi berbasis jaringan yang melihat struktur sosial sebagai suatu pola hubungan antar-entitas sosial yang menyusun suatu masyarakat. Pandangan ini melihat bahwa relasi sosial terdistribusi antar kelompok masyarakat, yang didalamnya terdapat kantung hubungan multivalent, seperti keluarga, ketetanggaan, kelompok etnik, dan kelompok sosial lainnya yang berdiri sendiri dan tidak terhubung satu sama lain. Tiap kelompok tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan dalam membentuk ikatan yang berbeda satu sama lain. Lubang struktur (*structural hole*) adalah suatu celah ketika hubungan tersebut, baik yang lemah maupun yang kuat, tidak terhubung satu sama lain. Broker adalah aktor yang mampu menghubungkan entitas sosial yang tidak terhubung tersebut. Dengan demikian, secara sosiologis, broker memiliki fungsi yang sulit diuraikan dan berpengaruh secara signifikan terhadap terbentuknya suatu komunitas migran baru di suatu wilayah.

Faist (2014) menjelaskan secara detail peran broker sebagai fasilitator proses migrasi. Menurut Faist (2014), broker berperan dalam penentuan pilihan dan dalam proses pengambilan keputusan oleh para migran. Meskipun begitu, peran mereka seringkali tidak terlihat nyata atau tidak disadari. Informasi yang diberikan oleh broker mengenai lahan yang dijual mengarahkan para migran untuk memilih daerah tujuan migrasi. Informasi ini diberikan secara sporadis melalui jaringan yang dibangun dari hubungan keluarga atau kerabat, tetangga dan pertemanan. Namun, keputusan bermigrasi dan pilihan daerah yang dituju akan sangat tergantung pada hubungan antara perantara, kerabat, dan migran itu sendiri. Stovel dan Shaw (2012) menyatakan bahwa pemahaman mengenai peranan broker ini harus berawal dari aspek mikro yang menunjukkan hubungan informal antarpribadi tersebut. Meskipun begitu, signifikansi aktor perantara ini juga dapat terlihat dari konsekuensi peranan mereka di tingkat makro. Mereka adalah pihak yang juga memengaruhi pasar lahan dan pemasaran hasil produksi komoditas tersebut.

Diskusi mengenai broker/perantara dan posisinya dalam struktur sosial masyarakat banyak dilakukan dalam konteks migrasi antarnegara (internasional) (Faist 2014, Fazito dkk 2008, Fazito 2009, Palloni dkk. 2001). Diskusi tersebut juga meliputi yang juga meliputi peran perantara dalam mendukung proses legalitas migrasi (McKeown 2012). Studi ini melihat bagaimana peran perantara dalam memfasilitasi proses migrasi internal. Motif utama yang mendorong perpindahan penduduk internal tersebut adalah mendapatkan lahan dalam rangka peningkatan sumber pendapatan komunitas migran tersebut. Motivasi migrasi seperti ini cukup banyak dijumpai pada komunitas yang bermigrasi secara mandiri dan yang memanfaatkan hubungan kekerabatan. Sementara itu, motivasi yang mendorong suatu komunitas bermigrasi dengan model patron-klien cenderung berupa keinginan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi rumah tangga atau terkadang keterpaksaan karena tidak mampu menolak kemauan patronnya. Pembahasan berikut ini mengkaji tentang proses yang dilakukan oleh broker migrasi untuk mendapatkan lahan dan berbagai strategi yang diterapkan.

Beberapa peran broker migrasi di desa tujuan migrasi yang teridentifikasi dalam studi ini adalah: (1) memberikan informasi mengenai kondisi dan harga lahan yang dijual di suatu wilayah, (2) memfasilitasi cara pembayaran lahan yang umumnya dilakukan nontunai, (3) membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan status lahan yang telah dijual kepada komunitas migran.

Dalam konteks desa penelitian, AB dan SF adalah broker migrasi atau lebih tepat disebut sebagai perantara tanah. Tiap tokoh ini memiliki peran penting dalam membantu proses jual beli tanah yang ada di desa tujuan migrasi dan memfasilitasi proses migrasi beberapa komunitas migran. Broker SF, dengan ikatan terhadap daerah asal dan jaringan yang luas karena telah lama bermukim di Sulawesi Tenggara, berperan dalam penyebaran informasi mengenai lahan yang dapat diakses di desa-desa di Sulawesi Tenggara. Jaringan migrasi SF tidak hanya meliputi komunitas yang masih tinggal di Sulawesi Selatan, tetapi juga komunitas yang telah lama bermukim di Sulawesi Tenggara yang masih ingin melakukan ekspansi lahan ke desa lain untuk bertanam coklat. Sementara itu, broker AB, yang menetap di desa tujuan migrasi, berperan dalam negosiasi pembelian dan penjualan lahan. AB juga berperan dalam memantau berbagai perkembangan yang terjadi di desa tujuan migrasi yang dampak berdampak pada status lahan. Selain itu, AB berperan sebagai penjamin pembayaran oleh komunitas migran atas pembelian lahan milik masyarakat lokal di wilayah tersebut.

Orang Bugis yang pertama datang ke desa tujuan migrasi ini adalah migran pionir yang terlebih dahulu bermukim di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Tokoh utamanya adalah SOM yang berasal dari Ponggolaka dan bekerja sebagai petani padi sawah. Atas dasar kebutuhannya terhadap lahan, pada pertengahan tahun 1990an (sekitar tahun 1994) mereka (SOM dan kelompoknya yang terdiri dari 10 KK) sengaja mendatangi beberapa desa yang ada di sekitar Konawe untuk mencari lahan yang dapat diakses. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa harga lahan di wilayah pemukiman mereka saat itu cukup mahal. Selain itu, hampir semua lahan sudah dimiliki masyarakat setempat. Kelompok tersebut, pada akhirnya, memperoleh lahan di daerah Konawe, sehingga mereka memutuskan untuk pindah ke desa di wilayah tersebut dan memulai kehidupan mereka dari awal. Pada saat itu, sekitar tahun 1995-1996, desa ini masih dalam tahap perkembangan dan masih memiliki ketersediaan lahan yang cukup besar. Tokoh SOM memperoleh lahan dari seorang tuan tanah beretnis Tolaki yang sedang membutuhkan dana untuk berobat. Sesuai dengan proses pencarian lahan yang dilakukan secara berkelompok, perpindahan ke desa tujuan migrasi dan pola menetap para migran juga berkelompok. Namun, tidak semua migran tersebut sanggup bertahan dengan kondisi yang ada. Saat mereka pindah ke desa ini, kondisi lahan masih berupa hutan semak belukar yang cukup rawan. Akses masuk ke wilayah desa ini juga cukup berat. Selain itu,

penerimaan masyarakat lokal belum cukup baik terhadap mereka.

Ketika tuan tanah beretnis lokal (HS) berkeinginan menjual bagian lahan lainnya kepada komunitas migran Bugis yang tertarik untuk membuka kebun coklat, proses penjualan lahan tersebut tidaklah mudah. SF, yang juga mengenal SOM, mengetahui situasi ini, sehingga SF, bersama rombongan dari Ponggolaka, membeli sejumlah besar lahan dari penduduk lokal dan mencoba mengajak rekan lain dari kampungnya di Sulawesi Selatan untuk membantunya menjual lahan. Di saat yang bersamaan, seorang tuan tanah beretnis Bugis HN (patron) ingin membeli lahan dan membawa beberapa anggota keluarga dari Sulawesi Selatan untuk membantunya mengolah lahan (klien). HN, pada akhirnya, mendapatkan lahan dengan bantuan SF. Dengan demikian, peran SF sebagai perantara tanah dan broker migrasi menjadi semakin besar. Sementara itu, AB, yang bermukim di desa tujuan migrasi dan menjadi salah satu pengolah lahan patron HN, juga ikut bekerjasama dengan SF dengan berperan sebagai penjamin pembelian lahan. Pembayaran atas pembelian lahan umumnya dilakukan dengan memberikan uang muka dengan jumlah tertentu dan pelunasannya dilakukan setelah coklat mulai menghasilkan. Meskipun sistem pembayaran mundur ini memiliki risiko bagi penjual tanah, tetapi keberadaan AB sebagai penjamin pembelian lahan dapat meningkatkan kepercayaan para penjual tanah. Berikut adalah cuplikan wawancara dengan AB yang menggambarkan prosesnya mendapatkan lahan di desa ini.

*AB pindah ke desa tujuan tahun 1996. AB adalah petani yang pindah ke desa tujuan untuk mengolah lahan patronnya. Namun, setelah memiliki modal cukup, AB bekerjasama dengan SF membeli lahan seluas 500 hektar, harganya berkisar antara Rp200.000,- s.d. Rp500.000,- per hektar. Dana yang mereka kumpulkan menjadi uang muka pembelian lahan. Mereka membuat kesepakatan untuk membayar harga sisanya setelah panen coklat dilakukan. Lahan tersebut kemudian ditawarkan kepada kerabat AB di Sulawesi Selatan serta di beberapa daerah lainnya yang memiliki jumlah komunitas Bugis cukup besar, seperti di Kolaka (Sulawesi Tenggara).*

*AB sengaja mencari keluarga dari Sulawesi Selatan untuk pindah dan mengolah lahan di desa ini. Tujuan AB adalah supaya desa ini bisa lebih ramai*

*dan pekerjaan berkebun bisa lebih mudah dilakukan. Berbagai upaya dilakukan oleh AB untuk mengajak keluarganya pindah dan mengolah lahan di desa ini. Banyak keluarga yang akhirnya tertarik untuk membeli dan mengolah lahan di desa ini.*

*Hingga saat ini, telah banyak migran yang datang secara berangsur dari desa asal AB dan sekitarnya. Menurut AB, salah satu modal yang dia miliki untuk mengajak orang bermigrasi adalah modal uang secukupnya untuk membayar uang muka lahan, serta juga pengaruh yang cukup besar untuk membujuk orang-orang agar mau membeli dan mengolah lahan di desa ini. AB berkisah bahwa upayanya memengaruhi orang-orang tersebut tidaklah mudah, terutama karena dia memiliki masa lalu yang suram dan dikenal sebagai preman. Namun, berkat kesungguhan, dia membuktikan bahwa dia bisa berkebun dan memperoleh hasil yang cukup memuaskan. Hal ini, akhirnya, meningkatkan kepercayaan orang-orang sekitarnya. maka orangpun mulai percaya. Selain itu, bagi keluarga dan tetangga yang membeli lahan melalui dirinya, AB memberikan kemudahan pembayaran lahan secara berangsur yang dapat dilakukan setelah lahan kebun yang diolah memberikan hasil. AB menyatakan bahwa dialah yang akan menanggung risiko paling besar. Oleh karena itu, dia mendapatkan imbalan yang cukup besar dari penjualan lahan kebun ini (dapat mencapai dua atau tiga kali lipat dari harga lahan).*

Legalitas tanah yang diperjualbelikan juga sering berada di garis abu-abu. Hal ini disebabkan beberapa tanah tidak memiliki bukti legalitas yang didukung dengan surat atau sertifikat dari BPN. Walaupun beberapa transaksi diketahui oleh kepala desa dan pembeli mendapatkan surat jual beli dari kepala desa, transaksi-transaksi lainnya belum mendapatkan surat jual beli maupun surat tanda kepemilikan atas tanahnya. Hal ini disebabkan pembeli yang datang hanya mengolah lahan milik kerabatnya. Akibatnya, surat jual beli tanah masih menggunakan surat yang diperoleh pembeli sebelumnya. Pembelian yang dilakukan melalui broker umumnya lebih aman, karena baik pembeli atau penjual lahan senantiasa menghendaki lahan mereka memiliki status jelas. Beberapa komunitas migran sudah mendaftarkan status tanahnya untuk mendapatkan sertifikat

kepemilikan lahan. Upaya pendaftaran status lahan ini juga dilakukan dengan meminta bantuan broker untuk mempermudah dan mempercepat proses.

Selanjutnya, selama tiga tahun belakangan ini, sebagian tanah masyarakat desa tujuan migrasi telah diberikan kepada sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Komunitas etnis lokal dan komunitas migran Bugis memberikan sebagian lahan mereka untuk ditanami kelapa sawit milik perusahaan perkebunan dengan menggunakan mekanisme bagi hasil setelah lahan tersebut menghasilkan kelapa sawit. Sekitar 80 persen dari luas perkebunan yang diolah perusahaan tersebut menggunakan lahan yang dimiliki masyarakat setempat. Perusahaan ini membantu dalam penanaman dan pemupukan tanaman. Sementara itu, hasil panen akan dibagi dua antara perusahaan dan pemilik lahan. Penyerahan penggunaan lahan ke pihak perusahaan kelapa sawit juga berpotensi menimbulkan masalah. Oleh karena itu, peran broker tanah menjadi tidak sekedar memfasilitasi komunitas migran Bugis untuk mendapatkan tanah, tetapi juga dalam memastikan status lahan yang diserahkan ke perusahaan. Contohnya, dalam hal membenahi batas-batas lahan yang rancu dalam surat keterangan jual beli. Berkaitan dengan hal ini, SF dan AB berperan sangat penting untuk memfasilitasi konflik yang terjadi antara komunitas lokal dan perusahaan, serta antara komunitas migran dan perusahaan. Kepala Desa di desa tujuan migrasi juga memfasilitasi segala permasalahan konflik atas lahan yang terjadi. Situasi ini berimplikasi pada pentingnya upaya SF dan AB dalam menjaga hubungan baik dengan kepala desa setempat dan bekerjasama untuk mengatasi konflik yang ada.

## **PENUTUP**

Pola keterhubungan para aktor dalam proses migrasi lebih banyak difasilitasi oleh informasi dari agen perantara lahan yang memanfaatkan hubungan kekerabatan. Dengan adanya informasi, jaringan ini menurunkan biaya migrasi dan meningkatkan jumlah orang yang bermigrasi. Jaringan sosial yang dimanfaatkan atau sengaja dibentuk oleh migran bisa terjadi secara vertikal maupun horizontal. Hubungan secara horizontal merupakan hubungan aktor dalam jaringan dengan posisi yang setara atau relatif seimbang, seperti hubungan pertemanan, kerabat dan kesamaan tempat tinggal. Hubungan mereka relatif seimbang meski seringkali tidak betul-betul seimbang. Sementara itu, hubungan secara vertikal merupakan hubungan yang level para aktornya tidak sama, misalnya satu aktor memiliki level kesejahteraan lebih tinggi. Jaringan vertikal ini jelas

terlihat dari pola hubungan patron-klien, ketika para klien pindah untuk mengelola lahan milik patronnya.

Analisis jaringan sosial yang dilakukan menggunakan piranti lunak NodeXL menunjukkan bahwa sentralisasi keantaraan dan sentralisasi pengaruh yang paling dominan adalah para aktor yang berprofesi sebagai broker migrasi. Faktor sentralisasi keantaraan dan sentralisasi pengaruh ini dipilih karena kedua faktor ini menunjukkan aktor yang mampu menyebar informasi hingga menembus batas-batas kelompok dan memengaruhi keputusan migran. Dari analisis ini, jaringan kekerabatan dan ketetanggaan cukup penting sebagai instrumen yang digunakan untuk menyebarkan informasi.

Broker muncul dalam kondisi struktural yang terbentuk secara historis pada komunitas lokal dan komunitas migran. Dalam hal ini, peran para migran pionir cukup besar dalam memanfaatkan situasi dan kondisi yang telah dipelajari dari pengalamannya bermigrasi, hubungannya dengan masyarakat di daerah tujuan, serta jalinan kekerabatan dan pertetanggaan dengan komunitas di daerah asalnya. Di komunitas lokal, meski dianggap sebagai 'penghisap', namun peran broker cukup diperlukan saat komunitas tersebut memerlukan dana cukup besar dan terpaksa harus menjual lahannya.

Dari uraian di atas dapat ditarik tiga kesimpulan mengenai penyebab kemunculan broker, mekanisme kerja broker, serta model broker yang terdapat di desa penelitian. Broker atau perantara muncul karena adanya celah atau *gap* pada kelompok-kelompok komunitas di suatu wilayah karena adanya kekosongan informasi. Broker menjadi simpul yang mampu menjembatani celah tersebut sehingga kelompok-kelompok tersebut saling berhubungan. Daerah tujuan migrasi menjadi wadah terhubungnya broker dengan berbagai kelompok-kelompok tersebut. Simpul perantara ini dapat terbentuk secara formal maupun nonformal. Simpul dapat terbentuk secara formal melalui pengurusan aspek legalitas dari lahan yang diperdagangkan. Sementara itu, simpul nonformal terbentuk dari pengurusan pembelian lahan dengan sistem pembayaran yang ditunda. Broker migrasi merupakan perantara tanah yang memiliki akses informasi tentang lahan yang dapat diakses oleh masyarakat. Meskipun mengambil keuntungan cukup besar dari penjualan lahan, broker juga memberikan beberapa kemudahan bagi para migran, seperti pembayaran mundur dan pengurusan lahan. Oleh karena itu, peran perantara menjadi suatu kebutuhan tersendiri bagi para migran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abustam, Muhammad Idrus. 1987. *Gerak penduduk, pembangunan dan perubahan sosial: Kasus tiga komunitas padi sawah di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Acciaoli, Gregory L. 1998. "Bugis entrepreneurialism and resource use: structure and practice." *Antropologi Indonesia* 57: 81-91.
- Borgatti, Stephen P. 2005. "Centrality and network flow." *Social Networks* 27 (1): 55-71.
- Burt, Ronald S. 2005. *Brokerage and closure: An introduction to social capital*. Oxford: University Press.
- Coleman, James S. 2008. *Dasar-dasar teori sosial*, Bandung: Nusa Media
- Faist, Thomas. 2014. *Brokerage in cross-border migration: From networks to social Mechanisms*. Bielefeld: COMCAD.
- Fazito, Dimitri, dan Weber Soares. 2008. "Undocumented migration, brokerage and solidarity: an exploratory network analysis of the Brazil-US migration system." In *Population American Association Congress*, pp. 17-20. New Orleans.
- Fazito, Dimitri. 2009. *The role of social network in human migration*. Ano XVII, Numero 32.
- Granovetter, Mark. 1985. "Economic action and social structure: the problem of embeddedness." *American Journal of Sociology* 91(3): 481-510.
- Li, Tania Murray. 2012. *The will to improve: Perencanaan, kekuasaan, dan pembangunan di Indonesia*, terj. Hery Santoso dan Pujo Semedi. Jakarta: Marjinkiri.
- Lineton, Jacqueline. 1975. "Pasompe' Ugi': Bugis migrants and wanderers." *Archipel* 10: 173-201.
- Massey, David S. 1990. "Social structure, household strategies, and the cumulative causation of migration." *Population Index* 56(1): 3-26
- McKeown, Adam. 2012. "How the box became black: Brokers and the creation of the free migrant." *Pacific Affairs* 85 (1): 21-45.
- Mitchell, J. Clyde. 1974. "Social networks." *Annual Review of Anthropology* 3 (1): 279-299.
- Palloni, Alberto, Douglas S. Massey, Miguel Ceballos, Kristin Espinosa, dan Michael Spittel. 2001. "Social capital and international migration: A test using information on family networks." *American Journal of Sociology* 106 (5): 1262-1298.

- Pelras, Christian. 2006. "Manusia Bugis." (terj.) dalam *Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris*, Jakarta: EFEO.
- Portes A. 1998. "Social capital: its origins and applications in modern sociology". *Annual Review of Sociology* 24:1-24
- Stovel, Katherine, Benjamin Golub, dan Eva M. Meyersson Milgrom. 2011. "Stabilizing brokerage." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 108 (4): 21326-21332.
- Stovel, Katherine, dan Lynette Shaw. 2012. "Brokerage." *Annual Review of Sociology* 38: 139-158.
- Wahyuni, Ekawati S. 2007. "The impact of migration on family structure and functioning in Java", dalam Loveless AS dan Holman TB. *The Family in the New Millennium: world voices supporting the 'natural' clan*, pp. 220-243. Westport: Praege Publisher



# KERENTANAN EKOLOGI DAN STRATEGI PENGHIDUPAN PERTANIAN MASYARAKAT DESA PERSAWAHAN TADAH HUJAN DI PANTURA INDRAMAYU

## *ECOLOGICAL VULNERABILITY AND STRATEGIES OF AGRICULTURAL LIVELIHOODS IN RAINFED PADDY VILLAGE, PANTURA INDRAMAYU*

Ali Yansyah Abdurrahim<sup>1</sup>( [aliyansyah.lipi@gmail.com](mailto:aliyansyah.lipi@gmail.com) )  
Arya Hadi Dharmawan<sup>2</sup> ([aryahadidharmawan@gmail.com](mailto:aryahadidharmawan@gmail.com) )  
Satyawan Sunito<sup>3</sup> ([Awansunito@gmail.com](mailto:Awansunito@gmail.com) )  
I Made Suidiana<sup>4</sup> ([suidiana@yahoo.com](mailto:suidiana@yahoo.com) )

### Abstrak

Desa persawahan tadah hujan di Pantura Indramayu mempunyai kerentanan ekologi yang sangat tinggi. Lokasinya yang berada di ujung jaringan irigasi dan saluran pembuang banjir membuat desa ini setiap tahun mengalami kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan. Belakangan, frekuensi dan intensitasnya semakin meningkat seiring terjadinya perubahan iklim. Kondisi ini menjadi tekanan yang mengguncang kehidupan masyarakat desa. Untuk mempertahankan dan melanjutkan penghidupannya, rumah tangga dari berbagai lapisan sosial melakukan berbagai aktivitas nafkah yang dikelompokkan ke dalam tiga strategi penghidupan, yaitu pertanian, diverifikasi penghidupan non-pertanian, dan migrasi. Strategi penghidupan dilakukan dengan mengkombinasikan aset penghidupan yang dimilikinya dan aset penghidupan milik rumah tangga lain yang berhasil diaksesnya melalui institusi sosial yang berlaku di masyarakat desa. Dengan berbagai institusi sosial tersebut, secara umum, setiap rumah tangga di Desa Karangmulya berusaha untuk menghasilkan *outcome* penghidupan berkelanjutan bagi rumah tangganya. Pendapatan, *well-being* (kesejahteraan), adaptasi penghidupan, ketahanan pangan, dan keberlanjutan sumber daya alam dihasilkan secara komprehensif dan saling melengkapi oleh setiap rumah tangga untuk menghadirkan penghidupan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Kerentanan, banjir, kekeringan, strategi penghidupan, penghidupan berkelanjutan.

### Abstract

*Rain fed paddy village in Indramayu North Coast has a very high ecological vulnerability. Location at the end of the irrigation and flood discharge channel makes this village every year drought in the dry season and floods in the rainy season. Later, the frequency and intensity increase as climate change. This condition is the pressure that shook the livelihoods of rural communities. To maintain and continue their livelihood, households from various social strata living doing various activities that are grouped into three livelihood strategies, namely (1) agriculture, (2) non-agricultural livelihood diversification, and (3) migration. Livelihood strategies carried out by combining its livelihood assets and livelihood assets belonging to other households who successfully accessible through existing social institutions in rural communities. With a wide range of social institutions that, in general, every household in the village Karangmulya trying to generate sustainable livelihood out comes for the household. Income, well-being (welfare), adaptation of livelihoods, food security, and sustainability of natural resources resulting in a comprehensive and complementary to each household to deliver sustainable livelihoods.*

**Keywords:** *vulnerability, floods, droughts, livelihood strategies, sustainable livelihoods.*

<sup>1</sup>Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

<sup>2</sup>Dosen Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

<sup>3</sup>Dosen Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

<sup>4</sup>Peneliti Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

## PENDAHULUAN

Pada bulan Februari 2014 lalu, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan dokumen kebijakan resmi bernama Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-API). Dalam dokumen tersebut, Kabupaten Indramayu disebutkan sebagai salah satu wilayah paling rentan terkena dampak perubahan iklim, terutama kekeringan, banjir, dan penurunan produksi padi (Bappenas 2014). Penilaian kerentanan dilakukan dengan memperhatikan analisa iklim dan karakteristik wilayah. Informasi ini tidaklah mengejutkan. Wilayah Indramayu yang berada di daerah hilir Sungai Cimanuk sejak dulu dikenal sebagai daerah yang rentan terhadap kekeringan dan banjir. Berbagai hasil penelitian dan berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah menunjukkan hal tersebut. Pramudia (2002), misalnya, menyampaikan bahwa wilayah Kabupaten Indramayu memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap kekeringan dan penurunan produksi, terutama pada tahun el-nino. Utomo (2013) menyampaikan wilayah di Indramayu didominasi oleh wilayah yang memiliki potensi rawan banjir tinggi (32,7 persen) dan rawan banjir sangat tinggi (62,4 persen). Kalsim (2007) yang merujuk berbagai data, di antaranya data Kementerian Pertanian, menyebutkan Kabupaten Indramayu sebagai daerah yang sangat rawan kekeringan (dan juga banjir).

Pemerintah sendiri dalam dokumen Indeks Bencana Rawan Bencana Indonesia yang dikeluarkan BNPB tahun 2011 telah menyatakan bahwa Kabupaten Indramayu merupakan wilayah yang mempunyai tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan dan banjir. Indeks ini dikembangkan atas konsep analisis riwayat kebencanaan yang terjadi dan memberikan kerugian signifikan pada suatu wilayah hingga tingkat kabupaten/kota. Sucahyono dan Aldrian (2012) yang merupakan ahli klimatologi BMKG melakukan analisis perubahan iklim di Indonesia, memperbaharui hasil analisis yang sebelumnya dilakukan BMKG 2004. Hasilnya, wilayah Kabupaten Indramayu (terutama wilayah pertanian di Kecamatan Kandanghaur, Juntinyuat, dan Losarang) dinilai sebagai wilayah yang sangat rentan terhadap kekeringan dan banjir.

Kekeringan dan banjir terus melanda berbagai wilayah Kabupaten Indramayu setiap tahunnya dan tidak jarang menyebabkan penurunan luas panen dan penurunan produksi, bahkan kegagalan panen. Data BPS Kabupaten Indramayu (2006, 2009, 2012, 2013a) menyebutkan bahwa pada tahun 2005, 2008, 2011, dan 2012 terjadi penurunan luas panen yang disertai penurunan produksi.

Data BPS tersebut menunjukkan bahwa penurunan luas panen terjadi di daerah-daerah persawahan yang memiliki kerentanan ekologi tinggi, seperti daerah persawahan tadah hujan dan hilir (ujung) saluran irigasi yang rentan terhadap kekeringan serta daerah persawahan yang berada di daerah pesisir dan hilir (ujung) saluran irigasi yang rentan terhadap banjir. Dari sekian daerah persawahan dengan kerentanan yang tinggi, ada daerah persawahan yang memiliki kerentanan paling tinggi karena lokasinya berada di daerah pesisir dan di ujung saluran irigasi sehingga daerah tersebut mengalami kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan.

Menurut kerangka penghidupan Chambers dan Conway (1991) Scoones (1998, 2009), Carney (1998), DFID (1999), Ellis (2000), masyarakat desa yang berada di daerah yang sangat rentan secara ekologi tersebut dituntut untuk bisa beradaptasi dengan berbagai tekanan dan guncangan serta memelihara kapabilitas dan aset penghidupan yang dimilikinya dengan melakukan berbagai strategi penghidupan yang mampu menjamin penghidupannya dan generasi berikutnya. Kerangka penghidupan tersebut sangat menekankan keberlanjutan penghidupan masyarakat (sistem sosial) dan keberlanjutan sumber daya alam (sistem ekologi) (lihat juga Dharmawan 2007).

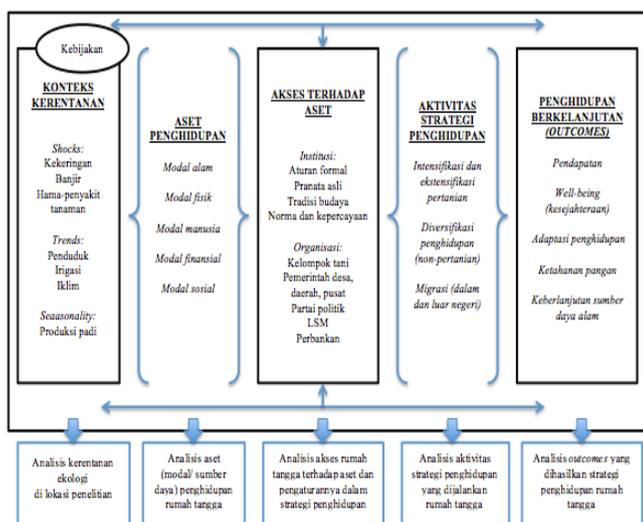
Strategi penghidupan dilakukan dengan cara mengkombinasikan berbagai aset (sumber daya) penghidupan yang tersedia. Scoones, Carney, dan Ellis mengelompokkan berbagai aset penghidupan ke dalam lima bentuk modal yaitu modal sosial (*social capital*), modal alami (*natural capital*), modal fisik (*physical capital*), dan modal insani (*human capital*). Karena kondisi masyarakat pedesaan sudah tidak homogen dan rumah tangga-rumah tangga (sebagai anggota masyarakat) cenderung terstratifikasi ke dalam berbagai lapisan sosial (Bernstein *et al.* 1992, Leach *et al.* 1997 dalam Ellis 2000), maka aset-aset penghidupan dimiliki oleh setiap rumah tangga dengan kuantitas dan kualitas yang berbeda. Rumah tangga yang tidak memiliki suatu aset, namun membutuhkannya, masih bisa mengakses aset penghidupan tersebut melalui institusi sosial. Institusi sosial dilahirkan, disepakati, dan dijalankan untuk mengatur interaksi sosial antar rumah tangga dalam mengelola dan memanfaatkan berbagai aset penghidupan. Semakin banyak aset penghidupan yang dimiliki dan dapat diakses, semakin banyak pula strategi penghidupan yang bisa dijalankan.

Scoones (1998, 2009) mengelompokkan strategi penghidupan yang dijalankan rumah tangga pedesaan ke dalam tiga kelompok, yaitu (1) pertanian, (2) diversifikasi penghidupan non-pertanian, dan (3)

migrasi. Masing-masing strategi penghidupan dijalankan melalui berbagai aktivitas penghidupan oleh anggota-anggota rumah tangga. Oleh karena itu, sebagian besar rumah tangga menjalankan lebih dari satu strategi penghidupan. Strategi penghidupan yang mampu dijalankan dan menghasilkan *outcome* yang dapat mewujudkan penghidupan berkelanjutan bagi rumah tangganya akan menjadi strategi penghidupan yang dipilih. Terwujudnya penghidupan berkelanjutan dapat dilihat dari (1) pendapatan, (2) *well-being* [kesejahteraan], (3) adaptasi penghidupan, (4) ketahanan pangan, dan (4) keberlanjutan sumber daya alam.

Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, tulisan ini bertujuan untuk (1) menganalisis kerentanan ekologi desa persawahan tadah hujan dan (2) menganalisis strategi penghidupan yang dilakukan rumah tangga dari berbagai lapisan untuk menjamin keberlanjutan penghidupan rumah tangganya di tengah-tengah kerentanan ekologi desanya. Tulisan ini merupakan pengembangan dari tesis penulis di Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana IPB dengan fokus analisis pada kerentanan ekologi dan strategi penghidupan. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka penelitian penghidupan Scoones (1998, 2009).

Tulisan diharapkan menjadi masukan bagi penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Daerah Perubahan Iklim (RAD-PI) Kabupaten Indramayu dan program pemerintah lainnya. Dengan analisis kerentanan tingkat desa dan strategi penghidupan yang dilakukan setiap rumah tangga di desa akan membantu pemerintah menentukan bentuk kegiatan aksi adaptasi prioritas dan program pendukung lainnya yang dianggap paling penting (KLH, 2013).



Gambar 1. Skema Kerangka Penelitian (diadaptasi dari Scoones 1998, 2009)

## KERENTANAN EKOLOGI DESA

Desa Karangmulya merupakan salah satu desa dari tiga belas desa yang ada di Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu (selanjutnya Desa Karangmulya akan ditulis “desa” atau “Karangmulya” secara bergantian). Luas wilayah desa mencapai 385 ha yang terdiri dari 347 ha lahan sawah, pemukiman (pekarangan dan bangunan) 32 ha, kuburan 1.5 ha, dan lainnya 4.5 ha. Proporsi lahan sawah yang mencapai 90 persen menjadikan desa ini disebut sebagai “desa persawahan” dalam tipologi profil desa (Kemendagri 2014). Tipologi ini berbeda dengan sebagian desa lainnya yang ada di Kecamatan Kandanghaur yang menyandang “desa nelayan”. Sebagai informasi, Kecamatan Kandanghaur dikategorikan sebagai “kecamatan pantai” oleh BPS Kabupaten Indramayu (2013b) karena sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan pantai. Jarak Karangmulya ke pantai sebetulnya tidak terlalu jauh, hanya beberapa kilometer (km) saja, terhalang oleh satu-dua desa tetangga. Desa yang berlokasi di koordinat 108.110977 LS/LU-6.411101 BT/BB berbatasan langsung dengan Desa Karanganyar di sebelah Utara, Desa Rancahan di sebelah Selatan, Desa Santing di sebelah Barat, dan Desa Wirakanan di sebelah Timur.

Hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan *focus group discussion* menunjukkan bahwa Desa Karangmulya merupakan desa persawahan tadah hujan yang memiliki kerentanan sangat tinggi (lihat juga Cahyadi, 2013). Hampir setiap tahun, kekeringan dan banjir selalu menghampiri desa ini. Kekurangan stok pangan menjadi permasalahan setiap tahun bagi sebagian besar rumah tangga (lihat Tabel 1).

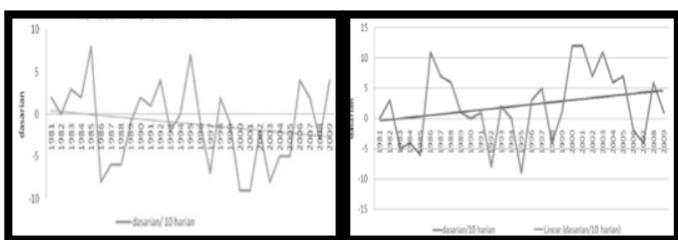
Tabel 1. Kondisi ketahanan pangan rumah tangga di Desa Karangmulya

Ketahanan pangan	Lapisan Sosial				
	Atas (n=8)	Mene-ngh (n=24)	Bawah Pemilik (n=16)	Bawah Penggarap (n=16)	Bawah Buruh (n=16)
Menyediakan stok pangan (padi/beras) di rumah untuk satu tahun (2013-2014)	100	77.8	54.5	55.6	14.3
Tingkat kecukupan stok pangan untuk satu tahun (2013-2014)	100	61.8	36.4	22.2	0
Pernah kekurangan stok pangan pada tahun 2000-2014	0	71.4	100	88.9	100

Sumber: Data primer survey rumah tangga 2014

Penelusuran sejarah menemukan bahwa kerentanan inimuncul akibat terganggunya fungsi jaringan irigasi sejak pendudukan Jepang 1942 dan pemberontakan DI/TII (1949-1962). Sebelumnya, terlebih sejak beroperasinya irigasi Rentang 1916, persawahan lahan di desa ini mendapatkan pasokan air irigasi sepanjang tahun. Program revolusi hijau ala Orde Baru yang memperbaiki jaringan irigasi Rentang, membangun jaringan irigasi Jatiluhur, membagi wilayah persawahan ke dalam empat golongan tetap tidak mampu menyediakan pasokan air irigasi yang cukup untuk musim tanam kedua, apalagi ketiga. Wilayah persawahan Desa Karangmulya hanya menjadi golongan tadah hujan dan banjir *inlaet*. Artinya, secara resmi lahan sawah di Desa Karangmulya hanya bisa ditanam padi satu kali di musim hujan ketika pasokan air irigasi berlebih. Selain itu, saluran irigasi sekunder yang melintasi persawahan desa dijadikan sebagai saluran pembuang banjir. Akibatnya, ketika musim kemarau, lahan sawah di Desa Karangmulya lebih dahulu mengalami kekeringan dan ketika musim hujan lebih dahulu mengalami kebanjiran.

Kerentanan terhadap banjir, kekeringan, dan serangan HPT semakin meningkat seiring dampak perubahan iklim global yang meningkatkan variabilitas dan anomali iklim. Sucahyono dan Aldrian (2012) yang melakukan analisis perubahan iklim di wilayah Indramayu dengan data curah hujan *series* dari tahun 1981-2009 mengemukakan bahwa Karangmulya dan sekitarnya menjadi semakin rentan terhadap kondisi iklim. Musim kemarau menjadi sangat kering, datangnya semakin awal, dan periodenya semakin panjang (Gambar 2).

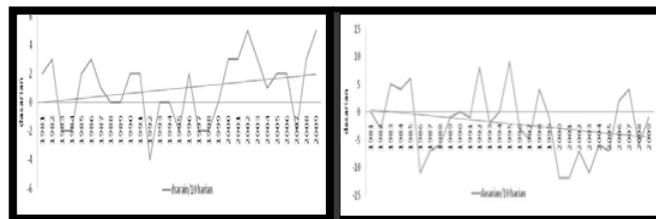


Gambar 2. Tren perubahan awal (kiri) dan panjang (kanan) musim kemarau di Indramayu 1981-2009

Sumber: Sucahyono dan Aldrian (2012)

Sebaliknya, pada musim hujan, kecenderungan awal musim hujan terjadi lebih lambat/mundur dan periodenya makin pendek (Gambar 3). Hasil survey LIPI, ICCTF, dan BMKG tahun 2011 (LIPI, 2011) menunjukkan bahwa 92,9 persen petani Karangmulya (dan juga Juntinyuat) merasakan pergeseran musim hujan dan kemarau; perubahan intensitas dan frekuensi hujan (85,7 persen); perubahan temperatur udara yang semakin panas (42,9 persen); dan

intensitas angin yang bertambah kencang (35,7 persen). Kondisi ini berdampak pada aktivitas pertanian padi sawah: mengacaukan waktu tanam (100 persen), mengganggu produksi (61,5 persen), meningkatkan biaya penggunaan obat-obatan (53,8 persen); dan mengganggu pengairan (46,2 persen). Gambar 3. Tren perubahan awal (kiri) dan panjang



(kanan) musim hujan di Indramayu 1981-2009

Sumber: Sucahyono dan Aldrian (2012)

## STRATEGI PENGHIDUPAN

Masyarakat Desa Karangmulya sebagai masyarakat yang telah terbentuk dan tinggal ratusan tahun di desa dituntut untuk mampu bertahan dan terus melanjutkan penghidupannya melalui berbagai strategi penghidupan. Strategi penghidupan dilakukan di tingkat rumah tangga sebagai bagian dari masyarakat yang berfungsi sebagai unit konsumsi dan unit produksi. Strategi dilakukan rumah tangga melalui berbagai aktivitas penghidupan (Ellis, 2000) yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga strategi penghidupan, yaitu pertanian (intensifikasi-ekstensifikasi), diversifikasi penghidupan non-pertanian, dan migrasi (Scoones 1998, 2009), dengan mengkombinasikan aset penghidupan yang dimiliki rumah tangga sendiri ataupun aset penghidupan rumah tangga lain yang dapat diakses melalui institusi sosial.

### Pelapisan Sosial, Aset Penghidupan, dan Akses terhadap Aset Penghidupan

Institusi sosial dilahirkan, disepakati, dan digunakan untuk mengatur interaksi sosial antar rumah tangga sebagai bagian dari masyarakat desa, termasuk untuk mengelola dan mengakses aset penghidupan yang dimiliki rumah tangga lain. Setiap rumah tangga memiliki aset penghidupan yang berbeda-beda. Rumah tangga lapisan atas merupakan rumah tangga yang memiliki aset penghidupan paling lengkap dan paling berkualitas. Aset penghidupan setiap rumah tangga dapat dilihat pada bagian Lampiran.

Pelapisan sosial rumah tangga ditentukan dari luasnya kepemilikan lahan sawah (lihat Kotak 1). Semakin luas lahan sawahnya, semakin tinggi lapisan sosial

rumah tangga tersebut. Atas dasar itu, ada enam lapisan sosial yang terdapat di Desa Karanmulya, yaitu (1) lapisan atas, (2) lapisan menengah, (3) lapisan bawah pemilik, (4) lapisan bawah penggarap, dan (5) lapisan bawah buruh. Lapisan-lapisan tersebut tidak eksklusif dan sangat longgar. Rumah tangga atas selain menggarap lahan sawah sendiri juga menyewa lahan sawah orang lain untuk digarap dan juga menyewakan sebagian lahan sawahnya untuk digarap rumah tangga lain. Rumah tangga lapisan menengah selain menggarap lahan sawahnya sendiri juga menjadi buruh tani. Rumah tangga bawah buruh juga bisa seketika naik kelas (lapisan) sosial apabila dia mampu menggarap atau bahkan membeli lahan sawah. Begitu pun, dengan rumah tangga menengah bisa dengan cepat turun kelas (lapisan) apabila lahan sawah yang dimilikinya dijual. Namun, hasil penelitian menunjukkan hanya ada 1.25 persen rumah tangga yang turun kelas, sisanya sebagian besar naik kelas dan sebagiannya lagi berhasil mempertahankan kelasnya.

Pembagian lapisan (struktur) dan peran (fungsi) sosial yang tidak eksklusif dan longgar ini sudah lama diterapkan sejak awal pendirian desa. Bagi masyarakat desa, pelapisan (struktur) sosial hanya digunakan untuk membagi peran (fungsi) sosial yang lebih jelas di masyarakat. Rumah tangga lapisan atas, misalnya, dituntut memikul peran sosial yang lebih banyak. Rumah tangga atas harus menyediakan cadangan beras yang dapat dipinjam rumah tangga lapisan di bawahnya. Rumah tangga atas harus menyumbang bahan makanan yang lebih banyak untuk tradisi budaya sedekah bumi. Rumah tangga atas harus menyumbang lebih banyak untuk pembangunan mesjid. Rumah tangga atas harus sering melakukan selamatan yang mengundang banyak rumah tangga untuk makan di rumahnya. Rumah tangga atas harus mau membukakan pintu setiap saat bagi rumah tangga lain yang membutuhkan.

Rumah tangga lapisan atas dan juga rumah tangga lapisan lainnya harus mau memberikan kesempatan kepada rumah tangga lapisan sosial lainnya untuk mengakses sebagian aset penghidupan yang dimilikinya melalui institusi sosial yang berlaku di masyarakat. Lahan sawah yang dimilikinya, misalnya, diperbolehkan diakses (digarap) oleh rumah tangga bawah penggarap melalui institusi sewa lahan "yarnen". Rumah tangga yang menggarap sawah pun (dari semua lapisan) harus memberikan kesempatan kepada rumah tangga lain untuk ikut memanen dan mendapatkan padi sesuai dengan bagiannya melalui institusi bawon. Dengan adanya akses terhadap aset lahan sawah ini, seluruh rumah tangga bisa melakukan strategi penghidupan pertanian.

Selain kedua contoh di atas, masih banyak institusi sosial yang mengatur interaksi antar rumah tangga dari semua lapisan untuk bisa saling mengakses aset penghidupan dan menjalankan strategi penghidupan. Ikatan kekerabatan, prinsip resiprositas, serta rasionalitas "utamakan selamat" dan membagi risiko membuat berbagai institusi sosial dilahirkan, disepakati, dan digunakan oleh masyarakat Desa Karangmulya. Institusi sosial tersebut dijalankan oleh organisasi sosial informal (seperti ulu-ulu, raksa bumi, patron-klien) dan organisasi formal (kelompok tani, pemerintahan desa, mantri pengairan), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Tabel 1. Institusi dan organisasi sosial dalam sistem penghidupan masyarakat

Institusi	Keterangan	Organisasi formal	Organisasi informal
<b>1. Hubungan petani pemilik dan penggarap dengan "sang pencipta" sebagai bentuk berdo'a dan bersyukur; dan juga dengan buruh tani dan tetangga sebagai bentuk resiprositas</b>			
Sedekah bumi	Berdo'a bersama dan selamatan di tingkat desa sebelum memulai musim tanam pertama.	Kelompok tani, pemerintah desa	Ulu-ulu, raksa bumi
Labu macul	Berdo'a dan bersedekah di tingkat rumah tangga sebelum mengolah lahan sawah.		Patron-klien, ketetangaan
Labu tandur	Berdo'a dan bersedekah di tingkat rumah tangga sebelum melakukan tandur		Patron-klien, ketetangaan
Mapag tamba	Berdo'a bersama di tingkat desa untuk menolak bala dan melindungi tanaman dari serangan HPT	Kelompok tani, pemerintah desa	Ulu-ulu, raksa bumi
Mbuburi	Berdo'a di tingkat rumah tangga untuk menolak bala dan melindungi tanaman dari serangan HPT		Patron-klien, ketetangaan
Mapag sri	Berdo'a bersama dan selamatan di tingkat desa menjelang panen raya musim pertama.	Kelompok tani, pemerintah desa	Ulu-ulu, raksa bumi
Labu panen	Berdo'a dan bersedekah di tingkat rumah tangga menjelang panen.		Patron-klien, ketetangaan

<b>2. Hubungan antar lapisan sosial dalam tahapan kegiatan budidaya padi</b>			
Geleduk cengkok	Pengolahan lahan segera di awal musim hujan, untuk musim tanam pertama.	Kelompok tani, penyuluh	Ulu-ulu, raksa bumi
Culik tanam	Mempercepat tanam untuk musim kedua dengan membuat persemaian sebelum panen musim pertama.	Kelompok tani, penyuluh	Ulu-ulu, raksa bumi
Irigasi	Pemeliharaan jaringan irigasi, penyediaan pasokan air, dan pengendalian banjir	Kelompok tani, pemerintah desa, mantri air	Ulu-ulu, raksa bumi
Tandur	Penanaman bibit padi dari persemaian ke lahan sawah		Kelompok kerja tandur
Bawon	Sistem pemanenan padi yang memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk ikut memanen dan mendapatkan hasil 1/6 dari total hasil panen.		Patron-klien, kekerabatan, ketetangaan pasangan bawon
Ceblokan	Tandur + penyiangan + pemanenan padi dengan sistem bawon.		Patron-klien, kekerabatan, ketetangaan pasangan bawon
Remi	Pengambilan padi dari sisa-sisa perontokan padi		Kekerabatan, ketetangaan
Senggang	Pengambilan padi yang tumbuh setelah panen.		Kekerabatan, ketetangaan
Sewa sawah "yarnen"	Penyewaan lahan sawah dengan sistem pembayaran setelah panen.	Kelompok tani	Patron-klien
Gadai sawah	Pengalihan hak pengelolaan lahan sawah sementara dengan cara memberikan uang gadai.	Pemerintah an desa	
<b>3. Institusi yang mengatur keuangan dan pinjam meminjam</b>			
Pranata pinjam modal usaha tani	Aturan pinjam-meminjam modal usaha tani untuk budidaya padi dan sayuran	Kelompok tani	Patron-klien
Pranata pinjam modal kerja ke Korea	Aturan pinjam-meminjam modal kerja untuk persiapan ke Korea	LPK Al-Amin	Patron-klien, kekerabatan

Arisan	Semacam tabungan dalam satu kelompok tertentu yang diperoleh anggotanya secara giliran.		Kelompok arisan.
--------	---	--	------------------

### Aktivitas Penghidupan

Berbagai aset yang telah dimiliki dan juga dapat diakses oleh masing-masing rumah tangga tersebut kemudian dikombinasikan ke dalam tiga strategi penghidupan, yaitu (1) pertanian, (2) diversifikasi penghidupan non-pertanian, dan (3) migrasi. Strategi penghidupan dijalankan melalui berbagai aktivitas yang dilakukan sesuai struktur dan fungsi yang dimiliki sebuah rumah tangga. Rumah tangga atas dan menengah, misalnya, menjalankan usaha tani tanaman padi dan rumah bawah buruh bekerja sebagai buruh tani. Selain menjalankan usaha tani sendiri, rumah tangga atas dan menengah juga menyewakan sebagian lahan yang dimilikinya kepada rumah tangga lain sehingga rumah tangga tersebut dapat menjalankan usaha tani tanaman padi. Pemaparan mengenai aktivitas penghidupan yang dilakukan setiap rumah tangga dapat disampaikan pada uraian di bawah.

### Strategi Pertanian

Sebagai masyarakat desa persawahan, seluruh rumah tangga di Desa Karangmulya memiliki ketergantungan yang sangat tinggi dengan lahan sawah. Keterbatasan keadaan dan kerentanan ekologi yang tinggi ini tidak membuat masyarakat desa menyerah. Mereka melakukan strategi intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian melalui berbagai aktivitas penghidupan (Tabel 2).

Sub-sektor tanaman padi masih menjadi aktivitas penghidupan terbanyak yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga. Usaha tani atau budidaya padi sawah dilakukan oleh semua rumah tangga lapisan atas, bawah pemilik, dan bawah penggarap. Selain menggarap lahannya sendiri, sebagian kecil rumah tangga atas dan menengah juga menyewakan lahannya rumah tangga lain melalui institusi sosial sewa "yarnen". Hal ini memberikan kesempatan kepada rumah tangga yang tidak mempunyai lahan sawah, seperti rumah tangga bawah penggarap untuk melakukan usaha tani padi sawah. Sebagai informasi, sewa lahan sawah di Desa Karangmulya tidak dibayar dengan uang, namun dibayar dengan padi. Setiap tahunnya, rumah tangga yang menyewa lahan sawah harus memberikan padi sebanyak 2 ton (2,000 kg) per bahu lahan yang disewanya.

Tabel 2. Strategi Pertanian Yang Dijalankan Rumah Tangga

Aktivitas Penghidupan	Lapisan Sosial					DESA (n=60)
	Atas (n=8)	Menengah (n=24)	Bawah Pemilik (n=16)	Bawah Penggarap (n=16)	Bawah Buruh (n=16)	
<b>TANAMAN PADI</b>						
Usaha tani	100	96	100	100	0	79
Buruh panen (bawon)	0	21	81	94	94	60
Buruh tander	0	0	19	13	25	11
Buruh tani non tander	0	17	25	25	63	28
Remi	0	0	13	6	25	9
Senggang	0	29	44	25	25	28
Persewaan lahan sawah	13	4	0	0	0	3
<b>TANAMAN HORTIKULTURA</b>						
Tanaman Sayuran	13	46	25	25	0	25
Tanaman Timun Suri	13	4	25	31	0	14
Tanaman Semangka	0	8	0	6	0	4
<b>PETERNAKAN</b>						
Ternak Ayam	13	4	6	0	0	4
Ternak Kambing	0	4	0	0	0	1
<b>JASA PERTANIAN</b>						
Persewaan traktor	0	4	0	0	0	1
Buruh operator traktor	0	0	0	13	25	8
Buruh operator gerabagan	0	0	6	13	6	5
<b>PEMUNGUTAN HASIL ALAM</b>						
Pengumpul bunga kamboja	0	0	0	0	6	1
Pembuatan garam	13	0	0	0	0	1

Sumber: Data primer survey rumah tangga 2014

Selain dengan sewa, ekstensifikasi lahan sawah juga dilakukan dengan cara menggadai sawah milik orang lain. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, karena uang yang harus disediakan lumayan banyak, yaitu Rp 60 juta per bahu untuk dua tahun gadai, institusi ini lebih banyak dimanfaatkan oleh rumah tangga atas untuk menambah luas lahan garapannya atau rumah tangga bawah dan menengah yang mempunyai anggota rumah tangga migran ke Korea. Dengan remitans sekitar Rp 10-12 juta per bulan, mereka mampu mengumpulkan uang untuk menggadai sawah orang lain, sekaligus melakukan mobilisasi sosial vertikal ke atas (naik kelas/lapisan sosial). Pembahasan mengenai migrasi dan manfaatnya bagi penghidupan akan dibahas pada sub-bab selanjutnya.

Meskipun dalam hitungan teknis lahan-lahan sawah di desa hanya bisa ditanami padi satu kali saja dalam setahun, namun rasionalitas petani yang ingin mempertahankan/menyelamatkan penghidupan rumah tangganya (Scotts, 1976; 1985, 1990) dan juga sekaligus ingin meningkatkan penghidupan ke tingkat

yang lebih baik (Popkin, 1979), membuat mereka memaksimalkan manfaat lahan sawah yang dimiliki dan dikuasainya. Bagi rumah tangga penyewa, sistem sewa yang mewajibkan petani penyewa membayar sewa dengan jumlah yang tetap apapun kondisinya (meskipun kalau gagal panen ada penundaan pembayaran) menuntut petani penyewa untuk bisa menghasilkan sebanyak-banyaknya dari sawahnya yang disewa satu tahun.

#### *Aksi adaptasi*

Berbagai upaya adaptasi pun dilakukan oleh para petani, baik di tingkat masyarakat (komunitas) maupun di tingkat rumah tangga. Di tingkat masyarakat, misalnya, pembuatan embung Kali Bojong dan penguatan lembaga irigasi. Pada tahun 2003 masyarakat desa bersama kelompok tani dan pemerintahan desa menjadikan Kali Bojong sepanjang 1.3 km, sungai alam yang hanya terairi air ketika musim hujan dan ada pasokan air dari saluran irigasi tersier, menjadi embung dengan pendanaan secara swadaya. Selain dari kas desa, pungutan setiap rumah

tangga pemilik dan penggarap lahan sawah, serta bantuan para donatur, pendanaan juga diperoleh dari para buruh migran yang sedang mencari penghidupan di luar negeri. Bantuan dan kerja gotong royong Embung Kali Bojong menjadi semakin besar dan kuat fungsinya setelah pada tahun 2005-2006 dibangun pemerintah menjadi bendungan kecil dengan panjang 2 km, kedalaman 6 meter, dan lebar 50 meter. Embung tersebut menjadi penampungan air di musim kemarau dan pengendali banjir di musim hujan. Sejak saat itu, lahan-lahan sawah yang ada di dekat embung Kali Bojong dapat ditanami padi dua kali dalam setahun. Namun, banjir yang cukup besar di awal 2011 telah menjebol pintu air dan tembok bendungan. Akibatnya, fungsi embung Kali Bojong menjadi kurang optimal, kapasitas penampungan air pun menjadi sangat sedikit. Sejak kejadian itu, hanya lahan-lahan sawah terdekatlah yang bisa memanfaatkan air yang dibendung di embung tersebut.

Adanya embung dan lahirnya kebijakan otonomi daerah yang mengalihkan kewenangan pengairan dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten dianggap sebagai peluang untuk mengembalikan pasokan air

tersebut menyulap kali dengan kedalaman 1 m dan lebar 2 m menjadi embung dengan tinggi tanggul mencapai 6 m, kedalaman 4 m, dan lebar 24 m.

irigasi, terutama dari jaringan irigasi Rentang seperti dulu. Masyarakat desa kemudian memperkuat fungsi institusi irigasi (yang sebetulnya sejak dulu sudah ada). Organisasi kelompok tani, raksa bumi, dan ulu-ulu yang tadinya hanya bekerja di tingkat desa dengan menunggu datangnya air ke saluran-saluran irigasi sekunder yang melintasi persawahan desa ditugaskan pemerintahan desa dan masyarakat untuk menjemput air langsung dari *saluran induk barat-jaringan irigasi Rentang*. Sejak saat itulah, ketiga organisasi sosial tersebut menjalankan institusi irigasi di desa. Ketika masyarakat membutuhkan air, mereka dituntut untuk mampu mendatangkannya dan ketika air berlebih seperti di musim hujan, mereka harus mampu mengendalikannya agar tidak banjir. Untuk kepentingan ini, desa menganggarkan anggaran khusus dan setiap rumah tangga pemilik atau penggarap juga membayar iuran rutin musiman dan iuran insidental setiap kali mendatangkan air. Di tingkat rumah tangga, aksi adaptasi pun dilakukan dengan berbagai macam tindakan (lihat Tabel 3)

Tabel 3. Aksi Adaptasi yang Dilakukan dalam Strategi Pertanian

Aksi adaptasi	Lapisan Sosial				
	Atas (n=8)	Menengah (n=24)	Bawah Pemilik (n=16)	Bawah Penggarap (n=16)	Bawah Buruh (n=16)
<b>Aksi adaptasi yang berhasil</b>					-
- Menyesuaikan/mempercepat awal musim tanam rendeng	100	81.3	90.9	100	
- Menyesuaikan varietas tanaman padi	100	81.3	90.9	100	-
- Menganekaragamkan jenis tanaman dalam satu musim tanam	25	37.5	27.3	22.2	-
- Mempercepat persemaian musim tanam gadu	50	37.5	27.3	66.7	-
- Meningkatkan pengendalian HPT	100	68.8	81.8	77.8	-
- Memompa air dari saluran irigasi	50	37.5	9.1	33.3	-
- Membuat sumur pantek	25	6.3	0	0	-
- Memanfaatkan tanda alam	75	43.8	27.3	44.4	-
- Memanfaatkan informasi cuaca/iklim	75	50	36.4	55.6	-
- Memanfaatkan informasi KATAM	25	0	9.1	0	-
- Memanfaatkan informasi ketua kelompok tani	100	62.5	54.5	88.9	-

Sumber: Data primer survey rumah tangga 2014

Pada Tabel 3 terlihat bahwa aksi menyesuaikan/mempercepat awal musim tanam rendeng atau disebut dengan *gleduk cengkuk* dan menyesuaikan varietas tanaman padi merupakan aksi yang paling banyak dilakukan oleh rumah tangga di semua lapisan.

*Gleduk cengkuk* secara harfiah diartikan “ketika ada gledek/petir, petani langsung mengolah sawah”. Aksi ini dilakukan di awal musim tanam *rendeng* (musim tanam pertama) agar petani bisa segera tander sehingga bisa menghindari dampak negatif dari banjir

yang rutin terjadi. Umur tanaman yang tepat menyebabkan tanaman tersebut akan tetap hidup dan *rendeng*, semakin cepat pula tanaman tersebut dipanen dan lahan sawahnya bisa segera diolah untuk musim tanam *gadu*. Hampir seluruh rumah tangga melakukan aksi ini.

Keputusan cepat dan tepat untuk mengawali musim tanam *rendeng* memberi kesempatan kepada rumah tangga petani untuk bisa menanam dua kali, yaitu musim tanam *rendeng*. Untuk menghindari kekeringan di musim *rendeng*, rumah tangga petani harus melakukan aksi mempercepat persemaian musim tanam *gadu* (*culik tanam*). Aksi ini dilakukan dengan membuat persemaian ketika padi (di musim *rendeng*) sudah mulai menguning. Aksi *culik tanam* ini sangat penuh risiko. Seringkali para petani salah memperhitungkan cuaca/iklim dan pasokan irigasi ke depan sehingga pada akhirnya padi yang dihasilkan produktivitasnya sangat rendah atau bahkan gagal panen, seperti musim *gadu* 2014 ini. Aksi *culik tanam* juga harus melibatkan petani-petani lainnya, terutama yang berada pada hamparan yang sama. Tidak terjadinya aksi *culik tanam* secara serentak menyebabkan tanam tidak serentak akibatnya lahan-lahan sawah yang tumbuh tidak serentak akan diserang oleh HPT, seperti tikus. Selain itu, tidak semua lahan sawah di Desa Karangmulya bisa ditanami padi pada musim *gadu*, sekalipun dengan aksi *culik tanam*. Terkecuali curah hujan tinggi sampai pertengahan tahun seperti tahun 2013, hanya lahan-lahan sawah yang dekat dari embung Kali Bojong yang dipastikan bisa ditanami di musim *rendeng*. Oleh karena itu, aksi *culik tanam* ini hanya berhasil dilakukan (dalam artian menghasilkan produksi yang normal) oleh sebagian rumah tangga petani saja.

Kondisi ini juga berlaku bagi aksi memompa air dari saluran irigasi. Hanya lahan-lahan sawah yang dekat dengan embung Kali Bojong dan saluran irigasi sekunder yang bisa melakukan aksi ini. Selain itu, perlunya pompa air, pipa atau selang, dan bahan bakar juga menjadi pertimbangan tidak semua petani mau dan mampu melakukannya. Hanya setengah rumah tangga lapisan atas, sepertiga lapisan menengah dan bawah penggarap, dan kurang dari sepersepuluh lapisan bawah pemilik yang melakukannya.

Berbeda dengan aksi *culik tanam* dan memompa air dari saluran irigasi, aksi penyesuaian varietas tanaman padi merupakan aksi yang banyak dilakukan oleh hampir semua rumah tangga petani dari semua lapisan. Para petani menyesuaikan varietas tanaman padi sesuai dengan kondisi lahan, pasokan irigasi, curah hujan, musim, dan prediksi serangan HPT. Ada

tidak rusak ketika terkena banjir. Selain itu, semakin cepat mengawali masa tanam beberapa varietas padi yang dominan dan dianggap unggul oleh para petani, seperti IR, Cihayang, Mekongga, Kebo, dan Rambo. Benih-benih padi tersebut diperoleh dengan membeli dari kios-kios pertanian dan dari sesama petani yang mampu membenihkan padi sendiri.

Kelembaban yang tinggi, tergenangnya air pada musim hujan, anomali cuaca, dan kesalahan waktu pelaksanaan *culik tanam* di sisi lain juga ternyata menyebabkan peningkatan populasi hama-penyakit tanaman (HPT). Wereng barang coklat, tikus sawah, penggerek batang padi, blast, dan kresesk merupakan beberapa jenis HPT yang paling mengancam budi daya tanaman padi di Desa Karangmulya. Tabel 4.2 pada Bab IV menunjukkan setidaknya ada tujuh kali ledakan serangan HPT selama kurun waktu 2002-2014 yang menyebabkan penurunan produksi secara signifikan. Bahkan, ledakan serangan HPT di tiga tahun terakhir (2012-2013) berturut-turut menyebabkan kegagalan panen. Kondisi ini menuntut petani melakukan aksi peningkatan pengendalian HPT. Namun, nampaknya hanya rumah tangga atas saja yang semuanya berhasil menjalankannya.

Untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi kerugian akibat gagal panen padi, sebagian rumah tangga dari semua lapisan melakukan aksi penganekaragaman/penambahan jenis tanaman dalam satu musim melalui tumpang-sari. Tidak semua lahan sawah yang dimiliki atau disewa ditanami padi. Ada *pare* (*paria*), terong, dan tanaman sayuran lainnya yang juga ditanam di lahan sawah mereka di musim yang sama dengan musim tanam padi. Tanaman sayuran ini menjadi tanaman pelengkap dan sumber penghasilan tambahan bagi rumah tangga tersebut.

Beberapa rumah tangga yang memiliki sumur pantek dengan kualitas air yang layak (tidak terlalu asin) menjadikan usaha tanaman sayurannya sebagai aktivitas penghidupan yang kontinyu dilakukan sepanjang tahun, seperti yang dilakukan beberapa rumah tangga di Blok Kemped. Aksi penggunaan sumur pantek juga dilakukan oleh beberapa rumah tangga petani yang menanam tanaman semangka dan timun suri. Biasanya mereka hanya menanam dua jenis tanaman tersebut di sawah yang tidak ditanami padi di musim *gadu*.

Aksi lain yang tidak kalah penting adalah memanfaatkan tanda alam, memanfaatkan informasi iklim dari BMKG, dan memanfaatkan informasi kalender tanam dari Kementan. Tidak seperti petani daerah persawahan irigasi teknis yang tidak perlu

memperhatikan waktu atau peralihan musim, para petani di Desa Karangmulya harus senantiasa bisa memperhitungkan dan mengambil keputusan cepat dengan melakukan ketiga aksi tersebut. Pemanfaatan tanda-tanda alam sebetulnya merupakan pengetahuan lokal yang secara turun temurun digunakan oleh para petani di Desa Karangmulya.

Setidaknya ada tiga kondisi alam yang biasa dijadikan indikator oleh para petani desa untuk menentukan kondisi cuaca atau iklim, yaitu (1) arah hembusan angin, (2) suhu air sungai/irigasi, (3) pergerakan/perilaku burung dan tanaman. Penjelasan ketiganya dapat dilihat pada Kotak 2.

Pengetahuan lokal ini dipadukan dengan informasi cuaca/iklim dan kalender tanam sebagai referensi dalam mengambil keputusan. Namun, keterbatasan kemampuan dan akses rumah tangga ditambah dampak perubahan iklim global yang membuat iklim dan cuaca lokal menjadi tidak menentu menyebabkan ketiga aksi ini hanya berhasil dilakukan oleh sebagian rumah tangga, terutama rumah tangga atas. Bahkan, aksi pemanfaatan informasi kalender tanam dari Kementan hanya dilakukan oleh sedikit rumah tangga atas dan tidak sama sekali oleh lapisan menengah dan bawah penggarap.

### **Kotak 2. Kondisi alam yang menjadi indikator cuaca atau iklim**

1. Arah hembusan angin
  - a. Angin dari arah barat pertanda masuk musim hujan
  - b. Angin dari arah timur pertanda puncak musim hujan dan berpotensi banjir
  - c. Angin dari arah utara atau angin laut pertanda mau masuk peralihan musim dari musim hujan ke kemarau
  - d. Angin dari arah selatan atau angin kumbang pertanda masuk musim kemarau
    - i. Kumbang daya pertanda masih ada hujan turun.
    - ii. Kumbang timur pertanda puncak musim kemarau, tidak ada hujan.
2. Suhu air kali/irigasi
  - a. Air kali dipegang terasa hangat pertanda masih akan datang hujan.
  - b. Air kali dipegang terasa dingin pertanda hujan tidak akan datang.
3. Pergerakan/perilaku burung dan tanaman
  - a. Burung cablak, branjangan, dan apung datang ke desa pertanda datangnya musim kemarau.
  - b. Burung alap-alap terbang menuju utara (laut) pertanda datangnya musim kemarau.
  - c. Kepiting sawah (yuyu/keuyeup) membikin rumah pertanda datangnya musim kemarau.
  - d. Buah randu rontok pertanda musim kemarau.

### *Bawon, Remi, dan Senggang*

Bagi rumah tangga yang tidak mempunyai lahan milik ataupun garapan untuk diusahakan, aktivitas penghidupan yang dilakukan dalam sub-sektor ini adalah dengan menjadi buruh panen (*bawon*), buruh tander, buruh tani non-tander dan non-panen serta melalui aktivitas *remi* dan *senggang*. *Bawon* adalah sistem panen yang memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk bisa ikut memanen padi di sawah orang lain dan mendapatkan bagian hasil panen yang disebut "*bawon*". Sistem *bawon* merupakan insitusi sosial yang menunjukkan kepedulian dan prinsip resiprositas petani pemilik/penggarap terhadap kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan Collier et al. (1974), sistem *bawon* menunjukkan adanya pola hubungan patron-klien antara pemilik sawah dengan buruh tani yang tidak punya lahan. Sementara itu, *remi* merupakan aktivitas yang dilakukan dengan

mengambil sisa-sisa padi setelah dirontokan dan *senggang* merupakan aktivitas yang dilakukan dengan mengambil padi yang tumbuh dari malai setelah di panen.

Hasil survey menunjukkan bahwa hampir semua panen terakhir di Desa Karangmulya dilakukan dengan sistem *bawon* (95 persen *bawon*, 3 persen kombinasi *bawon* dan tebasan, dan 2 persen dilakukan sendiri). Kondisi ini memberikan kesempatan kepada banyak rumah tangga untuk ikut memanen dan mendapatkan *bawon*. Selain diikuti oleh hampir semua rumah tangga lapisan bawah, *bawon* juga diikuti oleh sebagian rumah tangga lapisan menengah yang memiliki lahan yang cukup luas.

Berbeda dengan *bawon*, *remi* hanya dilakukan oleh sebagian kecil rumah tangga bawah saja. Berkurangnya rumah tangga yang melakukan *remi* sejalan dengan berkurangnya penggunaan gebotan

sebagai alat perontok padi. Saat ini, penggunaan gebotan banyak digantikan oleh gerabagan atau trasher. Mereka bisa mendapatkan hasil remi sebanyak 100-200 kg padi per bahu dari pemanenan yang dirontokkan dengan gebotan. Namun, mereka hanya bisa mendapatkan hasil remi sebanyak 10-20 kg padi per bahu dari pemanenan yang menggunakan trasher. Selain itu, remi memang dikhususkan untuk memberi kesempatan kepada para orang tua yang tidak mampu ikut bawon atau para janda yang tidak punya pasangan bawon sehingga jumlah rumah tangga yang ikut remi pun sedikit.

Untuk senggang, karena memberikan hasil yang cukup lumayan, aktivitas ini selain dilakukan oleh rumah tangga lapisan bawah juga dilakukan oleh sebagian kecil rumah tangga lapisan menengah. Berbeda dengan remi yang hanya boleh dilakukan oleh buruh perempuan tua atau janda, senggang boleh dilakukan siapa saja. Meskipun beberapa rumah tangga pemilik/penggarap yang diwawancarai menyebutkan bahwa biji padi yang tumbuh setelah panen bukan lagi hak dari pemilik/penggarap, namun fakta di lapangan memperlihatkan sebagian pemilik lahan, termasuk rumah tangga lapisan menengah, masih ada yang ikut aktivitas senggang. Hasilnya yang bisa mencapai 500 kg per bahu membuat beberapa rumah tangga menengah lebih memilih menyenggang sendiri daripada diberikan kepada rumah tangga lain.

Bagi masyarakat Desa Karangmulya, berbagai aktivitas penghidupan yang diatur oleh institusi sosial, seperti sistem sewa “yarnen”, bawon, remi, dan senggang, menjadi jaminan sosial bagi penghidupan seluruh masyarakat desa. Semua aktivitas yang berkaitan dengan lahan sawah menjadi nafas kehidupan masyarakat desa. Rumah tangga yang mempunyai lahan memberikan kesempatan kepada rumah tangga lain untuk mendapatkan manfaat dari lahan sawahnya, baik melalui sewa lahan, bekerja di sawahnya (tandur, dll), bawon, senggang, dan remi. Beberapa rumah tangga yang sudah punya lahan sawahpun, seperti rumah tangga lapisan menengah,

tetap bekerja keras melakukan aktivitas bawon, senggang, dan juga buruh tani non tandur.

### Strategi Diversifikasi Penghidupan Non-Pertanian

Strategi penghidupan yang kedua, diversifikasi penghidupan pertanian, dilakukan dengan dorongan untuk mempertahankan dan meningkatkan penghidupan rumah tangganya. Dengan memanfaatkan aset penghidupan dan surplus produksi (keuntungan) yang dihasilkan berbagai aktivitas pertanian, sebagian rumah tangga dari semua lapisan sosial melakukan berbagai aktivitas penghidupan non-pertanian (lihat Tabel 4). Dengan aset penghidupan yang lebih besar dan surplus produksi yang diperolehnya, rumah tangga atas menjadi rumah tangga yang paling banyak melakukan aktivitas diversifikasi penghidupan, seperti membuka usaha penggilingan padi, perdagangan beras, toko, pertukangan, dan lembaga pelatihan bahasa Korea (LPK).

Meskipun seperti itu, apabila dilihat dengan teori struktural fungsional, aktivitas penghidupan yang hanya bisa dilakukan oleh rumah tangga atas ternyata memberi manfaat (fungsi) bagi rumah tangga lapisan di bawahnya. Usaha penggilingan padi, misalnya, mampu menyerap tenaga kerja (buruh) dari semua lapisan rumah tangga di bawahnya.

Begitu pun dengan lembaga pelatihan bahasa Korea, meskipun hanya mampu dijalankan oleh rumah tangga lapisan atas, namun usahanya (organisasi formal) ini ditambah dengan institusi sosial yang berlaku di masyarakat desa mampu meningkatkan kapasitas modal finansial rumah tangga yang berniat melakukan aktivitas penghidupan migrasi di luar negeri. Selain itu, usaha LPK ini juga membantu persiapan lainnya, penempatan, dan pembimbingan selama di Korea. Apa yang dilakukan LPK ini telah membuat cukup banyak anggota rumah tangga dari semua lapisan dapat bekerja di Korea.

Tabel 4. Strategi Diversifikasi Penghidupan Non-Pertanian yang Dijalankan Rumah Tangga

Aktivitas Penghidupan	Lapisan Sosial					DESA (n=60)
	Atas (n=8)	Menengah (n=24)	Bawah Pemilik (n=16)	Bawah Penggarap (n=16)	Bawah Buruh (n=16)	
<b>PERDAGANGAN DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM</b>						
Perdagangan beras	13	0	0	0	0	1
Warung	25	17	0	6	13	11
Toko	13	4	0	0	0	3
Usaha makanan	0	4	0	6	6	4

Jual pakaian keliling	13	0	0	0	0	1
Jual hasil tani keliling	0	0	6	0	0	1
Jual mainan keliling	0	0	0	6	0	1
<b>INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN</b>						
Penggilingan padi	13	0	0	0	0	1
Buruh penggilingan	0	4	6	6	6	5
<b>KONSTRUKSI</b>						
Pertukangan	13	0	0	13	0	4
Buruh bangunan	0	4	0	0	6	3
<b>TRANSPORTASI</b>						
Sewa mobil	0	8	0	0	0	3
Ojek	0	0	0	0	6	1
<b>LAINNYA</b>						
PNS	0	4	0	0	0	1
Pegawai Sekolah Swasta	0	0	6	0	0	1
LPK Al-Amin	25	0	0	0	0	3

Sumber: Data primer survey rumah tangga 2014

### Strategi Migrasi

Strategi penghidupan yang ketiga, yaitu migrasi, dilakukan di luar Kabupaten Indramayu. Strategi ini dilakukan oleh rumah tangga dari semua lapisan sosial. Namun, meskipun sama-sama melakukan migrasi, terdapat alasan yang berbeda yang melatarbelakangi migrasi yang dilakukan. Rumah tangga

lapisan atas cenderung melakukan migrasi karena tertarik ke luar desa (*pulled out*) dengan dibiayai oleh keuntungan yang diperoleh dari surplus (keuntungan) produksi pertanian ke desa. Sementara itu, rumah tangga bawah yang tidak memiliki lahan melakukan migrasi karena didorong ke luar (*pushed-out*) dalam rangka membantu ekonomi rumah tangga.

Tabel 5. Strategi migrasi yang dilakukan rumah tangga

Aktivitas Penghidupan	Lapisan Sosial					DESA (n=60)
	Atas (n=8)	Menengah (n=24)	Bawah Pemilik (n=16)	Bawah Penggarap (n=16)	Bawah Buruh (n=16)	
<b>MIGRASI</b>						
Migrasi luar negeri	25	13	6	13	38	18
Migrasi dalam negeri	0	4	19	13	6	9

Sumber: Data primer survey rumah tangga 2014

### Migrasi luar negeri (*internasional*)

Aktivitas penghidupan migrasi luar negeri dilakukan beberapa rumah tangga di semua lapisan (lihat Tabel 5). Rumah tangga lapisan bawah buruh dan lapisan atas menyumbang persentase terbesar dengan angka masing-masing 38 persen dan 25 persen. Artinya, lebih dari sepertiga rumah tangga bawah buruh melakukan aktivitas migrasi ke luar negeri dan seperempat rumah tangga atas juga melakukan hal yang sama.

Meskipun sama-sama migrasi ke luar negeri, perbedaan mendasar terletak dari negara tempat migrasi, jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan pendapatan. Namun, untuk pendapatan akan dibahas di bagian selanjutnya. Semua rumah tangga atas

menjalani aktivitas migrasinya di Korea, ada yang bekerja sebagai tenaga kerja kontrak di pabrik dan ada yang menjalankan usaha. Sementara itu, rumah tangga lapisan bawah cukup beragam, ada yang di Korea, Taiwan, Hongkong, Arab Saudi, Oman, dan Abu Dhabi-Uni Emirat Arab. Semuanya menjalankan aktivitas penghidupan dengan status sebagai pekerja. Untuk yang di Korea, semuanya bekerja sebagai tenaga kerja kontrak pabrik. Untuk yang di negara-negara jazirah Arab dan Hongkong, semuanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Untuk yang bekerja di Taiwan, ada yang bekerja sebagai tenaga kerja kontrak pabrik, tenaga kerja restoran, dan ada juga yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Keterangan negara, jenis kelamin, aktivitas penghidupan yang dilakukan rumah tangga dalam strategi migrasi internasional

Rumah Tangga	No. Kuesioner	Negara	Jenis Kelamin	Aktivitas Penghidupan
Atas	3	Korea	Laki-laki	Tenaga kerja pabrik
	5	Korea	Laki-laki	Usaha PJTKI (jaringan LPK Al-Amin)
Menengah	12	Taiwan	Perempuan	Tenaga kerja restoran
	14	Korea	Laki-laki	Tenaga kerja pabrik
	57	Korea	Laki-laki	Tenaga kerja pabrik
Bawah pemilik	24	Taiwan	Laki-laki	Tenaga kerja pabrik
Bawah penggarap	73	Arab Saudi	Perempuan	Pembantu rumah tangga
	74	Korea	Laki-laki	Tenaga kerja pabrik
Bawah buruh	42	Oman	Perempuan	Pembantu rumah tangga
	44	Hongkong	Perempuan	Pembantu rumah tangga
	45	Abu Dhabi-UAE	Perempuan	Pembantu rumah tangga
	48	Korea	Laki-laki	Tenaga kerja pabrik
	76	Taiwan	Perempuan	Pembantu rumah tangga
	80	Korea	Laki-laki	Tenaga kerja pabrik

Sumber: Data primer survey rumah tangga 2014

Pada Tabel 6 juga dapat dilihat bahwa semua anggota rumah tangga lapisan atas yang migrasi adalah laki-laki, sedangkan anggota rumah tangga bawah didominasi oleh perempuan. Perbedaan jenis kelamin mempengaruhi aktivitas penghidupan yang dilakukan dan remitans yang bisa dikirim. Laki-laki bekerja sebagai tenaga kerja pabrik dan perempuan sebagian besar bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Seorang anggota rumah tangga yang bekerja sebagai tenaga kerja pabrik di Korea biasanya mengirimkan remitans sebesar Rp 120 juta per tahun, sedangkan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga biasanya hanya mengirimkan Rp 12 juta per tahun. Perbedaan yang sangat signifikan.

Pendapatan dan remitans yang lumayan besar telah menarik (*pulled out*) minat hampir semua lapisan rumah tangga untuk bisa bekerja ke Korea. Apalagi, bagi rumah tangga bawah yang tidak memiliki lahan dan usaha lainnya yang bisa menahan anggota rumah tangganya untuk melakukan aktivitas penghidupan di desa (*pulled out*), hal ini bisa membantu perekonomian dan penghidupan rumah tangga. Bahkan, selanjutnya bisa meningkatkan status sosial rumah tangganya. Oleh karena itu, mereka akan berusaha untuk bisa bekerja di Korea. Beberapa

rumah tangga bawah yang punya lahan sedikit ada yang menggadaikan lahan sawahnya untuk mendapatkan modal persiapan dan keberangkatan. Namun, beberapa lagi dan semua rumah tangga bawah yang tidak punya lahan memanfaatkan institusi sosial pinjam meminjam yang ada dalam organisasi kekerabatan dan patron-klien. Mereka meminjam kepada kerabat dan patron-klien dengan bunga 100 persen. Pinjaman akan dicicil setiap bulan setelah rumah tangga tersebut menerima remitans. Bagi mereka, meskipun bunganya tinggi, namun institusi ini menjembatani mereka untuk meningkatkan penghidupan mereka.

#### *Migrasi Dalam Negeri (Domestik)*

Seperti yang ditunjukkan Tabel 5 rumah tangga yang melakukan aktivitas penghidupan di luar Kabupaten Indramayu jumlahnya hanya sedikit, bahkan lebih sedikit dari aktivitas penghidupan migrasi internasional. Dari seluruh lapisan yang ada di desa saja hanya mencapai 9 persen dengan persentase terbanyak dicapai oleh rumah tangga bawah pemilik yang mencapai 19 persen. Bahkan, untuk lapisan atas, tidak ada satu pun rumah tangga yang melakukannya.

Tabel 7. Keterangan Kota, Jenis Kelamin, Aktivitas Penghidupan yang Dilakukan Rumah Tangga dalam Strategi Migrasi Domestik

Rumah Tangga	No. Kuesioner	Kota	Jenis Kelamin	Aktivitas Penghidupan
Menengah	61	Serang	Perempuan	Tenaga kerja pabrik
Bawah pemilik	25	Jabodetabek	Laki-laki	Tenaga kerja pabrik
	66	Sumatera	Laki-laki	Usaha perdagangan
	67	Jabodetabek	Laki-laki	Usaha perdagangan
Bawah penggarap	69	Batam	Perempuan	Penghibur
	70	Jabodetabek	Laki-laki	Tenaga kerja pabrik
Bawah buruh	77	Jabodetabek	Laki-laki	Usaha perdagangan

Sumber: Data primer survey rumah tangga 2014

Pada Tabel 7 dapat dilihat kota tujuan migrasi, jenis kelamin, dan aktivitas penghidupan yang dilakukan oleh rumah tangga dari berbagai lapisan sosial. Dari tabel tersebut terlihat anggota rumah tangga laki-laki merupakan anggota yang paling banyak melakukan migrasi dengan daerah tujuan terbanyak, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Di kota-kota tersebut sebagian besar dari mereka melakukan aktivitas bekerja di pabrik, berdagang, dan ada satu orang yang menjalani aktivitas penghidupan dengan menjadi wanita penghibur di Batam. Para anggota rumah tangga yang sebagian besar adalah anaknya ini rutin mengirimkan remitans ke desa untuk membantu penghidupan rumah tangganya. Setidaknya setiap tahun, terutama lebaran, mereka pulang ke desa. Dibandingkan dengan bekerja di luar negeri, terutama di Korea, penghasilan yang didapatkan memang jauh lebih sedikit.

Berkurangnya rumah tangga yang menjalankan aktivitas penghidupan di luar Kabupaten Indramayu juga disebabkan oleh beberapa alasan. *Pertama*, saat ini, dengan pendapatan dan remitans yang lebih tinggi, rumah tangga di Desa Karangmulya lebih memilih melakukan aktivitas migrasi di luar negeri, terutama ke Korea. Apalagi setelah adanya kebijakan wajib sekolah gratis sampai SMA, semua anak-anak dari semua lapisan rumah tangga hampir semuanya bersekolah sampai tingkatan SMA. Adanya institusi yang memberikan pinjaman modal untuk persiapan dan keberangkatan ke Korea memberi kesempatan kepada siapa saja, termasuk rumah tangga bawah untuk berangkat bekerja di Korea. Kedua, saat ini, kesempatan bekerja dan berusaha di desa dan sekitarnya cukup banyak. Ketiga, saat ini, upah bekerja di desa dan sekitarnya lebih besar daripada upah bekerja di luar desa dan sekitarnya (di dalam negeri). Keempat, saat ini, hampir semua rumah tangga memiliki sepeda motor dan handphone sehingga mempermudah mobilitas dan komunikasi untuk bekerja dan berusaha di desa dan sekitar desa.

## KESIMPULAN

Desa Karangmulya merupakan desa persawahan tadah hujan di Pantura Indramayu yang memiliki kerentanan ekologi yang sangattinggi Hampir setiap tahun, desa ini tidak luput dari kekeringan dan banjir. Peristiwa ini menimbulkan tekanan dan guncangan terhadap penghidupan masyarakat desa. Untuk mempertahankan dan melanjutkan penghidupannya, rumah tangga dari berbagai lapisan sosial melakukan berbagai aktivitas penghidupan yang dikelompokkan ke dalam tiga strategi penghidupan, yaitu (1) pertanian, (2) diversifikasi penghidupan non-pertanian, dan (3) migrasi.

Strategi penghidupan dilakukan dengan mengkombinasikan aset penghidupan yang dimilikinya dan aset penghidupan milik rumah tangga lain yang berhasil diaksesnya melalui institusi sosial yang berlaku di masyarakat desa. Institusi sosial lahir, disepakati, dan dijalankan oleh setiap rumah tangga untuk berinteraksi dengan rumah tangga lain, termasuk dalam mengelola dan mengakses berbagai aset penghidupan yang bukan miliknya. Kerentanan ekologi desa dan ikatan kekerabatan menjadi perekat yang menyebabkan terus bertahannya berbagai institusi sosial di Desa Karangmulya. Dengan berbagai institusi sosial tersebut, secara umum, setiap rumah tangga di Desa Karangmulya berusaha untuk menghasilkan *outcome* penghidupan berkelanjutan bagi rumah tangganya. Pendapatan, *well-being* (kesejahteraan), adaptasi penghidupan, ketahanan pangan, dan keberlanjutan sumber daya alam dihasilkan secara komprehensif dan saling melengkapi oleh setiap rumah tangga untuk menghadirkan penghidupan berkelanjutan.

Pendapatan dalam bentuk uang dan juga hasil panen, misalnya padi, diterima oleh rumah tangga dari berbagai aktivitas yang dilakukannya. Besar kecilnya pendapatan yang diterima sesuai dengan status

(struktur) dan peran (fungsi) rumah tangga tersebut dalam aktivitas kehidupan yang dijalankan. Rumah tangga pemilik lahan yang mengeluarkan banyak input produksi dan menanggung risiko yang besar, misalnya, mendapatkan pendapatan lebih tinggi dibanding rumah tangga lain yang hanya ikut memanen (bawon) di lahan sawah miliknya. Meskipun pendapatan rumah tangga pemilik lahan jauh lebih tinggi, hal ini tidak membuat rumah tangga lain merasa dirugikan. Institusi sosial bawon yang memberi kesempatan kepada rumah tangga lain untuk ikut memanen dan mendapatkan padi sesuai dengan bagiannya menjadi perekat keharmonisan kedua belah pihak. Selain itu, berbagai institusi sosial lainnya baik yang berlaku di tingkat desa maupun rumah tangga dalam ikatan patron-klien menjadi media saling berbagi pendapatan.

*Well-being* (kesejahteraan) berhasil diwujudkan dari strategi kehidupan yang dilakukan dan institusi sosial yang berlaku di masyarakat. Keduanya telah terbukti menghadirkan (1) penghargaan diri bagi setiap rumah tangga dan anggotanya, (2) kesadaran sosial yang menjadikan setiap rumah tangga sebagai bagian dari masyarakat dapat ikut serta dalam kegiatan masyarakat, (3) keamanan setiap anggota rumah tangga, keamanan fisik rumah tinggal dan aset-aset kehidupan yang dimiliki, (4) status kesehatan dan pendidikan, (5) akses terhadap berbagai pelayanan publik, (6) hak untuk berpartisipasi, serta (6) hak untuk memelihara tradisi budaya.

Untuk adaptasi kehidupan, uraian di atas jelas memaparkan bagaimana setiap rumah tangga melakukan adaptasi (penyesuaian) pada aktivitas kehidupan yang dilakukannya. Setiap rumah tangga di Desa Karangmulya sudah cukup pandai memilih aktivitas kehidupan sesuai dengan musim (cuaca/iklim). Aktivitas kehidupan juga disesuaikan dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pemerintah. Aktivitas kehidupan yang mampu dikerjakan serta menghasilkan pendapatan dan kesejahteraan yang lebih tinggi akan terus dijalankan, namun yang tidak akan disesuaikan atau diganti dengan aktivitas kehidupan yang baru.

Ketahanan pangan pun selalu diwujudkan oleh setiap rumah tangga di Desa Karangmulya. Setiap musim hujan tiba, seluruh rumah tangga yang memiliki atau menyewa lahan sawah menanami lahan sawahnya dengan tanaman padi. Berbagai institusi sosial dalam bentuk ritual tradisi budaya pun dilakukan berkali-kali dari sebelum menggarap sampai setelah panen sebagai wujud doa dan syukur kepada Sang Pencipta agar padi yang ditanamnya bisa tumbuh subur dan dapat dipanen. Ketika waktunya panen tiba, seluruh rumah

tangga turun ke sawah dan ikut memanen untuk mendapatkan padi (bawon) sesuai dengan bagiannya. Selain itu, ada institusi remi yang memberi kesempatan kepada perempuan tua dan janda yang tidak bisa ikut bawon untuk tetap mendapatkan padi. Institusi senggang pun sengaja diciptakan dan tetap dipelihara untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan padi. Padi yang diperoleh tersebut sebagian besar disimpan di rumah sebagai stok pangan rumah tangga. Begitu pun dengan bagian panen yang diperoleh rumah tangga pemilik. Mereka akan mengutamakan stok pangan yang cukup bagi rumah tangganya terlebih dahulu sebelum dijual. Bahkan, semua rumah tangga lapisan atas menyiapkan stok pangan yang bisa dipinjam oleh tetangga, kerabat, dan kliennya yang dibutuhkan di saat paceklik. Selain institusi asli, program beras miskin (raskin) dari pemerintah yang dengan prinsip resiprositas dimodifikasi menjadi program beras rata (rasta) sehingga memberi kesempatan kepada rumah tangga lain yang sebetulnya membutuhkan beras, namun tidak terdata, untuk bisa mendapatkan beras.

Karena sejak kelahirannya, masyarakat desa persawahan ini sangat tergantung dengan sumber daya alam (lahan sawah, air, cuaca) sosial, maka sudah dipastikan seluruh rumah tangga akan mengelola sumber daya alam tersebut secara berkelanjutan. Suprastruktur sosial mengenai padi dan lahan sawah; struktur sosial yang ditentukan oleh kepemilikan lahan sawah; dan berbagai institusi sosial (infrastruktur sosial) yang bertujuan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan turut memastikan bahwa strategi kehidupan yang dilakukan rumah tangga di Desa Karangmulya mewujudkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. *Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim*. Jakarta: Bappenas.
- [BNPB] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2011. *Indeks Rawan Bencana Indonesia*. Jakarta: BNPB.
- [BPS Kabupaten Indramayu] Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu. 2006. *Kabupaten Indramayu dalam Angka 2005*. Indramayu: BPS Indramayu.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Kabupaten Indramayu dalam Angka 2008*. Indramayu: BPS Indramayu.

- \_\_\_\_\_. 2012. *Kabupaten Indramayu dalam Angka 2011*. Indramayu: BPS Indramayu.
- \_\_\_\_\_. 2013a. *Kabupaten Indramayu dalam Angka 2012*. Indramayu: BPS Indramayu.
- \_\_\_\_\_. 2013b. *Kecamatan Kandanghaur dalam Angka 2012*. Indramayu: BPS Indramayu.
- Cahyadi, R., D. Sucahyono, GAK. Surtiari, TI Miranda, AY Abdurrahim. 2012. *Peranan Sekolah Lapang Iklim dan Program Sosialisasi Informasi Perubahan Iklim dalam Menanggulangi Kemiskinan Petani dan Nelayan Akibat Dampak Perubahan Iklim (Ringkasan Hasil Penelitian)*. Jakarta: LIPI.
- Carney, D. 1998. *Sustainable Rural Livelihoods: What contribution can we make?* London: Department for International Development (DFID).
- [DFID] Department for International Development. 1999. *Sustainable Livelihoods Guidance Sheets*. London: DFID.
- Chamber and Conway. 1991. *Sustainable Rural: Practical Concepts for The 21st Century*. *IDS Discussion Paper 296*. Brighton: IDS.
- Collier, W.L., Soentoro, Gunawan Wiradi, & Makali. 1974. *Agricultural Technology and Institutional Change in Java*. Madison: University of Wisconsin.
- Dharmawan, A.H. 2007. *Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (Livelihood Sociology) Mazhab Barat dan Mazhab Bogor*. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* | Agustus 2007, p 169-192
- Ellis, Frank. 2000. *Household Strategies and Diversity in Developing Countries*. Oxford: Oxford University Press.
- Kalsim DK. 2007. *Kekeringan dan Berbagai Permasalahannya*. Diskusi Panel Ahli IPB 8 September 2007 di Bogor. Tidak dipublikasikan.
- [Kemendagri] Kementerian Dalam Negeri-RI. 2014. *Profil Desa Karangmulya, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu*. Jakarta: Kemendagri.
- [KLH] Kementerian Lingkungan Hidup-RI. 2013. *Pengembangan Konsep Indeks Kerentanan Nasional*. Disampaikan di Bogor, 21 Februari 2013. Tidak dipublikasikan.
- [LIPI] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hasil survey rumah tangga Program Sosialisasi Perubahan Iklim LIPI, ICCTF, dan BMKG tahun 2011. Tidak dipublikasikan.
- Pramudia, Aris. 2002. *Analisis Sensitivitas Tingkat Kerawanan Produksi Padi di Pantai Utara Jawa Barat terhadap Kekeringan dan El-Nino*. Tesis. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Scoones, Ian. 1998. *Sustainable Rural Livelihoods: Framework for Analysis*. *IDS Working Paper 72*. Sussex: IDS
- \_\_\_\_\_. 2009. *Livelihoods Perspectives and Rural Development*. *The Journal of Peasant Studies*, 36:1, 171-196.
- Scotts, James C. 1976. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: University Press.
- \_\_\_\_\_. 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: University Press.
- Sucahyono, Dedi dan Aldrian. 2012. *Sucahyono dan Aldrian. 2012. Perubahan Iklim. Dalam Perubahan Iklim: Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Adaptasi Petani dan Nelayan Melalui Radio*, Hidayati dan Aldrian (ed.). Bogor: PT Sarana Komunikasi Utama bekerja sama dengan LIPI, BMKG, dan ICCTF.
- Utomo WY. 2013. *Analisis Potensi Rawan (Hazard) dan Risiko (Risk) Bencana Banjir dan Longsor (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat)*. Tesis. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Popkin, Samuel L. 1979. *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. Berkeley: University of California Press.

## LAMPIRAN

Tabel Lampiran 1. Karakteristik Sumber Daya Manusia Rumah Tangga (Dalam Persen)

Karakteristik Sumber Daya Manusia (modal insani)	Lapisan Sosial				
	Atas (n=10)	Menengah (n=30)	Bawah Pemilik (n=20)	Bawah Penggarap (n=20)	Bawah Buruh (n=20)
<b>Ukuran dan Umur</b>					
Banyaknya ART (no.)	3.4	3.5	3.8	3.9	2.9
Sex Rasio ART (L:P)	1.1	0.8	1.4	1.0	1.1
KRT Perempuan (%)	0.0	4.2	0.7	0.0	0.1
Umur KRT (no.)	53.5	51.2	51.9	46.7	48.5
Umur Total ART (no)	38.5	35.8	37.6	30.1	29.0
<b>Pendidikan KRT (%)</b>					
- Tidak tamat SD(%)	37.5	56.5	57.1	62.5	31.3
- Tamat SD(%)	12.5	17.4	35.7	25.0	56.3
- Tamat SLTP(%)	12.5	17.4	7.1	12.5	0.0
- Tamat SLTA(%)	37.5	4.3	0.0	0.0	12.5
- Tamat kuliah (%)	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
<b>Pendidikan ART (%)</b>					
- Belum sekolah(%)	0.0	7.4	4.7	11.1	10.0
- Tidak tamat SD(%)	22.2	33.3	34.9	30.2	13.3
- Sedang SD(%)	11.1	4.9	2.3	4.8	11.7
- Tamat SD(%)	22.2	18.5	30.2	23.8	40.0
- Sedang SLTP(%)	0.0	2.5	7.0	6.3	1.7
- Tamat SLTP(%)	7.4	13.6	9.3	11.1	10.0
- Sedang SLTA(%)	3.7	1.2	2.3	4.8	0.0
- Tamat SLTA(%)	29.6	16.0	9.3	7.9	13.3
- Sedang kuliah(%)	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
- Tamat kuliah (%)	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
<b>Pelatihan KRT</b>					
- Penyuluhan(%)	100	72.2	27.3	40	-
- SLI(%)	40	16.7	9.1	20	-
- SLPHT/SLPTT (%)	40	16.7	9.1	10	-
- Informasi iklim dari media (%)	40	16.7	0	10	-

Sumber: Data primer survey rumah tangga 2014

Tabel Lampiran2. Keanggotaan dan Manfaat Kelompok Tani yang Diperoleh Rumah Tangga (Dalam Persen)

Modal sosial	Lapisan Sosial				
	Atas (n=8)	Menengah (n=24)	Bawah Pemilik (n=16)	Bawah Penggarap (n=16)	Bawah Buruh (n=16)
<b>Kelompok tani</b>					
- Pengurus	50	11.1	16.7	10	-
- Anggota	50	83.3	75.0	80	-
- Tidak	0	5.6	8.3	10	-
<b>Manfaat kelompok tani</b>					
- Modal usaha	40	29.4	0	10	-
- Benih	100	72.2	63.6	40	-
- Pupuk bersubsidi	100	94.4	90.9	80	-
- Sewa alsintan	100	83.3	90.9	60	-
- Penyuluhan	100	72.2	27.3	40	-

- SLI	40	16.7	9.1	20	-
- SLPHT/SLPTT	40	16.7	9.1	10	-
- Informasi iklim dari media	40	16.7	0	10	-
- Tanam serentak	100	77.8	81.8	90	-
- Pengairan di musim gadu	20	16.7	0	10	-
- Pemeliharaan saluran irigasi	20	16.7	0	10	-
<b>Berdiskusi sesama anggota kelompok tani dalam musim</b>					
- Lebih dari 10 kali	20	21.1	0	11.1	-
- 1-9 kali	60	63.2	33.3	55.5	-
- Tidak pernah	20	15.8	66.7	33.4	-

Sumber: Data primer survey rumah tangga 2014

Tabel Lampiran 3. Aset Lahan Sawah Yang Dimiliki dan Diakses Rumah Tangga

Lahan sawah	Lapisan Sosial				
	Atas (n=8)	Menengah (n=24)	Bawah Pemilik (n=16)	Bawah Penggarap (n=16)	Bawah Buruh (n=16)
<b>Rata-rata Luas Lahan</b>					
- Lahan milik sendiri	25,869	8,350	2,689	0	438
- Lahan milik orang lain	2,188	1,871	1,831	6,213	0
- Total lahan	28,056	10,221	4,521	6,213	438
<b>Pengairan</b>					
- Kecukupan pasokan irigasi musim rendeng	100	100	100	90.9	-
- Kecukupan pasokan irigasi musim gadu	0	0	0	0	-
- Air dalam tanah sawah bisa dipantek dan dipakai	16.7	22.2	7.7	8.3	-
<b>Kemudahan dijangkau</b>					
- Dapat dijangkau dg mobil	16.7	5.6	0	10	-
- Dapat dijangkau dg motor	50.0	72.2	83.3	60	-

Sumber: Data primer survey rumah tangga 2014

Tabel Lampiran 4. Keterangan Asal Lahan Sawah yang Dimiliki

Asal lahan sawah yang dimiliki	Lapisan Sosial				
	Atas (n=8)	Menengah (n=24)	Bawah Pemilik (n=16)	Bawah Penggarap (n=16)	Bawah Buruh (n=16)
Seluruhnya beli	12.5	12.5	6.7	0	0
Sebagian besar beli	37.5	4.2	0	0	0
Sebagian besar warisan	12.5	37.5	6.7	0	0
Seluruhnya warisan	37.5	45.8	86.7	0	<b>100</b>

Sumber: Data primer survey rumah tangga 2014

Tabel Lampiran 5. Keterangan Akses yang Dimiliki Rumah Tangga Terhadap Lahan Sawah Milik Orang Lain

Akses terhadap lahan sawah milik orang lain	Lapisan Sosial				
	Atas (n=8)	Menengah (n=24)	Bawah Pemilik (n=16)	Bawah Penggarap (n=16)	Bawah Buruh (n=16)
Bagi hasil	0	0	0	0	0
Gadai	438	354	0	131	0
Sewa	1,750	1,517	1,831	6,081	0
- Pembaayaransewa setelah panen	66.7	94.1	100	100	0
- Menunda pembayaransewa apabila gagal panen	83.4	73.3	61.5	90.9	0

Sumber: Data primer survey rumah tangga 2014

Tabel Lampiran 6. Modal Fisik yang Dimiliki Rumah Tangga

Modal fisik	Lapisan Sosial				
	Atas (n=8)	Menengah (n=24)	Bawah Pemilik (n=16)	Bawah Penggarap (n=16)	Bawah Buruh (n=16)
<b>Bangunan rumah tinggal</b>					
- Milik sendiri (%)	100	100	93.3	85.7	81.8
- Atap genteng (%)	100	100	100	100	100
- Dinding tembok (%)	100	100	100	92.9	100
- Lantai keramik (m <sup>2</sup> )	85.7	81	40	28.6	18.8
- Luas lantai (m <sup>2</sup> )	94.2	71	50.3	58.2	48.3
<b>Air minum (%)</b>					
- Air kemasan/ulang (%)	57.1	75	60	50	63.6
- Air sumur (%)	42.9	25	40	50	36.4
<b>Air memasak (%)</b>					
- Air kemasan/ulang (%)	14.3	0	0	0	0
- Air sumur (%)	85.7	100	100	100	100
<b>Jamban sendiri (%)</b>	100	95.2	93.3	85.7	81.8
<b>PLN meteran (%)</b>	100	100	80	78.6	81.8
<b>LPG memasak (%)</b>	100	85.7	78.6	85.7	72.7
<b>Jumlah Aset bergerak</b>					
- Traktor	0.5	0.125	0	0.0625	0
- Sprayer	0.75	0.625	0.625	0.375	0
- Trasher	0.125	0.21	0	0	0
- Mobil (no.)	0.29	0.1	0	0	0
- Sepeda (no.)	0.29	0.56	0.4	0.66	0.36
- Sepeda motor (no.)	2.57	1.26	1.27	0.83	0.9
- TV (no.)	1.4	1.1	0.8	0.92	0.73
- Komputer/laptop (no.)	1	0.2	0.07	0.09	0
- HP (no.)	3	1.3	0.8	1.5	1.6
- Lemari es (no.)	1.57	1	0.27	0.33	0.45

Sumber: Data primer survey rumah tangga 2014

Tabel Lampiran 7. Modal Finansial yang Dimiliki dan Dapat Diakses Rumah Tangga

Modal Finansial	Lapisan Sosial (%)				
	Atas (n=8)	Menengah (n=24)	Bawah Pemilik (n=16)	Bawah Penggarap (n=16)	Bawah Buruh (n=16)
<b>Modal usaha tani padi sawah</b>					
- Modal sendiri	60	42.9	8.3	16.7	0
- Pinjam bank	20	19	16.7	25	0
- Pinjaman dari perseorangan	0	23.8	66.7	50	0
- Modal sendiri & pinjam bank	20	0	0	0	0
- Pinjaman bank & perseorangan	0	14.3	0	0	0
- Modal sendiri & pinjam perseorangan	0	0	8.3	8.3	0
<b>Pernah meminjam/meminjamkan kepada perorangan</b>	50	72.7	83.3	81.8	100
<b>Pernah menolak/ditolak pinjaman perorangan</b>	33.3	25	18.2	45.5	100
<b>Pernah mengalami kesulitan ketika mengajukan pinjaman bank</b>	20	15.4	12.5	0	0
<b>Tabungan dan investasi</b>					
- Tabungan uang di rumah	50	33.3	9.1	10	0
- Tabungan uang di bank	50	17.6	18.2	0	0
- Tabungan uang di perorangan	33.3	11.8	9.1	0	0
- Emas dan perhiasan	83.3	35.4	18.2	11.1	0
- Hewan ternak	50	5.9	27.3	11.1	0
<b>Aliran uang dari remitans</b>					
- Remitans dari luar negeri	25	12.5	6.25	12.5	37.5
- Remitans dari dalam negeri	0	4.2	18.75	12.5	6.25

Sumber: Data primer survey rumah tangga 2014

# KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN TANGKAP KOTA TEGAL, JAWA TENGAH<sup>1</sup>

## (SOCIAL ECONOMIC CONDITION AND EMPOWERMENT OF FISHERMEN IN TEGAL CITY, CENTRAL JAVA)

Deshinta Vibriyanti

Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
nayla\_dv@yahoo.co.id

### Abstract

*Tegal city has the potential of fishing on fisheries, human resources and adequate infrastructure. However, the data indicate that fisheries production in Tegal experience fluctuated in the last five years due to tough weather and the occurrence of overfishing in the north of the Java fishing area. This condition affects fishing income is uncertain, especially for traditional fishermen who have limited capital and technology. Therefore it takes the government intervention in promoting the empowerment of fishermen through various programs. This study aimed to describe the socio-economic conditions and the empowerment programs for the fishermen, particularly the traditional fishermen in Tegal. Data collected through qualitative approach in interviewing technique, Focus Group Discussions (FGD), observation and study of literature. The results of this study indicate that the fisheries sector in Tegal has great potential as a driver of the economy of local communities. This is evident from the growth of industries such as industrial fish processing fillet absorb labors, especially women workers. However, the empowerment program as provided by the government still having some problems in the field, especially in terms of equitable access to the program either physical or non-physical dimension. Grouping approach is one strategy to increase the participation of fishermen in the empowerment program. Therefore, the government needs to encourage fishermen to united into the groups to facilitate mapping and intervention programs. Assistance to fishing groups are also necessary, particularly for traditional fishermen who in lower levels of education.*

Keywords: fisheries, social-economic condition, empowerment, Tegal

### Abstrak

Kota Tegal memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup besar dengan sumberdaya laut, SDM dan infrastruktur yang memadai. Akan tetapi data menunjukkan bahwa produksi perikanan laut di kota Tegal mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir yang disebabkan oleh kondisi cuaca yang buruk dan terjadinya *overfishing* di wilayah penangkapan utara pulau Jawa. Kondisi ini berdampak terhadap pendapatan nelayan yang tidak menentu, khususnya bagi nelayan tradisional yang memiliki keterbatasan modal dan teknologi. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah dalam upaya meningkatkan pemberdayaan nelayan tangkap melalui berbagai program. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi dan bentuk pemberdayaan bagi nelayan tangkap, khususnya nelayan tradisional di Kota Tegal. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, *focus group discussion*, observasi dan studi literatur. Hasil studi ini menunjukkan bahwa sektor perikanan tangkap di kota Tegal memiliki potensi yang besar sebagai penggerak perekonomian masyarakat lokal. Hal ini terbukti dari tumbuhnya industri-industri pengolahan ikan seperti industri fillet yang banyak menyerap tenaga kerja khususnya tenaga kerja perempuan. Hanya saja program-program pemberdayaan yang diberikan pemerintah masih menemui beberapa kendala di lapangan, terutama dalam hal pemerataan akses baik terhadap program yang berdimensi fisik maupun nonfisik. Pendekatan kelompok merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan partisipasi nelayan dalam program pemberdayaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong nelayan untuk tergabung dalam kelompok-kelompok sehingga memudahkan pemetaan dan intervensi program. Pendampingan terhadap kelompok-kelompok nelayan juga dirasa perlu, khususnya bagi nelayan tradisional yang rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Kata kunci: nelayan tangkap, kondisi sosial ekonomi, pemberdayaan, Tegal

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu potensi alam Indonesia yang sangat besar adalah sumberdaya kelautan dan perikanan. Kota Tegal merupakan salah satu kota di utara pantai pulau Jawa yang cukup diperhitungkan karena hasil produksi dan nilai produksi yang tergolong tinggi. Menurut data Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah tahun 2011, Kota Tegal menduduki urutan ke tiga yang memiliki produksi dan nilai produksi perikanan laut tertinggi se-provinsi Jawa Tengah. Padahal secara geografis, Kota Tegal hanya memiliki panjang garis pantai sekitar 6 km saja namun dapat menghasilkan produksi perikanan laut sebanyak 35.206,3 ton dengan nilai produksi sekitar 218 milyar rupiah. Jika dibandingkan dengan kabupaten Tegal yang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi kota Tegal yang memiliki panjang garis pantai hingga 26 km hanya menghasilkan produksi perikanan laut sebanyak 1.269,9 ton dengan nilai produksi sekitar 7 milyar rupiah.

Jika ditinjau dari aspek historis, kota Tegal terkenal dengan nelayan-nelayannya yang tangguh sejak zaman koloni Belanda. Tegal juga dikenal sebagai pusat pelabuhan dan perdagangan yang banyak disinggahi oleh para pelayar dari berbagai daerah di nusantara hingga manca negara. Kehidupan sosial masyarakat khas pesisir diwarnai oleh akulturasi budaya antara penduduk pendatang dengan penduduk lokal sehingga menjadikan Tegal sebagai salah satu kota perdagangan di kawasan utara Jawa yang selalu dinamis (Rochani, 2005).

Saat ini, salah satu sektor unggulan di Kota Tegal adalah sektor perikanan laut. Dilihat dari persentase kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian di Kota Tegal sebesar 57,27 persen dapat disimpulkan bahwa sub sektor yang menonjol dari sektor pertanian di Kota Tegal adalah sub sektor perikanan. Majunya sektor perikanan laut di Kota Tegal salah satunya didukung oleh adanya tiga tempat pelelangan ikan (TPI) yaitu TPI Pelabuhan, TPI Tegalsari, dan TPI Muarareja. Ditambah lagi dengan komitmen pemerintah kota Tegal yang cukup tinggi dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui berbagai program di sektor perikanan yang mampu mendorong kemajuan sektor perikanan laut.

Namun data Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tegal tahun 2013 menunjukkan kondisi produksi perikanan laut yang fluktuatif. Hal ini diduga karena kondisi cuaca buruk yang mempengaruhi aktivitas penangkapan ikan di laut serta dugaan *overfishing* pada wilayah tangkap laut Jawa. Hasil penelitian Triarso (2012), menunjukkan potensi sumberdaya perikanan tangkap di pantura Jawa Tengah, termasuk di beberapa kabupaten/kota pantura Jawa Tengah terindikasi telah mengalami *overfishing*. Kondisi ini tentu saja mempengaruhi pendapatan para nelayan khususnya nelayan tradisional yang memiliki keterbatasan baik dari segi modal, armada dan alat tangkap. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas nelayan khususnya nelayan tradisional agar dapat menjamin keberlanjutan pekerjaan sebagai nelayan. Salah satu upaya peningkatan kapasitas nelayan yaitu dengan intervensi program pemberdayaan. Tulisan ini akan mengemukakan analisis kondisi kehidupan nelayan tangkap kota Tegal dari aspek sosial, ekonomi, dan historis serta mengidentifikasi bentuk-bentuk program pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah beserta hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program. Diharapkan hasil studi ini akan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai stakeholder dalam upaya meningkatkan kapasitas nelayan melalui program-program pemberdayaan yang tepat sasaran.

## 2. PROFIL DAN SEJARAH KOTA TEGAL

Kota Tegal merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Hal tersebut dipengaruhi oleh letak geografis Kota Tegal yang berada di daerah pantai utara pulau Jawa (Pantura) pada koordinat  $109^{\circ} 08' - 109^{\circ} 10'$  garis Bujur Timur dan  $6^{\circ} 50' - 6^{\circ} 53'$  garis Lintang Selatan. Selain itu letak Kota Tegal sangat strategis karena berada pada persimpangan tiga jalur utama trans-Jawa yang menuju ke Jakarta-Semarang/Surabaya (jalur Pantura) dan jalur Purwokerto/Yogyakarta (jalur Selatan). Sebelah utara Kota Tegal berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes.

Dari hasil registrasi penduduk tahun 2011 tercatat jumlah penduduk Kota Tegal sebanyak 241.710 jiwa yang terdiri dari 49,6% penduduk laki-laki dan 50,4% penduduk perempuan. Pertumbuhan penduduk Kota Tegal tahun 2011 tercatat 0,49 persen. Komposisi penduduk Kota Tegal tahun 2011 didominasi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 68,63 persen, sebanyak 26,34 persen penduduk usia muda (0-14 tahun) dan penduduk usia tua (65+ tahun) sebanyak 5,01 persen. Struktur usia produktif yang besar di Kota Tegal merupakan modal dasar dalam pembangunan perekonomian daerahnya. Dari tingkat pendidikan yang ditamatkan menunjukkan bahwa 30,8 persen masyarakat Kota Tegal berpendidikan Sekolah Dasar (SD), 20,28 persen berpendidikan SLTP, 20,8 persen berpendidikan SLTA dan hanya 6,08 persen mencapai pendidikan Perguruan Tinggi/Akademi.

Untuk memahami kondisi masyarakat suatu wilayah, tidak bisa terlepas dari telaah sejarah (Daryono, 2008). Tegal (administrasi Kota Tegal dan Kabupaten Tegal) merupakan salah satu kota tua yang sarat dengan histori. Sejak zaman kolonial Belanda Tegal telah dijadikan pusat pertahanan logistik bagi kerajaan Mataram. Pada abad 16 Tegal telah menjadi salah satu pusat asimilasi kultural, agama dan perdagangan yang sangat ramai. Hubungan dagang terjalin dengan negeri Tiongkok<sup>1</sup> dan pedagang asal Gujarat (Koja)<sup>2</sup>. Dalam buku yang berjudul *Ki Gede Sebayu Babad Negari Tegal* yang ditulis oleh Rochani (2005), disebutkan bahwa pada tahun 1729-1898 Kota Tegal dijadikan sebagai ibukota kerasidenan (*Gewest*) yang mencakup wilayah Kabupaten Tegal, Pemalang dan Brebes.

Tegal sejak dahulu memang terkenal sebagai kota perdagangan atau bandar tempat bertemunya pedagang-pedagang dan pelayar yang berasal dari berbagai etnis dan bangsa. Kondisi demikian berlangsung hingga kini. Hal itu tercermin dari lapangan pekerjaan utama yang ditekuni oleh masyarakat Kota Tegal (Tabel 1). Dari tahun 2009

<sup>1</sup> Pedagang dan pelayar dari Tiongkok kemudian menyebarkan agama Kong Hu Cu di Tegal

<sup>2</sup> Pedagang Gujarat kemudian menyebarkan agama Islam. Penyebaran agama Islam pertama kali di Tegal masuk melalui daerah pesisir yaitu pelabuhan Tegal (Pesengkongan) dan kemudian berasimilasi dengan kepercayaan lama seperti Kejawan dan Hindu.

hingga tahun 2013 berdagang masih merupakan pekerjaan yang paling banyak dilakukan masyarakat Kota Tegal walaupun terjadi penurunan persentase di tahun 2012 dan 2013 menjadi 21,82 persen. Selanjutnya diikuti oleh pekerjaan di sektor informal dan pekerja keluarga (17,33%), buruh industri (13,84%), buruh bangunan (11,89%) dan diikuti oleh pekerjaan sebagai nelayan (11,25%). Penduduk yang bekerja sebagai nelayan mengalami peningkatan proporsi di bawah angka satu persen setiap tahunnya sejak tahun 2010 hingga 2013.

Dari kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB maka terlihat bahwa lapangan usaha perdagangan (termasuk hotel dan restoran) konsisten menjadi penyumbang terbesar sejak tahun 2006 hingga tahun 2010 (Tabel 2). Selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan sebagai penyumbang kedua terbesar, walaupun dalam perkembangannya mengalami kecenderungan persentase sumbangan yang menurun di setiap tahun. Sejarah mencatat bahwa majunya industri di Tegal diawali dari penderitaan masyarakat petani pada zaman kolonial Belanda yang merebut hak-hak tanah melalui politik tanam paksa. Kondisi ini akhirnya mendorong masyarakat Tegal untuk mencari mata pencaharian lain diantaranya menjadi pengrajin logam besi, emas, kuningan dan jenis logam lainnya yang biasanya dibentuk menjadi gunting, suku cadang kendaraan, alat perkakas dapur dan lain sebagainya. Sampai saat ini Tegal masih dikenal dengan sebutan "Jepangnya Indonesia" karena begitu majunya Tegal dengan industri logam. Saat ini jenis industri yang potensial sebagai produk unggulan adalah: industri galangan kapal, industri logam, industri *shuttlecock*, industri sandang (batik tulis dan tenun ikat ATBM), industri pengolahan ikan, dan industri telur asin. Dari Tabel 2 terlihat bahwa Kota Tegal tidak memiliki sumbangan PDRB yang berasal dari lapangan usaha pertambangan dan galian.

Seperti yang telah disebutkan di atas, salah satu jenis industri yang potensial di Kota Tegal adalah industri pengolahan ikan. Pembahasan selanjutnya akan memaparkan potensi kelautan Kota Tegal yang mendukung majunya industri pengolahan berbahan baku ikan.

Tabel 1: Penduduk 10th+ Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kota Tegal 2007 - 2013 (dalam persen)

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Petani	2,29	2,22	2,11	2,13	2,36
2.	Buruh Tani	5,50	4,66	3,79	3,89	4,25
3.	Nelayan	9,44	9,40	10,69	11,04	11,25
4.	Pengusaha	1,86	1,83	2,00	2,03	2,28
5.	Buruh Industri	15,29	17,25	13,33	13,72	13,84
6.	Buruh Bangunan	15,10	16,58	11,82	12,10	11,89
7.	Pedagang	19,75	18,88	23,50	22,31	21,82
8.	Angkutan	5,27	4,96	4,46	4,76	4,68
9.	PNS/ABRI	6,60	6,58	5,89	5,94	5,76
10.	Pensiunan	4,34	4,32	4,67	4,89	4,55
11.	Lainnya <sup>*)</sup>	14,56	13,33	17,30	17,20	17,33
Jumlah		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Tegal; Kota Tegal Dalam Angka 2013

<sup>\*)</sup> Informal sektor dan pekerja keluarga

Tabel 2: Distribusi Persentasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berkala Kota Tegal 2006-2010

No.	Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Pertanian	11,73	11,03	10,41	9,95	9,48
2.	Pertambangan & Galian	-	-	-	-	-
3.	Industri pengolahan	22,59	22,44	22,28	21,93	21,73
4.	Listrik, Air, gas	2,31	2,39	2,34	2,38	2,46
5.	Bangunan	8,14	8,86	9,00	9,37	9,44
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	22,63	23,11	23,32	23,46	23,58
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	13,54	13,40	13,82	14,08	14,23
8.	Kemasy/Sewa/Jasa Perd	9,37	9,24	9,44	9,59	9,77
9.	Jasa ..	9,70	9,52	9,38	9,24	9,31
Jumlah		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Tegal; Kota Tegal Dalam Angka 2012

### 3. POTENSI KELAUTAN KOTA TEGAL

Kota Tegal secara administrasi memiliki luas wilayah 39,68 km<sup>2</sup> yang merupakan hasil pemekaran wilayah pada tahun 1987 dari Kabupaten Tegal dan ditambah dengan tukar guling dengan wilayah Kabupaten Brebes yang dikenal dengan sebutan *Bokong Semar* (Tegal dalam Angka, BPS 2012). Kota Tegal sendiri terdiri dari empat wilayah kecamatan dengan 27 kelurahan, dimana empat kelurahan diantaranya mempunyai daerah pantai yang merupakan basis kegiatan perikanan dengan panjang garis pantai 7,5 km.

Kota Tegal merupakan wilayah yang memiliki potensi perikanan yang cukup besar, khususnya perikanan

tangkap. Produksi perikanan tangkap di Kota Tegal tahun 2012 mencapai 27 ribu ton dengan nilai produksi 206 milyar rupiah. Wilayah berbasis perikanan di Kota Tegal terdapat di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Tegal Timur. Di Kecamatan Tegal Barat basis perikanan terdapat di Kelurahan Tegalsari dan Muarareja, sedangkan di Kecamatan Tegal Timur basis perikanan terdapat di kelurahan Mintaragen dan kelurahan Panggung.

#### a. Kecamatan Tegal Barat

Kecamatan Tegal Barat merupakan salah satu pusat basis perikanan di Kota Tegal. Dengan luas wilayah 15,13 km<sup>2</sup>, kecamatan Tegal Barat berada di pesisir

pantai utara pulau Jawa. Oleh karena itu mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Kegiatan kenelayanan di kecamatan ini berpusat di Kelurahan Tegalsari dan Kelurahan Muarareja. Hampir 90 persen dari total jumlah nelayan di Kecamatan ini berasal dari Kelurahan Tegalsari dan Muarareja. Jumlah nelayan di kelurahan Tegalsari adalah yang terbesar yaitu 4.997 orang dan di kelurahan Muarareja berjumlah 1.478 orang. Hal tersebut didukung pula dengan adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang merupakan lokasi pemasaran utama hasil-hasil perikanan di Kota Tegal yang terletak di TPI Tegalsari dan TPI Muarareja, serta TPI Pelabuhan yang juga berlokasi di Tegalsari. Sembilan puluh persen penduduk Kecamatan Tegal Barat adalah pemeluk agama Islam. Selain menjadi nelayan, penduduk kecamatan ini juga banyak berprofesi sebagai pedagang dan buruh industri.

Kehidupan masyarakat nelayan kecil di Kecamatan Tegal Barat pada umumnya tergantung dari usaha penangkapan di laut. Dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap iklim, menyebabkan masyarakat nelayan harus berhadapan dengan ketidakpastian hasil laut yang berdampak pada pendapatan. Sebuah penelitian mengenai kehidupan sosial budaya masyarakat nelayan miskin di Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal menunjukkan hasil bahwa sistem gotong royong yang ada pada masyarakat nelayan miskin Muarareja merupakan salah satu *coping strategy* yang dilakukan oleh nelayan miskin Muarareja untuk dapat meringankan beban ekonomi kehidupan mereka. Sistem hubungan kekeluargaan dan kerabat dekat yang masih kuat dipandang dapat membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam segi ekonomi. Para nelayan miskin yang mayoritas beragama Islam meyakini bahwa bekerja harus sesuai dengan norma agama. Dalam hal ini sistem kepercayaan merupakan dasar dan pedoman dalam bekerja bagi para nelayan. (Arpiani, 2009).

## **b. Kecamatan Tegal Timur**

Dua kelurahan basis perikanan di Kecamatan Tegal Timur adalah Kelurahan Mintaragen dan Kelurahan Panggung. Berbeda dengan kecamatan Tegal Barat, mayoritas penduduk Kecamatan Tegal Timur bukan bermata pencarian sebagai nelayan, melainkan

sebagai buruh industri yaitu sekitar 25 persen dan sebagai pedagang 11 persen. Sedangkan yang berprofesi sebagai nelayan hanya berjumlah 8,7 persen. Data menunjukkan bahwa 81,3 persen nelayan tersebut berasal dari Kelurahan Mintaragen dan kelurahan Panggung. Jumlah nelayan terbesar di kecamatan ini terdapat di Kelurahan Mintaragen yaitu 2.879 orang sedangkan di kelurahan Panggung hanya berjumlah 585 orang. Rata-rata anggota rumah tangga yang dimiliki oleh penduduk kecamatan Tegal Timur adalah 3,75

Potensi sumberdaya perikanan Kota Tegal di dominasi oleh kegiatan perikanan tangkap yang beroperasi di wilayah perairan pantai dan lepas pantai. Didukung oleh 3 sarana pemasaran berupa Tempat pelelangan Ikan (TPI Pelabuhan, TPI Tegalsari dan TPI Muarareja) menjadikan perikanan di Kota Tegal berkembang dengan baik. Tabel 3 menunjukkan potensi sumber daya Perikanan Kota Tegal Tahun 2011. (Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal, 2011)

Adanya tiga tempat pelelangan ikan di Kota Tegal yang merupakan tempat berlabuhnya jenis kapal *sopek*, *cantrang* dan *purse seine* yang melakukan bungkar lelang ikan, mendorong berkembangnya aktivitas usaha perdagangan ikan termasuk industri pengolahan ikan. Produk ikan olahan Kota Tegal terdiri dari ikan kering (tawar dan asin), pindang, ikan asap, fillet yang diproduksi oleh para pengusaha pengolahan ikan untuk memenuhi kebutuhan regional dan nasional. Aktivitas usaha industri pengolahan ikan diselenggarakan oleh pengusaha industri pengolahan ikan yang berjumlah sekitar 247 unit usaha yang tersebar di Kelurahan Tegalsari, Kraton dan Muarareja di Kecamatan Tegal Barat, sedangkan di Kecamatan Tegal Timur terdapat di Kelurahan Panggung dan Mintaragen. Pada bulan Februari tahun 2007 telah dibuka sentra pengolahan ikan di blok J Tegalsari yang diharapkan akan semakin membuka peluang investor di sektor industri pengolahan ikan.

Tabel 3: Potensi Sumberdaya Perikanan Kota Tegal Tahun 2011

No.	Potensi	Jumlah
1.	Tempat Pelelangan Ikan (Unit)	3
2.	Kapal Perikanan (Unit)	
	- Kapal motor	683
	- Motor Tempel	270
		<b>953</b>
3.	Nelayan (orang)	
	- Pemilik/juragan	630
	- Buruh (pendega)	11.967
		<b>12.597</b>
4.	Alat Tangkap (unit)	
	- Purse seine	168
	- Gill Net KM	23
	- Gill Net MT	10
	- Trammel Net (0-5 GT)	87
	- Jaring Arad (6-10 GT)	106
	- Cantrang (11-30 GT)	492
	- Pukat Pantai (0-5 GT)	19
	- Badong (6-10 GT)	46
	- Lain-lain	2
		<b>953</b>

Sumber: Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal, 2013

Perkembangan produksi dan nilai produksi perikanan laut di Kota Tegal dari tahun 2008 hingga tahun 2009 (Tabel 4). Data menunjukkan terjadi peningkatan produksi dan nilai produksi hampir disetiap tahunnya kecuali pada tahun 2010. Dari hasil wawancara dengan para nelayan diketahui bahwa penurunan produksi ikan tangkap di tahun 2010 dikarenakan kondisi cuaca laut yang sering mengalami gelombang tinggi disepanjang tahun sehingga para nelayan pada saat itu sangat sulit untuk melaut. Namun akibat dari berkurangnya intensitas melaut tersebut maka pada tahun 2011 terjadi lonjakan produksi ikan yang sangat signifikan. Menurut salah satu nelayan nara sumber kondisi tersebut memberikan masa berkembangbiak yang cukup panjang bagi ikan sehingga jumlah ikan menjadi berlimpah.

Tabel 4: Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut

Tahun	Produksi (ton)	Nilai Produksi (000 Rp)
2007	20.591.607	97.364.289
2008	19.538.491	124.899.612
2009	25.285.303	147.611.365
2010	20.323.865	135.616.286
2011	29.516.013	198.911.948
2012	27.178.122	206.770.092

Sumber: Sumber: Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal, 2013

Hasil tangkapan ikan nelayan Kota Tegal tergolong variatif, seperti ikan ekor kuning (*Upeneus tragula*), petek (*Leiognathus* sp.), pari (*Trigon sephen*) dan beloso (*Saurida tumbil*). Sistem penjualan dilakukan melalui proses pelelangan ikan, sedangkan hasil tangkapan yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi seperti cumi-cumi (*Loligo* sp.) dan bambangan (*Lutjanus* sp.) tidak dilakukan proses pelelangan ikan, hasil tangkapan tersebut langsung dijual kepada bakul atau pedagang besar.

Meningkatnya produksi perikanan khususnya perikanan tangkap membawa pengaruh pula terhadap peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Tegal. Dalam tata kelola penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kota Tegal pada kurun waktu beberapa tahun belakangan ini mengalami perubahan. Sebelum diberlakukannya Perda Kota Tegal no. 27 tahun 2010, kewenangan pengelolaan TPI menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah namun dengan adanya Perda tersebut maka sejak tahun 2011 pengelolaan TPI menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tegal. Hal ini tentu saja berdampak langsung terhadap besarnya kontribusi kegiatan perikanan terhadap PAD Kota Tegal.

#### • *Klasifikasi Nelayan Tangkap Kota Tegal*

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 pasal 1 butir 10 menyebutkan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dan pada pasal 1 butir 5 juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan bukan budidaya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang

menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah dan atau mengawetkan. Undang-Undang no. 45 tahun 2009 merupakan perubahan dari Undang-Undang no. 31 tahun 2004. Salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Perubahan atas UU no. 31 tahun 2004 adalah bahwa UU yang terdahulu belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.

Pengklasifikasian perikanan menurut skala kecil atau besar, perikanan pantai atau lepas pantai, artisanal<sup>3</sup> atau komersial, tradisional atau modern hingga saat ini masih menjadi perdebatan karena dimensi tolak ukurnya yang cukup luas. Sering kali pengelompokan berdasar atas ukuran kapal, ukuran tonase mesin kapal, jenis alat tangkap, jarak wilayah penangkapan dari tepi pantai (Smith, 1983). Berdasarkan teknik dan alat-alat penangkapannya, nelayan tradisional adalah nelayan yang masih mempertahankan cara penangkapannya dengan menggunakan kapal tanpa motor (KTM), tanpa inovasi teknologi, tanpa dukungan modal yang kuat, tanpa kelembagaan usaha yang mapan, cenderung bersifat subsistem, dan telah menekuni aktifitas tersebut secara turun temurun. Berbeda halnya dengan nelayan modern, teknik penangkapannya mengadopsi perkembangan teknologi, seperti kapal motor hingga ke teknologi citra satelit misalnya. Dukungan modal dan kelembagaan usahanya mapan, serta ciri-ciri subsistem telah hilang.

Secara umum nelayan-nelayan di Kota Tegal mengelompokkan diri berdasarkan alat tangkap dan armada yang digunakan. Pengelompokan menurut alat tangkap ini biasa dilakukan karena berkorelasi terhadap pendapatan. Beberapa studi membuktikan bahwa perubahan teknologi berpengaruh positif terhadap tingkat hasil tangkapan nelayan. Salah satunya adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adnan (2006) membuktikan bahwa produksi hasil tangkapan ikan paling besar dicapai oleh kapal motor, kemudian oleh perahu motor tempel, dan terakhir

<sup>3</sup> Artisanal disebut juga perikanan rakyat, yaitu perikanan skala kecil untuk subsisten atau lokal, pasar kecil, umumnya menggunakan teknik penangkapan ikan tradisional dan perahu kecil

diikuti perahu tradisional. Pendapatan nelayan yang memakai perahu tradisional dengan perahu motor tempel juga memiliki perbedaan yang nyata. Dari hasil wawancara dengan nelayan-nelayan di kota Tegal, mereka melakukan pengelompokan nelayan berdasarkan alat tangkap dan armada yang digunakan, yaitu:

#### a. Nelayan Kecil

Nelayan kecil adalah nelayan yang menggunakan kapal berkekuatan 1 – 10 GT. Wilayah tangkap nelayan kecil 3-5 GT hanya berkisar 2-3 mil dari pinggir pantai. , salah seorang nelayan mengemukakan bahwa: “*kami melaut jarak dekat saja, bahkan daratan masih terlihat*”. Alat tangkap yang biasanya digunakan untuk kelompok nelayan kecil adalah *trammel net* dan jenis pukat pantai. Jenis ikan yang ditangkap antara lain: udang rebon, ikan teri, pethek, kembung, kluwak. Nelayan kecil biasanya melaut sendiri atau ditemani oleh satu orang.

#### b. Nelayan Sedang atau Jaring arad (Trawl)

Nelayan Jaring aret adalah nelayan yang menggunakan kapal berkekuatan 11-30 GT. Wilayah tangkap nelayan jenis ini lebih dari 5 mill lepas pantai. Alat tangkap yang digunakan *purse seine*, jaring aret dan badong. Jenis ikan yang ditangkap antara lain: udang jerbung, udang dogol, ikan layang, ikan layur. Satu kapal nelayan jaring terdiri dari 2-5 orang. Sistem bagi hasil proposional/seimbang.

#### c. Nelayan Besar (Cantrang)

Nelayan cantrang adalah nelayan yang menggunakan kapal bertonase 30 GT ke atas. Wilayah tangkap mencapai 60-100 mill dari pinggir pantai. Menurut Masyhuri (1999), pada umumnya penangkapan ikan lepas pantai yang dilakukan dalam waktu yang lebih lama dan lebih jauh dari daerah sasaran tangkapan ikan mempunyai banyak kemungkinan memperoleh hasil tangkapan (produksi) yang lebih banyak dan tentu memberikan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan penangkapan ikan dekat pantai. Jenis ikan yang ditangkap antara lain jenis ikan dasar (demersal), udang-udangan, ikan petek, gulamah, kerapu, bloso, pari, cucut dan lain-lain. Satu kapal cantrang terdiri dari 15-25 awak kapal. Hubungan

kerja lebih jelas, dimana terdapat struktur kerja yang jelas antara juragan pemilik kapal, Kapten kapal dan ABK. Sistem patron-klient masih ditemui pada hubungan kerja nelayan cantrang.

Sedangkan jika dilihat dari status kepemilikan armada, nelayan tangkap di Kota Tegal dapat diklasifikasikan menjadi nelayan ABK sewa kapal, Nelayan ABK buruh, Nelayan pemilik, dan Nelayan Pengusaha.

Tabel 5: Klasifikasi Nelayan Tangkap Menurut Status Kepemilikan Armada di Kota Tegal

No.	Klasifikasi Nelayan Tangkap	Keterangan
1.	Nelayan ABK Sewa Kapal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil tangkapan menjadi milik ABK</li> <li>• ABK hanya membayar uang sewa kapal setiap minggunya (1 kapal terdiri 1-3 ABK)</li> <li>• Alat tangkap milik pribadi dan tradisional (menggunakan jaring biasa)</li> </ul>
2.	Nelayan ABK Buruh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil tangkapan menjadi milik nelayan pengusaha (hanya tenaga saja yang diperlukan)</li> <li>• Upah di peroleh dari nelayan pengusaha</li> <li>• Alat tangkap di sediakan oleh nelayan pengusaha</li> </ul>
3.	Nelayan Pemilik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan nelayan yang memiliki kapal sendiri. Ukuran mesin kapal 6- 10 GT.</li> </ul>
4.	Nelayan Pengusaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelayan pengusaha merupakan nelayan yang memiliki kapal besar yang memperkerjakan para ABK, dan menyediakan persewaan kapal namun tidak lengkap dengan alat tangkapnya</li> </ul>

Dari hasil FGD dengan para nelayan kecil terungkap bahwa saat ini nelayan kecil mulai kehilangan lahan tangkapan. Jumlah nelayan kecil yang meningkat menjadikan wilayah tangkapan menjadi sempit serta kondisi laut yang *overfishing* menjadikan produksi nelayan kecil menjadi menurun. Dikarenakan kegiatan melaut sangat bergantung pada kondisi cuaca, maka penggunaan alat tangkap juga disesuaikan dengan kondisi alam. Keterbatasan alat tangkap yang hanya dapat digunakan dalam satu musim serta armada terbatas membuat nelayan kecil kalah bersaing dengan nelayan-nelayan besar yang memiliki modal dan alat tangkap yang lebih canggih.

Proses pemasaran hasil tangkapan ikan dilakukan melalui proses pelelangan ikan di TPI. Retribusi yang dibebankan yaitu sebesar 2,78 persen dari jumlah hasil penjualan ikan, nelayan menanggung retribusi sebesar 1,66 persen dari jumlah hasil pelelangan hasil tangkapan sedangkan pembeli ikan atau biasa disebut bakul ikan atau tengkulak menanggung sebesar 1,12

persen dari jumlah hasil tangkapan nelayan yang dibeli oleh tengkulak. Sebagian besar ikan-ikan dijual di TPI untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diantaranya untuk konsumsi, pengolahan hasil perikanan seperti gesek (pengasinan), fillet, tepung ikan, bermacam-macam hasil olahan seperti kerupuk, nugget, bakso empek-empek, abon ikan, terasi dan lain-lain. Produk unggulan perikanan kota Tegal adalah fillet ikan yang diproduksi oleh 35 pengolah skala rumah tangga dengan total produksi sebesar 75 ton/hari. Mayoritas tenaga kerja usaha pemfilletan ikan adalah kaum perempuan (ibu rumah tangga dan remaja putri). Dengan ketersediaan pekerjaan bagi kaum perempuan sebagai tenaga buruh di perusahaan fillet ikan maka dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Hal ini terlihat dari kondisi pemukiman kampung nelayan yang bisa dikatakan baik dengan bentuk bangunan yang sudah permanen. Ketersediaan lapangan pekerjaan bagi perempuan juga menjadi faktor utama rendahnya tingkat migrasi tenaga kerja

seperti menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri.

#### **4. KONDISI SOSIAL EKONOMI NELAYAN TANGKAP**

Menurut Hermawan (2006), nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Kelompok masyarakat nelayan pada umumnya tinggal di pesisir pantai dekat dengan kegiatannya. Secara sosiologis karakteristik masyarakat nelayan berbeda dengan masyarakat petani dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan lahan. Nelayan sangat tergantung dengan kondisi alam dengan tingkat risiko pekerjaan yang tidak dapat diprediksi. Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat dinamis sumberdaya yang digarapnya, sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, nelayan harus berpindah-pindah. Selain itu, resiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya (Sebenan, 2007). Walaupun dalam sensus sektor perikanan merupakan subsektor dari pertanian, keberadaan rumah tangga nelayan memiliki ciri khusus bila dibandingkan dengan rumah tangga tani. Perbedaan yang muncul dari kedua rumah tangga ini antara lain: 1) Rumah tangga tani dan petani tambak mengandalkan tanah yang terbatas sebagai salah satu faktor produksi, sementara rumah tangga nelayan menggunakan wilayah pesisir sebagai suatu faktor produksi, 2) Pada rumah tangga tani lahan terbatas penggunaannya, sedangkan laut bagi rumah tangga nelayan adalah tidak terbatas yang dibatasi oleh batas-batas teritorial administrasi, 3) Petani dalam proses produksinya terikat dengan musim, sementara rumah tangga nelayan sarat dengan siklus bulan (Masyuri, 2001).

Sebagian besar nelayan kota Tegal telah berprofesi sebagai nelayan sejak masih usia anak-anak dan remaja. Mereka mendapatkan keahlian melaut secara turun temurun karena berasal dari keluarga nelayan juga. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa nelayan Tegal memiliki pengalaman melaut yang cukup mumpuni. Menurut Rangkuti (1995), berpengalaman adalah seseorang yang telah menekuni pekerjaannya

selama beberapa tahun. Seseorang nelayan yang telah menekuni pekerjaannya 15 sampai 30 tahun, dapat dianggap nelayan yang berpengalaman dan dapat dijadikan pawang. Salah satu karakteristik nelayan Tegal adalah memiliki sifat pekerja keras, pantang menyerah dan tangguh, ini dibuktikan dengan radius wilayah tangkapan yang cukup luas. Untuk nelayan cantrang yang menggunakan kapal bertonase mencapai 30 GT mampu mencapai perairan Kalimantan, Sulawesi bahkan hingga Kepulauan Timur Sumatera. Bukan itu saja, bahkan nelayan-nelayan Tegal banyak yang bermigrasi ke wilayah selatan pulau Jawa untuk menangkap ikan, tidak sedikit pula nelayan yang memutuskan bermigrasi menjadi nelayan ke bagian selatan pulau Jawa.

Nelayan di Kota Tegal, meskipun dilihat dari segi pengalaman dan keterampilan cukup mumpuni, akan tetapi dilihat dari pendidikan formal, pada umumnya berpendidikan rendah. Dari hasil wawancara dan FGD dengan beberapa nara sumber nelayan diketahui bahwa rata-rata nelayan berpendidikan SD. Hal itu berkaitan dengan pekerjaan sebagai nelayan telah dilakukan sejak anak-anak, sehingga tidak mendapat kesempatan untuk bersekolah.

Selain menjadi nelayan lokal terdapat beberapa diantara nelayan yang mencoba beradu nasib dan mencari pengalaman menjadi ABK di kapal asing, atau yang dikenal dengan istilah ABK Pasporan. Untuk menjadi ABK pasporan pun mensyaratkan tingkat pendidikan formal meskipun pada jenjang yang rendah yaitu minimal lulusan SD, lulus Pelatihan Keselamatan Dasar (PKS) dan memiliki Buku Pelaut. Rendahnya pendidikan dan penguasaan teknologi menjadikan nelayan tangkap skala kecil di Indonesia sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan nelayan negara lain (Widyanto *et al.*, 2002). Namun walaupun demikian mayoritas responden nelayan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pendidikan anak-anaknya. Banyak anak-anak nelayan yang dapat menyelesaikan SMA atau SMK bahkan perguruan tinggi karena dorongan orang tua yang menginginkan perubahan nasib bagi generasi mereka di masa yang akan datang.

Musim penangkapan ikan tidak berlangsung sepanjang waktu, tergantung pada angin, cuaca, gelombang, dan arus air laut. Adanya perubahan iklim

akan berpengaruh terhadap dinamika perairan laut seperti berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku/pola migrasi ikan tangkapan serta prioritas penangkapan ikan. Bagi nelayan kecil pada bulan Maret ikan masih dapat diperoleh namun pada bulan Agustus–Desember, nelayan kecil sulit untuk mendapatkan ikan. Nelayan menyebutnya sebagai musim panceklik, dimana hasil tangkapan ikan sangat sedikit. Nelayan mempercayai bahwa pada bulan-bulan tersebut disebut sebagai “*pati sumber*” yaitu dimana air laut berasa pahit (kondisi terlalu asin). Pada musim panceklik banyak nelayan-nelayan yang tidak pergi melaut dan banyak yang berganti profesi menjadi buruh pabrik, tukang becak, buruh nelayan tambak atau banyak juga yang memanfaatkan masa panceklik untuk memperbaiki alat tangkap yang rusak.

Selain itu rendahnya teknologi penangkapan yang dimiliki nelayan serta masih banyaknya nelayan yang belum memiliki peralatan tangkap, semakin memojokkan nelayan dalam kondisi ekonomi yang lemah. Dari hasil studi yang dilakukan oleh Masyuri (1998) tentang produktivitas dan pendapatan buruh nelayan di Jawa dan Madura menunjukkan bahwa pola kepemilikan sarana produksi penangkapan ikan mempunyai pengaruh yang sangat besar pada tingkat perekonomian nelayan. Sistem bagi hasil yang sudah menjadi tradisi dikalangan nelayan, menempatkan kelompok pemilik sarana produksi pada posisi yang sangat menguntungkan, yang mendapat sebahagian besar dari hasil tangkapan. Dalam hal ini, makin strategis posisi seseorang dalam organisasi kerja nelayan maka makin besar pula pendapatan nelayan.

Pendapatan nelayan tangkap kota Tegal juga bervariasi berdasarkan jenis alat tangkap dan armada yang digunakan. Pendapatan nelayan kecil yang menggunakan jenis alat tangkap *trammel net* mencapai Rp 50.000,- hingga Rp150.000,- dalam sekali kegiatan melaut dengan modal perbekalan sekitar Rp 50.000,- hingga Rp 80.000,-. Biasanya nelayan kecil jenis ini hanya melaut dalam hitungan jam, yaitu sekitar 6-7 jam perhari dan sangat tergantung kondisi cuaca saat itu. Sedangkan pendapatan nelayan jaring (*Purse seine*) dalam sekali kegiatan melaut mencapai 2-3 juta rupiah dengan modal perbekalan sekitar Rp 500.000,-. Lama kegiatan penangkapan ikan ini dapat berlangsung 2

hingga 7 hari. Selanjutnya pendapatan nelayan Cantrang berkisar 80 juta hingga 100 juta rupiah dengan modal perbekalan 20 juta hingga 50 juta rupiah dengan lama kegiatan penangkapan ikan mencapai 1 hingga 3 bulan. Sebuah studi mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan yang di lakukan oleh Rangkuti (1995) menunjukkan bahwa faktor dominan yang mempengaruhi pendapatan nelayan perahu motor adalah biaya melaut, status perahu, pengalaman dan pendidikan. Namun faktor yang paling dominan dalam menentukan pendapatan nelayan perahu motor adalah faktor biaya melaut. Dimana semakin besar biaya melaut, maka pendapatan yang diperoleh juga semakin besar. Faktor ini juga yang paling dominan mempengaruhi pendapatan nelayan perahu layar.

Untuk masalah permodalan, biasanya nelayan kecil dan nelayan jaring yang menjadi anggota koperasi sebagian memperoleh modal dari koperasi. Namun pada umumnya yang banyak ditemukan adalah permodalan atau perbekalan melaut diperoleh dari hasil pinjaman bahan-bahan keperluan melaut dari toko-toko terdekat. (solar, bensin, beras, dll). Kemudian setelah mendapat hasil tangkapan ikan dan dijual di TPI barulah dibayarkan ke toko tempat peminjaman perbekalan. Bagi nelayan kecil akses permodalan dengan melakukan pinjaman ke bank sangat sulit diperoleh. Salah satu sumber permodalan bagi nelayan kecil adalah dari Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP). Hingga tahun 2005 para nelayan masih banyak yang berhubungan dengan tengkulak dalam hal permodalan. Namun semenjak tahun 2010 sedikit demi sedikit pola manajemen keuangan para nelayan mulai berubah. Mereka tidak lagi menggunakan jasa tengkulak karena telah menyadari kerugian dari tingginya bunga pinjaman. Studi yang dilakukan oleh Utami (2012), mengenai pengaruh pemberian kredit KUD Karya Mina terhadap pendapatan nelayan tradisional di kota Tegal membuktikan bahwa penggunaan kredit KUD Karya Mina berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha perikanan tangkap nelayan tradisional. Studi tersebut juga menunjukkan hasil bahwa pendapatan usaha perikanan tangkap nelayan tradisional pengguna kredit KUD Karya Mina lebih tinggi daripada nelayan tradisional bukan pengguna kredit KUD Karya Mina. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya mendorong para nelayan

tradisional untuk bergabung menjadi anggota KUD dengan salah satu cara yaitu memudahkan persyaratan keanggotaan.

Namun pada kenyataannya tidak semua nelayan tradisional yang tergabung sebagai anggota KUD. Bagi nelayan yang bukan anggota KUD biasanya melakukan strategi dengan bermitra dengan pemilik-pemilik toko untuk memenuhi kebutuhan modal melaut seperti bahan bakar dan alat tangkap dengan mekanisme pinjaman. Pembayaran akan dilakukan setelah mendapatkan hasil dari melaut. Kelompok nelayan seperti ini sangat rentan terhadap jeratan tengkulak karena tidak memiliki jaringan pengaman ekonomi maupun sosial sehingga tidak mampu keluar dari kondisi kemiskinan.

## 5. PEMBERDAYAAN NELAYAN TANGKAP

Kata pemberdayaan sudah sering terdengar khususnya bagi kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap lemah seperti petani dan nelayan. Pemberdayaan menyiratkan suatu kondisi yang timpang, dimana terdapat pihak yang tidak memiliki kesempatan, kekuatan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya (Amanah, 2013). Ketiadaan daya tersebut umumnya dikarenakan sistem dan struktur yang kurang berpihak pada kebutuhan masyarakat kecil. Untuk meningkatkan kesempatan, kekuatan, dan kemampuan dalam bertindak, dilakukanlah pemberdayaan.

Pelaksanaan program pemberdayaan dinilai berhasil jika mencerminkan kondisi masyarakat yang mandiri, inovatif, daya juang tinggi, mampu menjalin kerja sama, dan mampu menentukan keputusan atas berbagai pilihan yang ada. Agar pemberdayaan yang diupayakan dapat mencapai hasil yang diharapkan, perlu terlebih dahulu memahami dimensi pemberdayaan yang terdiri dari aspek fisik dan nonfisik. Aspek fisik meliputi sarana dan prasarana sedangkan aspek nonfisik meliputi kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan jaringan kerjasama (Amanah, 2013).

Pembahasan mengenai program pemberdayaan nelayan tradisional di kota Tegal akan dianalisa dengan membedakan dimensi pemberdayaan yang terdiri dari aspek fisik dan nonfisik.

### • *Aspek Fisik*

Adapun program pemberdayaan nelayan tangkap yang berdimensi fisik adalah program revitalisasi kapal dan alat tangkap yang diberikan oleh pemerintah kepada nelayan melalui mekanisme kelompok. Dalam program ini bantuan yang telah digulirkan antara lain adalah bantuan kapal dan mesin 3GT, alat tangkap jaring, dan *coolstorage*. Dalam program pemberdayaan, pendekatan kelompok merupakan salah satu strategi agar program dapat diakses oleh peserta yang berjumlah besar. Menurut data Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tegal tahun 2012 terdapat 25 kelompok nelayan yang tersebar di desa-desa nelayan. Dari hasil wawancara dengan nelayan menyatakan bahwa: "pentingnya membuat kelompok nelayan, selain sebagai media penghubung dalam pelaksanaan program pemerintah, manfaat lain yang dirasakan dari bergabung dengan kelompok nelayan adalah dapat meredam konflik antar nelayan". Dahulu konflik perebutan wilayah tangkap sering terjadi antar nelayan, namun dengan adanya kelompok-kelompok nelayan maka permasalahan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan.

Program revitalisasi kapal dan alat tangkap memberikan keleluasaan kepada kelompok nelayan penerima bantuan untuk menentukan jenis bantuan yang diterima. Hal ini dinilai efektif karena bantuan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nelayan. Namun program ini tetap menemui kendala di lapangan. Kesenjangan antara jumlah bantuan dengan jumlah nelayan yang membutuhkan bantuan merupakan potensi konflik yang cukup tajam di antara kelompok nelayan. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan berorganisasi dalam kelompok menyebabkan terjadinya ketidakmerataan kesempatan karena biasanya kelompok-kelompok yang telah maju saja yang mampu membuat proposal sebagai salah satu syarat pengajuan permohonan bantuan. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan melalui pendampingan terhadap kelompok nelayan yang belum maju.

Dimensi pemberdayaan yang bersifat fisik lainnya adalah bantuan pemerintah dalam pembangunan rumah susun bagi nelayan di Muarareja Kota Tegal. Program ini dilaksanakan berdasarkan kebutuhan

hunian yang layak dan terjangkau bagi para nelayan yang relatif memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Bangunan hunian vertikal merupakan salah satu strategi dalam menjawab permasalahan kepadatan penduduk dan lingkungan tempat tinggal yang kumuh bagi nelayan Kota Tegal. Namun sebagaimana halnya dengan program-program lain, pembangunan rumah susun bagi nelayan ini juga menghadapi kendala di lapangan. Kendala yang terjadi antara lain adalah terbatasnya daya beli masyarakat berpenghasilan menengah-bawah termasuk nelayan, terbatasnya penyediaan uang muka, rendahnya kemampuan meminjam akibat tenor pinjaman yang pendek, serta permasalahan sosial dan budaya (Amir, 2005).

- *Aspek Nonfisik*

Program pemberdayaan nelayan tangkap di kota Tegal yang berdimensi nonfisik diantaranya adalah program bantuan permodalan, program peningkatan keterampilan dan pengetahuan, dan program diversifikasi usaha sektor perikanan. Program bantuan permodalan bagi nelayan di Kota Tegal sebagian besar berasal dari dana pemerintah baik itu dari APBN maupun APBD. Bantuan permodalan juga diberikan kepada nelayan secara bergulir melalui mekanisme kelompok. Pada tahun 2011 melalui dana pusat, pemerintah Kota Tegal menyalurkan dana bantuan permodalan sebanyak 100 juta kepada kelompok nelayan terpilih. Selain program bantuan permodalan dari pemerintah, KUD juga berperan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nelayan. Namun memang diakui oleh pengurus KUD Mina Karya bahwa pemberian bantuan permodalan baru menyentuh nelayan-nelayan besar yang relatif memiliki aset yang digunakan sebagai jaminan.

Program peningkatan keterampilan dan pengetahuan bagi nelayan diantaranya adalah pelatihan perbaikan mesin kapal tempel, perbaikan kapal, pengolahan hasil ikan, pengelolaan keuangan berbasis kelompok hingga keikutsertaan pelatihan di tingkat propinsi dan studi banding. Program ini biasanya diberikan oleh pemerintah bekerja sama dengan beberapa pihak seperti Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BP3), Balai Keterampilan Penangkapan Ikan (BKPI), Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI), serta beberapa kegiatan pelatihan lain yang diberikan oleh pihak

swasta. Beberapa nelayan mengakui bahwa program-program pelatihan tidak selalu dapat diakses oleh nelayan. Sosialisasi yang kurang merata mengakibatkan informasi yang berkaitan dengan pelatihan tidak sampai kepada kelompok-kelompok nelayan yang secara jarak berjauhan dengan pusat kota. Hambatan jarak antara peserta dengan lokasi pelatihan juga perlu menjadi perhatian bagi penyelenggara program karena pelatihan yang berlangsung beberapa hari akan mengakibatkan kehilangan potensi pendapatan ekonomi bagi nelayan.

Selanjutnya, program diversifikasi usaha sektor perikanan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga nelayan tradisional. Menurut Susilowati (2002), dewasa ini sumber pendapatan sebagian besar rumah tangga di pedesaan tidak hanya dari satu sumber, melainkan dari beberapa sumber atau dapat dikatakan rumah tangga melakukan diversifikasi pekerjaan atau memiliki aneka ragam sumber pendapatan. Program diversifikasi usaha yang pernah diselenggarakan oleh pemerintah Tegal antara lain pengembangan wisata pantai, kerajinan kerang, dan pengolahan makanan berbahan dasar ikan. Selain karena hasil laut yang berlimpah, peran para istri nelayan juga cukup besar terhadap peningkatan pendapatan keluarga. Diantaranya membantu memasarkan ikan hasil tangkapan yang diperoleh suaminya dan selebihnya bekerja sebagai buruh di perusahaan fillet ataupun bekerja di Kelompok Pengolahan dan Pemasar (Poklahsar). Kelompok-kelompok pengolahan hasil perikanan seperti Poklahsar dengan skala usaha rumah tangga saat ini mulai menjamur di Kota Tegal. Bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta dinas Perindustrian dan UKM pun masuk melalui kelompok-kelompok usaha rumah tangga. Poklahsar yang terbentuk pada umumnya adalah industri pengolahan ikan menjadi kerupuk, baso ikan, nugget, mpek-mpek, otak-otak, terasi, dan jenis makan olahan lain yang terus dikembangkan dan dipasarkan di Kota Tegal dan sekitarnya. Bahkan untuk Poklahsar yang sudah cukup maju pemasaran produksinya tidak hanya di pulau Jawa namun sudah mencapai Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Kesulitan mengakses bantuan bagi kelompok-kelompok usaha industri yang baru terbentuk merupakan kendala dalam program ini. Pemberi bantuan dalam hal ini pihak DKP cenderung menyalurkan bantuan kepada

kelompok-kelompok yang telah stabil dan sudah menunjukkan peningkatan usaha. Hal tersebut diakui oleh pihak DKP sebagai salah satu strategi meminimalisir resiko kegagalan program. Tentu saja mekanisme seperti ini dianggap tidak mengedepankan prinsip keadilan bagi kelompok yang baru merintis usaha.

Pemerintah daerah Kota Tegal sendiri cukup aktif mengembangkan peluang-peluang ekonomi bagi masyarakatnya. Hal ini tercermin pada tahun 2012 dicanangkannya 'Tegal Bisnis 2012' guna mendorong perekonomian masyarakat Tegal. Adapun tujuan konsep Tegal Bisnis yaitu meningkatkan pemberdayaan potensi daerah yang ada dengan melibatkan seluas-luasnya peran serta dan dukungan berbagai komponen masyarakat. Beragam industri baik yang berskala besar maupun yang berskala kecil ikut berpengaruh terhadap peningkatan taraf hidup perekonomian masyarakat nelayan.

## 6. SIMPULAN DAN SARAN

Kota Tegal merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang memiliki potensi perikanan laut yang cukup tinggi. Potensi ini masih dapat berkembang dengan cara meningkatkan kapasitas nelayan melalui program-program pemberdayaan. Program-program pemberdayaan nelayan, khususnya nelayan tradisional yang telah berjalan menghadapi kendala utama yaitu dalam segi aksesibilitas. Artinya tidak semua nelayan dapat mengakses program baik program yang berdimensi fisik maupun nonfisik. Oleh karena itu dibutuhkan pemecahan masalah terkait kendala yang ditemui dilapangan. Jika merfer kepada konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Longwee, bahwa salah satu aspek pemberdayaan adalah akses maka, pemberdayaan dalam uraian ini masih sebatas program yang belum memenuhi aspek partisipasi, kontrol dan kesejahteraan.

Hasil empirik menunjukkan bahwa kondisi pendidikan nelayan yang rendah menyebabkan nelayan memiliki hambatan dalam mengakses berbagai program yang ada. Program-program pemberdayaan sebgaiian besar memiliki persyaratan administrasi yang hasus dipenuhi oleh nelayan. Oleh karena itu untuk menjembatani kesenjangan antara nelayan dengan program pemberdayaan maka

diperlukan pendampingan kelompok nelayan. Selama ini pendampingan kelompok nelayan diberikan oleh dinas perikanan melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Namun pada kenyataannya di lapangan, peran PPL dirasakan sangat minim baik secara jumlah petugas maupun kualitas. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi kembali terkait kinerja dan kompetensi petugas PPL sehingga tujuan pendampingan bagi nelayan kecil dapat tercapai. Selain itu, peningkatan kapasitas nelayan melalui penguatan kelompok harus terus didorong agar program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dapat diterima merata dan adil bagi nelayan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Yayat Hidayat. 2005. Identifikasi Karakteristik Sosial Ekonomi dan Persepsi Masyarakat Sasaran Program Penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Tegal.
- Arpiani, Riski. 2009. Kehidupan Sosial Budaya Dalam Kaitannya Dengan Perilaku Ekonomi Masyarakat Nelayan (Studi Terhadap Kemiskinan Di Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal). Skripsi. Tidak dipublikasi. Unnes.
- BPS. 2012. Tegal Dalam Angka.
- Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting, S.P dan M.J. Sitepu. 2004. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Daryono, Yono. 2008. Tegal Stad: Evolusi Sebuah Kota. Kantor Informasi dan Humas Kota Tegal. Tegal.
- FAO. 2001. *Indicators for Sustainable Development of Marine Capture Fisheries*. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No. 08 Food and Agriculture Organization (FAO) Rome.
- Hermawan, M. 2006. Keberanjutan Perikanan Tangkap Skala Kecil. Disertasi. Tidak di Publikasi
- <http://unnes.ac.id>

- Masyuri, I. 2001. Pemberdayaan masyarakat nelayan. Media Presindo, Jogjakarta.Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Rangkuti, F.1995. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis- Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Rochani, Hamam Ahmad. 2005. Ki Gede Sebayu: Babad Negari Tegal. Intermedia Paramadina. Tegal
- Sebenan, R.D. 2007. Strategi pemberdayaan rumahtangga nelayan di Desa Gangga II kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Smith, I.R. 1983. *A Research Freamwork for Traditional Fisheries*. International Center For Living Aquatic resources Management (ICLARAM), Manila.
- Susilowati (2002). Kajian Partisipasi Wanita dan Istri Nelayan Dalam Membangun Masyarakat Pesisir (Studi Kasus pada Perkampungan Nelayan di Demak. Jawa Tengah. Laporan Penelitian Kerjasama UNDIP dengan Mc Master University of Canada.
- Triarso, Imam. 2013. Potensi Dan Peluang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Di Pantura Jawa Tengah. Jurnal Saintek Perikanan Vol. 8. No. 1, 2012
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Utami, Shinta Karina. 2012. Pengaruh Pemberian Kredit KUD Karya Mina Terhadap Pendapatan Nelayan Tradisional Di Kota Tegal. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Widyanto,D. 2002. Pemberdayaan Masyarakat Pantai untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan. Kasus Tanjung Pakis Kabupaten Karawang. Jawa Barat. IPB Press.

# RELEVANSI PENDIDIKAN KEJURUAN TERHADAP PASAR KERJA DI KOTA SALATIGA

## *THE RELEVANCE OF VOCATIONAL EDUCATION ON LABOR MARKET IN SALATIGA*

Ngadi

Peneliti Ketenagakerjaan Pusat Penelitian Kependudukan –Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
faris2adi@yahoo.com

### Abstrak

Tulisan ini ditujukan untuk membahas relevansi pendidikan kejuruan terhadap pasar kerja terutama dilihat dari aspek penyerapan tenaga kerja dan produktivitas. Data yang digunakan adalah data sekunder – data kuantitatif yang bersumber dari Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Kota Salatiga. Data primer adalah data kualitatif berdasarkan hasil wawancara terbuka dan observasi di Kota Salatiga, Jawa Tengah yang dilakukan pada tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan SMK di Salatiga telah memberikan sumbangan tenaga kerja di pasar kerja yang cukup besar. Akan tetapi masih terdapat sekitar 12 persen lulusan SMK yang tidak terserap di dunia kerja sehingga tingkat relevansi pendidikan kejuruan terhadap dunia kerja belum menggembirakan. Rata-rata upah tenaga kerja lulusan SMK juga masih lebih rendah dibanding lulusan SMA, yang mengindikasikan bahwa produktivitas lulusan pendidikan kejuruan masih belum memuaskan. Dalam kaitan ini *rate of return* pendidikan kejuruan masih lebih rendah dibanding pendidikan menengah umum. Oleh sebab itu, pendidikan kejuruan perlu berbenah baik dari sisi input maupun proses belajar mengajar agar lulusannya memiliki daya saing yang lebih tinggi. Hal positif yang ada pada pendidikan kejuruan adalah sebagian dari mereka telah membuat kerja sama dengan dunia usaha dan industri. Sebagian lulusan bahkan telah mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan sebelum dinyatakan lulus.

Kata Kunci : Pendidikan kejuruan, penyerapan tenaga kerja, produktivitas, Salatiga

### I. PENDAHULUAN

#### a. Latar Belakang

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor mendasar yang perlu diperhatikan guna meningkatkan daya saing dan produktivitas angkatan kerja di era

### Abstract

This paper aimed to discuss the relevance of vocational education on labor market mainly on labor absorption and productivity. Data for analysis are research data 2011 in Salatiga that were collected by secondary data, interview, and observation. Analysis showed that vocational educations have high contribution on labor market. However, the relevance of vocational education to labor market has not been encouraging because about 12 percent of vocational education graduates are not absorbed in the labor market. In other sides, the average income of vocational educations graduates are lower than tertiary school graduates so the productivity of vocational education is still not satisfactory. Those were indicate that rate of return of vocational education lower than tertiary education. Thus, vocational educations need to be developed both in input and learning process so they can create more competitiveness graduation. Positively, some of the vocational educations have been able to make link and cooperation with business and industry. Eventhough, some of them have been able to get a good job before passed from school.

Keywords : vocational education, demand for labor, productivity, Salatiga

globalisasi. Dalam kaitan tersebut kebijakan penyiapan tenaga kerja perlu dilihat secara komprehensif termasuk implementasi kebijakan dan outputnya. Upaya penyiapan tenaga kerja semakin mendesak berkaitan dengan kondisi Indonesia yang sedang dalam proses menuju kesempatan yaitu suatu kondisi dimana *dependency ratio* berada pada titik terendah. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi

yang dilakukan oleh Bappenas, BPS dan UNFPA bahwa angka tersebut akan dicapai antara tahun 2020 hingga tahun 2030 (Bappenas, BPS dan UNFPA, 2013). Hal tersebut mempunyai konsekuensi pada pentingnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta penyediaan lapangan kerja produktif. Jika sumberdaya manusia berkualitas disertai dengan lapangan kerja yang produktif, maka besarnya penduduk usia kerja akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan formal yaitu sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan semakin memiliki peran yang strategis dalam pengembangan sumber daya manusia mengingat pemerintah terus mendorong minat lulusan SMP untuk melanjutkan studi di sekolah menengah kejuruan (SMK). Pendidikan kejuruan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan umum, baik ditinjau dari kriteria pendidikan, substansi pelajaran, maupun lulusannya. Kriteria yang melekat pada sistem pendidikan kejuruan menurut Finch dan Crunkilton (1984), antara lain (1) orientasi pendidikan dan pelatihan; (2) justifikasi untuk eksistensi dan legitimasi; (3) fokus pada isi kurikulum; (4) kriteria keberhasilan pembelajaran; (5) kepekaan terhadap perkembangan masyarakat; dan (6) hubungan kerjasama dengan masyarakat. Arah baru pengembangan pendidikan kejuruan merujuk kepada rumusan "Kompetensi Menjelang 2020" adalah *demand driven*, berbasis kompetensi, alur lentur dan prinsip "*multy entry dan multy exit*", mengakui kemampuan sebelumnya, diklat mengacu kepada profesi dan keterampilan kejuruan, diklat terfokus pada sektor formal dan informal, mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan, dan pengelolaan terdesentralisasi (Depdiknas, 1999).

Minat masyarakat untuk menempuh pendidikan kejuruan tidak terlepas dari tingkat keterserapan lulusan SMK di pasar kerja. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat agar menyekolahkan anaknya di SMK namun belum sesuai harapan karena tingkat keterserapan lulusan SMK di dunia kerja belum tinggi. Samsudi dalam Susiani (2009) menyebutkan idealnya secara nasional lulusan SMK yang bisa langsung memasuki dunia kerja sekitar 80-85 persen, sedangkan selama ini yang terserap baru 61 persen. Pada tahun 2006 lulusan SMK di Indonesia mencapai 628.285 orang, sedangkan proyeksi penyerapan atau kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK tahun 2007 hanya 385.986 orang atau sekitar 61,43 persen. "Jumlah ini belum ideal, harus diupayakan peningkatan daya serap untuk memasuki lapangan kerja maupun menciptakan

peluang kerja. Kecenderungan daya serap lapangan kerja menurut program keahlian sejak tahun 2000 hingga 2007 berubah-ubah, menyesuaikan dengan kondisi lapangan kerja pada waktu tertentu. Pada tahun 2000, lulusan Jurusan Teknik Elektronika daya serapnya 87 persen namun turun menjadi 50,5 persen pada 2006 kemudian kembali naik menjadi 62 persen. Daya serap lulusan Jurusan Teknik Mesin juga sama, dari 84,86 persen pada tahun 2000 turun menjadi 76,52 persen pada tahun 2007.

Fluktuasi penyerapan lulusan SMK menunjukkan orientasi *demand driven* pendidikan kejuruan belum sepenuhnya terwujud. Oleh sebab itu, perlu peningkatan relevansi pendidikan kejuruan terhadap pasar kerja termasuk Kota Salatiga. Kota Salatiga menjadi daerah yang menarik untuk dikaji karena secara geografis kota ini memiliki posisi strategis yaitu berada pada jalur transportasi darat utama Jawa, berada pada jalur transportasi regional utama Jawa Tengah, termasuk salah satu kota dalam Kawasan Kedungsepur, dan merupakan salah satu kawasan pusat pengembangan di Provinsi Jawa Tengah.

Dari sisi pendidikan SMK, pada tahun 2009 di Salatiga terdapat 15 SMK yang sebagian besar berada di Kecamatan Sidomukti (50 persen), Kecamatan Sidorejo (39 persen), Kecamatan Tingkir 2 SMK (11 persen), sedangkan di Kecamatan Argomulyo tidak terdapat fasilitas pendidikan SMK. Peran SMK dalam penyiapan tenaga kerja cukup tinggi karena pada tahun 2009 sekolah kejuruan dapat menampung 8.800 siswa, lebih besar dibanding sekolah menengah atas sebanyak 4.368 siswa. Di Kota Salatiga juga terdapat SMK yang berstatus sebagai RSBI yaitu SMK N 2 Salatiga.

Dalam rangka menghadapi persaingan keahlian tenaga kerja pada era persaingan bebas, pendidikan kejuruan dituntut meningkatkan kualitas pendidikan serta mengembangkan konsep pembelajaran yang memberikan hasil signifikan terhadap peningkatan keahlian atau kompetensi. Salah satu pertanyaan perlu dikaji adalah bagaimana relevansi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Salatiga terhadap dunia kerja. Oleh sebab itu, tulisan ini ditujukan untuk membahas relevansi lembaga pendidikan kejuruan di Salatiga terhadap dunia kerja terutama dilihat dari penyerapan tenaga kerja dan produktivitasnya. Data yang digunakan dalam tulisan adalah hasil penelitian PPK LIPI di Salatiga tahun 2011 dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara terbuka dengan stakeholder di daerah dan observasi lapangan. Data kuantitatif menggunakan data sekunder dari Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Kota Salatiga.

## II. PENDIDIKAN KEJURUAN DI KOTA SALATIGA

Kebijakan nasional pendidikan yang termuat dalam renstra pendidikan diarahkan untuk menggalakkan sekolah kejuruan sebagai upaya menciptakan manusia Indonesia yang mempunyai skill (pengetahuan, kemampuan dan keterampilan) dalam menghadapi persaingan pasar kerja internasional. Tahun 2007 Kementerian pendidikan dan Kebudayaan yang pada waktu itu masih bernama Depdiknas menargetkan perbandingan antara SMK sebesar 70 persen dan Sekolah Menengah Umum 30 persen. Pada tingkat daerah, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Salatiga bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan (kompetensi) yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di SMA/SMK/MA, untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga negara sesuai dengan perkembangannya mempersiapkan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat dan atau mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya (Pemda Salatiga, 2008). Arah pendidikan kejuruan di Salatiga didasarkan pada arah pendidikan kejuruan tingkat nasional.

Pada tahun 2009 di Kota Salatiga terdapat 18 SMK yang lebih besar dibanding SMA (8 unit). Hal ini menunjukkan adanya prioritas pembangunan sekolah kejuruan dibandingkan dengan umum. Prioritas pendidikan SMK di Salatiga saat ini masih pada pilar pertama pemerataan dan perluasan akses pendidikan dengan membangun sarana pendidikan SMK di kecamatan yang belum terdapat sekolah tersebut (Pemda Salatiga, 2008). Akan tetapi, kebijakan pembangunan sekolah baru tersebut tampaknya masih perlu dilihat lebih jauh karena saat ini rasio siswa per kelas di SMK masih berada di bawah rasio ideal. Rasio siswa per kelas di SMK yang ideal adalah 36 anak, kenyataannya rasio siswa per kelas untuk SMK sebesar 33 anak. Dengan demikian daya tampung prasarana pendidikan ini masih mencukupi dan belum diperlukan pembangunan prasarana baru. Sebagian siswa di SMK bahkan berasal dari luar daerah Salatiga, sehingga jumlah bangunan sekolah sudah mencukupi untuk menampung siswa dari Kota Salatiga. Yang perlu diutamakan adalah peningkatan kualitas pendidikan sehingga lulusan SMK lebih dapat bersaing di dunia kerja. Dari sisi akreditasi, masih ada 3 sekolah kejuruan yang masih terakreditasi C sehingga perlu penanganan lebih lanjut untuk peningkatan kualitasnya.

Tabel 1. Data Pokok SMA sederajat di Kota Salatiga Tahun 2009/2010

No.	Komponen	SMA	MA	SMK	SM+MA
1.	Sekolah				
	a. Negeri	3	1	3	7
	b. Swasta	5	2	15	22
	c. Akreditasi A	7	1	1	9
	d. Akreditasi B	1	1	9	11
	e. Akreditasi C	0	0	3	3
2.	Siswa				
	a. Negeri	3.009	621	3.039	6.669
	b. Swasta	1.359	111	5.769	7.239
	c. Laki-laki	1.920	309	4.788	7.017
	d. Perempuan	2.448	423	4.020	6.891

Sumber : Profil Pendidikan Kota Salatiga, 2009/2010

Jumlah siswa SMK di Kota Salatiga pada tahun 2009 mencapai 8.808 siswa atau sekitar 63,33 persen dari keseluruhan siswa sekolah menengah atas. Berdasar data tersebut dapat dilihat bahwa sekolah kejuruan sudah menjadi pilihan sebagian besar tamatan SMP dalam melanjutkan studi. Peran sekolah kejuruan swasta dalam menampung siswa ternyata cukup besar

yaitu 5.769 siswa atau 65 persen dari keseluruhan siswa sekolah kejuruan.

Minat masyarakat untuk bersekolah di sekolah kejuruan terutama sekolah unggulan sangat tinggi. Beberapa sekolah kejuruan unggulan seperti SMK 2, SMK 1 dan SMK 3 selalu dibanjiri pendaftar yang

berkompetisi untuk menjadi siswa. Meskipun demikian, ada jurusan-jurusan favorit yang menjadi pilihan siswa dan ada jurusan yang kurang diminati oleh siswa. Jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura merupakan salah satu jurusan di SMK N 3 sepi peminat meskipun lulusan pertama dari jurusan ini 100 persen telah tertampung di dunia kerja. Lain halnya dengan jurusan-jurusan favorit yang banyak peminat sehingga perlu persaingan yang cukup ketat guna memperoleh satu kursi di jurusan tersebut. Secara umum jurusan tersebut lebih menarik karena memiliki prospek kerja yang lebih baik disertai dengan potensi tingkat upah yang lebih tinggi.

Di sisi lain, ada sekolah kejuruan swasta yang hampir mati karena hanya diminati oleh sedikit siswa. Seperti halnya SMK Dr. Cipto yang hanya mempunyai 45 siswa dari tiga kelas, SMP Pancasila mempunyai 33 siswa dan SMK Dharma Lestari mempunyai 76 siswa. Kurangnya peminat pada sekolah tersebut dapat terjadi karena fasilitas yang belum bagus, link ke dunia kerja yang belum terbangun, mutu lulusan sekolah yang belum terbukti di pasar kerja. Pada dasarnya prasarana pendidikan telah cukup tersedia, masyarakat tinggal memilih sekolah mana yang sesuai dengan keinginan mereka.

Pemerataan pendidikan di Salatiga diantaranya dapat dilihat dari nilai APM dan APK. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa sekolah menengah dibagi dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun kali 100 persen. APM merupakan perbandingan antara siswa usia 16-18 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun kali 100 persen. Berdasarkan data dinas pendidikan Kota Salatiga dapat diketahui APK sekolah menengah atas pada tahun 2009 mencapai 104,24 persen. Terdapat perbedaan APK laki-laki dan perempuan yaitu 108,59 laki-laki dan 104,15 persen perempuan. Tingginya APK disebabkan banyaknya siswa berusia kurang dari 16 tahun dan lebih dari 18 tahun yang bersekolah di sekolah menengah atas<sup>1</sup>. Nilai APM untuk laki-laki

<sup>1</sup> Jumlah siswa SMK berusia diluar 16-18 tahun dapat dilihat dari data pokok pendidikan yang menunjukkan pada tahun 2009 terdapat 3721 siswa sekolah menengah atas yang berusia di bawah 16 tahun dan sekitar 358 siswa berusia lebih dari 18 tahun. Penghitungan APM dan APK SMA di Salatiga tampak masih belum konsisten, terbukti

sebesar 75,6 persen dan perempuan sebesar 69,4 persen menunjukkan cukup banyak anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah di sekolah menengah atas. Tidak berpartisipasi anak usia tersebut pada jenjang pendidikan menengah atas sederajat dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti : masuk ke dunia kerja, dan tidak memiliki biaya.

Tabel 2. Indikator Pemerataan SMA sederajat di Salatiga Tahun 2009/2010

No.	Indikator	SMA	MA	SMK
1.	APK (%)			
	a. Laki-laki	28,71	4,62	71,60
	b. Perempuan	35,63	6,16	58,51
2.	APM (%)			
	a.Laki-laki	19,92	3,90	51,82
	b.Perempuan	23,04	5,85	40,55
3.	Rasio			
	a. Siswa/Sekolah	546	244	480
	b. Siswa/Kelas	32	28	33
	c. Siswa/Guru	12	6	13
	d. Kelas/R.Kelas	0,94	0,81	1,15
	e. Kelas/Guru	0,38	0,23	0,39

Sumber : Profil Pendidikan Kota Salatiga, 2009/2010

APK dan maupun APM sekolah menengah atas di Salatiga berdasar jenis kelamin menunjukkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Angka partisipasi sekolah menengah atas laki-laki lebih besar dibanding perempuan Perbedaan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor seperti tingginya angkatan kerja muda perempuan (usia sekolah menengah atas) dan keharusan sebagian mereka menjadi ibu rumah tangga. Tingkat partisipasi pendidikan akan lebih kecil lagi jika siswa yang berasal dari luar daerah Salatiga tidak dimasukkan dalam penghitungan.

Tabel 2 menunjukkan bahwa APM dan APK perempuan di SMA dan MA lebih tinggi dibanding laki-laki. Sebaliknya, pada pendidikan SMK nilai APM dan APK laki\_laki lebih tinggi dibanding perempuan. Data ini memberikan gambaran bahwa tingkat ketertarikan laki-laki untuk menempuh pendidikan SMK lebih tinggi dibanding perempuan. Keadaan ini dapat terjadi karena sebagian jurusan pendidikan kejuruan di Salatiga lebih banyak jurusan

nilai tersebut berbeda dengan APM dan APK yang dirinci berdasar jenis sekolahnya sebagaimana terlihat pada tabel 2

yang biasanya diminati oleh laki-laki seperti otomotif, mesin dan montir. Peserta didik laki-laki juga lebih memilih pendidikan SMK karena lulusannya akan lebih siap memasuki pasar kerja. Tabel 2 secara faktual juga menunjukkan bahwa APK dan APM pendidikan SMK baik laki-laki maupun perempuan lebih tinggi dibanding APK dan APM pendidikan SMA dan MA artinya tingkat ketertarikan masyarakat terhadap pendidikan SMK di Salatiga sudah cukup tinggi.

Partisipasi orang tua terhadap pembiayaan pendidikan kejuruan lebih tinggi dibandingkan pemerintah pusat, yayasan, Pemda dan lainnya. Dalam hal pembiayaan pendidikan kejuruan, partisipasi orang tua mencapai 75,6 persen. Hal ini disebabkan banyaknya sekolah kejuruan swasta yang bisa dikatakan mandiri dalam pembiayaan pendidikan artinya tidak tergantung pada dana pemerintah baik pusat maupun daerah. Pembiayaan dari pemerintah pusat untuk pendidikan SMK lebih tinggi dibandingkan dengan SMA dan MA yaitu sekitar 6,96 persen (Pemda Salatiga, 2008). Hal ini berkaitan dengan program pemerintah yang lebih mendorong agar lulusan SMP dapat melanjutkan studi ke SMK.

### III. RELEVANSI LULUSAN SMK DI PASAR KERJA

Relevansi lulusan SMK terhadap kebutuhan pasar kerja merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan dunia pendidikan dalam menjalankan tugasnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 943) dalam (Muhson, dkk. 2012) relevansi diartikan sebagai hubungan; kesesuaian; kaitan

dengan tujuan; berguna secara langsung dengan apa yang dibutuhkan. Sebagai ajektif, relevansi berarti (1) terkait dengan apa yang sedang terjadi atau dibahas, (2) benar dan atau sesuai untuk tujuan tertentu. Relevansi pendidikan adalah tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil keluaran program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif yang didukung oleh ketepatan unsur masukan, proses dan keluaran. Relevansi menyangkut dua dimensi kehidupan yaitu dunia sekolah dan dunia kerja/masyarakat sesuai sekolah. Relevansi lulusan SMK dapat diketahui dari besarnya lulusan yang terserap/tidak terserap di dunia kerja serta produktivitas lulusannya.

#### 3.1. Penyerapan tenaga kerja

Berdasar data Sakernas yang diolah oleh Pusdatinaker, pada tahun 2010 terdapat 81 ribu angkatan kerja di Kota Salatiga yang terdiri dari 73 ribu penduduk yang bekerja dan 8 ribu berstatus sebagai penganggur. Angka pengangguran terbuka mencapai 10,2 persen yang hampir sama dengan pengangguran tingkat nasional. Angka pengangguran untuk lulusan SMA kejuruan dan umum lebih tinggi dibanding angka pengangguran pada tingkat pendidikan yang lain yaitu masing-masing 12 persen dan 15 persen. Tingginya pengangguran lulusan SMA umum dan kejuruan ini dapat menjadi salah satu indikator daya saing lulusan SMK di dunia kerja yang masih belum memuaskan karena sebagian diantara mereka kalah bersaing sehingga menjadi penganggur terbuka. Disamping itu, kesempatan kerja di Indonesia juga masih terbatas sehingga tidak mampu menampung seluruh lulusan yang masuk ke dunia kerja. Lulusan yang baru lulus akan kalah bersaing dengan lulusan lama yang sudah berpengalaman dan lebih siap kerja.

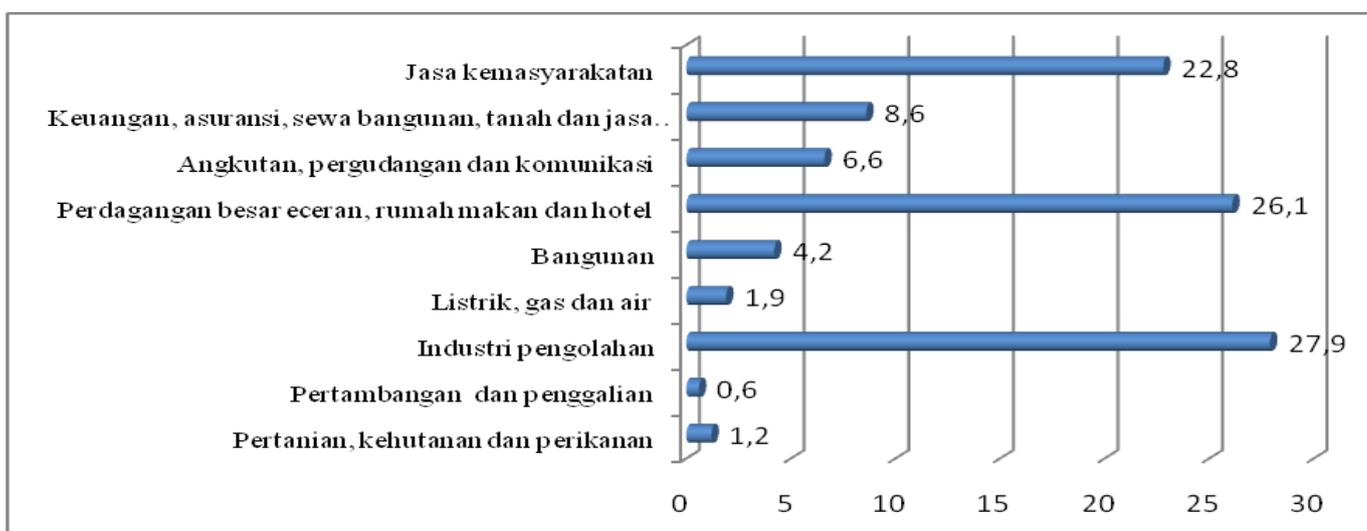
Tabel 3. Keterserapan Lulusan SMA Kejuruan (SMK) dan Tingkat Pendidikan Lain di Kota Salatiga Tahun 2010

No	Tingkat pendidikan	Jumlah angkatan Kerja	Bekerja	Tidak terserap/ Pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran (%)
1	≤ SD	19.412	17.653	1.759	9,1
2	SMTp	16.313	15.229	1.084	6,6
3	SMA Umum	13.802	11.734	2.068	15,0
4	SM Kejuruan	15.017	13.155	1.862	12,4
5	Diploma / Akademi	6.709	6.154	555	8,3
6	Universitas	10.421	9.404	1.017	9,8
	Total	81.674	73.329	8.345	10,2

Sumber : Pusdatinaker, 2010 (data diolah)

Proporsi tenaga kerja lulusan SMK terhadap keseluruhan tenaga kerja di Kota Salatiga sekitar 17,9 persen. Tenaga kerja berpendidikan rendah (SD ke bawah) masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap tenaga kerja di Salatiga yaitu 24,1 persen meskipun proporsi tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah ini sudah lebih rendah dibanding proporsi di tingkat nasional. Artinya dari sisi tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, tenaga kerja di Salatiga sudah mengalami pergeseran ke arah tenaga kerja terdidik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya proporsi tenaga kerja berpendidikan SMA ke atas yang mencapai 56,1 persen. Tingginya proporsi tenaga kerja berpendidikan tinggi disebabkan oleh ciri Kota Salatiga yang didominasi oleh sektor jasa dan manufaktur yang membutuhkan ketrampilan tertentu. Hal ini berbeda dengan daerah pertanian yang biasanya didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah.

Lulusan SMK kejuruan terserap di berbagai lapangan pekerjaan yaitu pertanian, manufaktur maupun jasa. Tiga lapangan kerja yang paling banyak menyerap tenaga kerja lulusan SMA kejuruan adalah industri pengolahan sebesar 27,9 persen, perdagangan besar eceran, rumah makan dan hotel (26,1 persen), dan jasa kemasyarakatan (22,1 persen). Lapangan kerja tersebut sesuai dengan beberapa jurusan yang selama ini dikembangkan di SMTA kejuruan seperti akuntansi, perkantoran, penjualan, tata boga, bangunan, elektro, mesin dan elektronika. Dilihat dari jenis pekerjaan/jabatan, sebagian besar tenaga kerja lulusan SMTA kejuruan sebagian besar (45,5 persen) bekerja sebagai tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar, kemudian tenaga usaha penjualan sebesar 21,8 persen dan tenaga tata usaha/sejenis sebesar 14,8 persen.



Grafik 1. Persentase keterserapan lulusan SMK di dunia kerja menurut lapangan pekerjaan, Kota Salatiga tahun 2009 (N=13.155)

Sumber : Pusdatinaker, 2010

Berbagai strategi diterapkan SMK guna meningkatkan kualitas lulusannya sehingga dapat bersaing di pasar kerja. SMK Negeri I merupakan salah satu sekolah unggulan di Salatiga yang menerapkan budaya mutu dengan semboyan "DINAMIS". Semboyan ini mengandung arti : Pertama, dedikasi yaitu mempunyai komitmen terhadap budaya mutu yang diterapkan sekolah serta memiliki rasa percaya dan kesanggupan yang tinggi dalam menyelesaikan tugasnya sebagai agen perubahan dalam dunia pendidikan. Kedua, integritas yaitu mempunyai keutuhan motas yang tinggi dengan mengutamakan

kejujuran untuk mencapai tujuan. Ketiga, normatif yaitu memiliki perilaku yang berdasarkan nilai-nilai agama, budaya dan norma-norma susila yang berlaku di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Keempat, asah, asih, asuh yaitu mampu memberikan pelayanan jasa pendidikan dan latihan yang didasari dengan sikap kasih sayang dengan keberhasilan siswa. Kelima, mandiri yaitu mampu memberikan pelayanan jasa pendidikan dan untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya sendiri tetapi tetap selalu dapat bekeja sama dengan orang lain. Keenam, inovatif yaitu memiliki daya cipta, rasa dan karsa yang tinggi

dengan berani melakukan pembaharuan dan perbaikan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Ketujuh, semangat yaitu mempunyai semangat pantang menyerah dalam menghadapi berbagai macam persoalan dan berusaha mencari solusi yang terbaik.

Jurusan Akuntansi, administrasi perkantoran, penjualan, tata busana, tata boga dan tata kecantikan di SMK Negeri 1 Salatiga selalu menjadi rebutan bagi lulusan sekolah menengah pertama yang ingin

melanjutkan ke sekolah kejuruan. Sebagian siswa di sekolah ini merupakan siswa perempuan (95 persen), sedangkan siswa laki-laki hanya sekitar 5 persen dari 432 siswa yang diterima pada tahun 2010. Komposisi siswa berdasar daerah tempat tinggalnya terdiri dari 60 persen siswa dalam kota dan 40 persen siswa dari luar kota. Pada tahun 2010 terdapat 508 pendaftar di semua program keahlian yang ditawarkan dan 409 (80,5 persen) siswa diterima.

Tabel 4. Data Tamatan SMK N 1 Salatiga Tahun 2009 Menurut Program/Keahlian

No	Program/Keahlian	Bekerja	Usaha	Melanjutkan	Belum kerja	Jumlah siswa
1	Akuntansi	46,3	3,75	25	25,0	80
2	Perkantoran	21,8	9,0	38,5	30,8	78
3	Penjualan	46,1	13,2	13,2	27,6	76
4	T. Busana	58,3	7,1	11,9	22,6	83
5	T. Boga	55,8	11,7	19,5	13,0	77
6	T. Kecantikan	60,0	9,3	22,7	8,0	75
	Total	48,1	6,8	21,7	21,3	470

Sumber : SMK N 1, Salatiga

Pada tahun 2009 terdapat sekitar 369 anak lulusan SMK N 1 Salatiga dan sekitar 48,1 persen tersalur ke dunia kerja dan sekitar 27,3 persen masih menganggur/belum bekerja. Berdasar penelusuran lulusan sebagian besar lulusan bekerja di daerah Salatiga, Semarang dan sekitarnya. Sebagian kecil lulusan SMK N 1 ada yang bekerja di Jakarta, Bogor dan kota-kota lainnya. Daya serap tenaga kerja untuk jurusan perkantoran termasuk paling rendah (21,8 persen) sementara daya serap tertinggi terjadi pada jurusan T. Kecantikan (60,2 persen). Penyerapan tenaga kerja lulusan SMK N 1 meningkat pada tahun 2010 yaitu 49,8 persen.

Lain halnya dengan SMK Negeri 2 yang merupakan sekolah kejuruan yang masuk dalam sekolah berstatus RSBI dan saat ini menjadi sekolah kejuruan unggulan di Salatiga. Empat program keahlian yang diselenggarakan di sekolah ini yaitu bangunan, elektro, mesin dan informatika. Salah satu strategi yang digunakan SMK Negeri 2 agar dapat menciptakan tenaga kerja yang siap pakai adalah bekerja sama dengan disnakertrans membuka bursa kerja dan bekerja sama dengan dunia industri untuk menyesuaikan kualifikasi tenaga yang dibutuhkan Industri. Saat ini sudah ada kerjasama antara sekolah dengan dunia industri, sehingga sebagian besar

lulusan akan langsung diserap sebagai tenaga kerja. Proses memperoleh kepercayaan dunia industri tidaklah mudah tetapi memakan waktu yang cukup lama. Pada awalnya (tahun 2002) sekolah ini masih menginduk pada sekolah lain di Yogya, Jepara, Solo, Semarang. Karena lulusan dari sekolah ini mampu bersaing dengan lulusan sekolah lain, maka secara perlahan SMKN 2 Salatiga mampu mendapatkan kepercayaan dari dunia industri. Beberapa perusahaan yang sudah menjalin kerja sama diantaranya PT. PAMA, PT. ASTRA, PT Djarum, dan PT. Persada Nusantara. Pada tahun 2009 SMKN 2 Salatiga menjadi satu-satunya sekolah yang dapat PSG di ASTRA. Pada waktu itu di seleksi dan terpilih 21 orang untuk PSG di perusahaan tersebut. Kerjasama dengan dunia industri telah dilakukan baik skala nasional, multinasional maupun internasional. Saat ini terdapat 122 perusahaan yang bekerja sama dengan SMK Negeri 2 Salatiga yang terdiri dari 115 perusahaan skala nasional, 6 perusahaan multinasional dan 1 perusahaan luar negeri.

Salah satu hal yang dilakukan sekolah untuk menjalin kepercayaan dari perusahaan industri adalah dengan mengetahui apa yang diperlukan oleh dunia industri.

Hal utama yang diperlukan industri ternyata justru *soft skill* yang mencerminkan etos kerja, disiplin dan sopan santun di dunia kerja. Hard skill juga perlu dimiliki, tetapi jika sudah diterima di dunia kerja industri juga masih akan melatih calon pekerja agar memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri. Oleh sebab itu, faktor utama yang menjadi perhatian adalah *soft skill*. Sekolah menjadikan *soft skill* sebagai hal utama yang diajarkan kepada siswa seperti bagaimana meniru disiplinnya militer, kita orang timur yang harus menjaga sopan santun. Untuk menjaga kepercayaan dunia industri maka di sela-sela pelatihan/rekuritmen, sekolah mengajak dunia industri untuk berdiskusi tentang kebutuhan dan kekurangan yang ada. Dari diskusi tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar industri lebih mementingkan *soft skill* tidak hanya kepintaran otak. Kepercayaan yang tinggi dari dunia industri juga diikuti oleh minat masyarakat untuk menjadi siswa di sekolah tersebut terbukti pada tahun 2010 terdapat 1000 pendaftar dan yang diterima hanya 508 siswa. Penerimaan siswa di sekolah ini didasarkan pada bobot NEM, test bakat minat, test seleksi kesehatan, test tertulis, dan test wawancara.

Gambaran kapasitas lulusan SMK Negeri 2 Salatiga dapat diprediksi dari data lulusan, serta status

kelulusannya. Pada UN tahun 2008 ini SMK Negeri 2 Salatiga berhasil meluluskan 100% siswa tingkat 3-nya dengan nilai yang memuaskan. Pada mata pelajaran yang di UAN-kan, nilai rata-rata pelajaran matematika adalah 8,87 dengan nilai tertinggi 10,00 (dicapai oleh 11 siswa). Pelajaran Bahasa Indonesia, nilai tertinggi yang diraih 9,40 dengan rata-rata 8,02. Untuk pelajaran bahasa Inggris, nilai rata-rata 8,08, dengan nilai tertinggi adalah 9,40. Pada tahun 2008, SMK 2 Salatiga rerata jumlah siswa yang lulus di atas rerata jumlah siswa SMK yang lulus di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran di SMK 2 Salatiga dalam kategori baik.

Ditunjukkan juga bahwa dalam setiap tahun persentase siswa yang tersalur ke tempat pekerjaan selalu meningkat mulai dari 47 persen, 55 persen dan data terakhir adalah 66 persen. Berdasar data profil pendidikan di Salatiga, persentase lulusan SMKN 2 tahun 2004-2008 yang terserap di dunia kerja mencapai lebih dari 80 persen. Lulusan tahun 2010 yang terserap ke dunia kerja sebanyak 63,42 persen, akan tetapi persentase ini diyakini akan terus meningkat karena sebagian besar lulusan akan berusaha untuk tetap mendapatkan pekerjaan. Hanya saja sebagian dari mereka harus menunggu sampai mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Selain itu, sebagian lulusan SMK N 2 yang meneruskan ke perguruan tinggi akan masuk ke pasar kerja sehingga akan menambah jumlah lulusan yang bekerja.

Tabel 5. Keterserapan Lulusan SMK Negeri 2 Salatiga Tahun 2002-2011

Tahun Lulus	Jumlah Alumni	Bekerja	Kuliah	Tidak Terdeteksi	Persentase Terserap
2002	92	62	2	28	69.57
2003	193	128	21	44	77.20
2004	185	140	19	26	85.95
2005	199	151	20	28	85.93
2006	197	150	10	37	81.22
2007	200	160	12	28	86.00
2008	260	199	13	48	81.54
2009	266	185	20	61	77.07
2010	298	154	35	109	63.42

Sumber : Profil SMK N 2 Salatiga, 2010

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Salatiga Jurusan Teknik Perkayuan mendapat kepercayaan dari Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPP) Teknologi Bandung sebagai tempat pelaksanaan Uji Kompetensi Siswa (UKS). Sebanyak 18 siswa membuktikan ketrampilan membuat mebel berstandar industri. Hasil karya mereka langsung dinilai oleh beberapa staf manajemen perusahaan mebel. "Kami mampu menghasilkan tenaga perkayuan yang siap

diserap oleh industri. Kemampuan siswa dan lulusan program keahlian teknik perkayuan ditunjukkan dengan perolehan berbagai kejuaraan tingkat propinsi, nasional maupun internasional. Siswa yang mampu mengukir sejarah sebagai juara lomba *Cabinet Making* adalah Asba'i, yang akan maju pada ajang world skill competition pada 15 sampai 22 November 2007 di Jepang, yang pada akhirnya menjadi juara

dunia. Saat ini asba'i melanjutkan kuliah di program Studi Teknik Sipil Universitas Negeri Yogyakarta.

SMK Negeri 3 merupakan salah satu SMK yang memiliki jurusan agribisnis. Pada pembukaan tahun I belum ada anak yang mendaftar masuk ke jurusan ini. Pada tahun kedua, SMK N 3 menerima anak yang belum lulus khusus untuk pertanian dan mendapatkan 40 siswa. Tahun ketiga terdapat 38 siswa yang mendaftar dan diterima semua, namun pada tahun keempat ini hanya 16 anak yang mendaftar. Minat anak untuk sekolah di agribisnis di Salatiga tampaknya memang sangat rendah meskipun lulusan pertama sekolah ini 100 persen telah tersalur di perusahaan perkebunan di Kalimantan. Hal ini berbeda dengan jurusan-jurusan favorite yang selalu kelebihan pendaftar seperti tehnik mesin, akuntansi, dan tata busana.

Ketiga SMK negeri di Salatiga tersebut merupakan SMK unggulan di daerah setempat sehingga hampir tidak memiliki permasalahan dalam penyaluran lulusannya kedua kerja. Ketiganya telah memiliki jaringan dengan berbagai perusahaan di Jawa Tengah maupun provinsi lain di Indonesia. Akan tetapi proses untuk membuat jaringan kerja dengan dunia kerja tersebut tidaklah mudah. Butuh waktu yang cukup lama untuk mendapatkan kepercayaan dunia industri bahwa lulusan mereka dapat diandalkan. Selain itu, masih banyak SMK swasta di Salatiga yang masih relatif tertinggal sehingga kesulitan untuk menarik calon siswa. Mutu lulusan SMK swasta menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengingat selama ini SMK swasta menyumbang sekitar 65 persen dari keseluruhan siswa sekolah kejuruan. Peran pemerintah sangat diperlukan termasuk dalam peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang pendidikan.

### 3.2. Produktivitas tenaga kerja

Simanjuntak (1985) menyatakan produktivitas mengandung pengertian filosofis, definisi kerja, dan teknis operasional. Secara filosofis, produktivitas mengandung pengertian pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan. Keadaan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan mutu kehidupan lebih baik dari hari ini. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

produktivitas tenaga kerja sangat tergantung pada satuan masukan yang diberikan oleh tenaga kerja dan satuan keluaran yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut. Satuan masukan dan satuan keluaran pada produktivitas tenaga kerja hanya tenaga kerja itu sendiri dan hasilnya. Seorang tenaga kerja yang produktif adalah tenaga kerja yang cekatan dan menghasilkan barang dan jasa sesuai mutu yang ditetapkan dengan waktu yang lebih singkat atau bila tenaga kerja tersebut mampu menghasilkan produk atau output yang lebih besar dari tenaga kerja yang lain dalam waktu yang lama. Masalah produktivitas kerja tidak dapat terlepas dari hak setiap tenaga kerja untuk memperoleh kesempatan kerja demi kehidupan yang layak sebagai manusia. Hak untuk dapat menikmati kehidupan yang layak bagi tenaga kerja tidak mungkin dapat diperoleh tanpa jaminan atau upah yang cukup dengan didukung oleh adanya produktivitas tenaga kerja yang tinggi.

Pengukuran produktivitas pekerja dapat didekati dengan dua macam pengukuran yaitu produk marginal dan produk rata-rata. Produk marginal menunjukkan besarnya perubahan output karena adanya perubahan satu satuan pekerja, sedangkan produk rata-rata menunjukkan berapa output yang dihasilkan setiap satu satuan pekerja. Produk marginal merupakan ukuran yang lebih dinamis dibandingkan dengan produk rata-rata. Produk marginal memiliki kaitan yang lebih erat dengan kebijakan, karena dapat memberikan gambaran berapa output akan bertambah atau berkurang jika dilakukan penambahan atau pengurangan jumlah pekerja. Produk marginal juga telah menghilangkan kemungkinan pengaruh input lain terhadap output.

Pengukuran produktivitas kerja sampai saat ini masih mengalami berbagai masalah karena belum ada data empiris yang memberikan informasi tentang produk marginal pekerja pada level sektoral. Untuk keperluan analisis produktivitas para peneliti mencari data lain yang mencerminkan produktivitas. Ahmad (1990), mendefinisikan produktivitas pekerja di suatu daerah sebagai PDRB dibagi jumlah pekerja. Kelemahan dari definisi ini adalah PDRB merupakan nilai total output atau nilai tambah di suatu daerah sehingga lebih mencerminkan produktivitas sektor yang tidak peka dalam mengukur produktivitas pekerja. Selain itu PDRB rata-rata per tenaga kerja tidak mampu mengisolasi kemungkinan peranan sektor produksi lain.

Secara makro produktivitas tenaga kerja lulusan SMK di Salatiga dapat dilihat dari tingkat upah yang diperoleh. Pada tahun 2010 rerata upah tenaga kerja lulusan SMK di Salatiga sebesar 1,3 juta rupiah.

Tingkat upah ini lebih rendah dibandingkan dengan tingkat upah tenaga kerja lulusan SMA di kota tersebut yaitu sebesar 1,5 juta rupiah/bulan. Kecenderungan upah tenaga kerja lulusan SMK yang lebih rendah dibandingkan dengan SMA tersebut dapat berpengaruh pada berkurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan studi ke SMK.

Meskipun demikian, sebagian besar lulusan SMK yang bekerja di luar daerah khususnya pada perusahaan besar umumnya memiliki upah yang tinggi. Upah tenaga kerja lulusan SMK Negeri 2 Salatiga yang bekerja di PT. PAMA misalnya berjumlah sekitar 7,5 juta rupiah.

Tabel 6. Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja/Karyawan Selama Sebulan di Kota Salatiga Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Rata-rata	Rasio terhadap lulusan SMK
		Laki-laki	Perempuan		
1	≤ SD	751.334	422.745	609.598	46,8
2	SMTP	1.125.024	868.938	1.012.504	77,7
3	SMTA Umum	1.759.121	924.570	1.507.839	115,7
<b>4</b>	<b>SMTA Kejuruan</b>	<b>1.451.205</b>	<b>1.021.366</b>	<b>1.303.537</b>	<b>100,0</b>
5	Diploma /Akademi	1.785.132	1.321.698	1.508.647	115,7
6	Universitas	2.641.006	1.813.021	2.222.881	170,5
	Rata-rata	1.521.045	1.082.367	1.332.952	102,3

Sumber : Pusdatinaker, 2010

Dilihat dari sisi jenis jabatan/pekerjaannya sebagian besar lulusan SMK (45,5 persen) bekerja sebagai tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar. Jabatan ini sesuai dengan kualifikasi lulusan SMK yang disiapkan untuk menjadi tenaga kerja terampil seperti halnya operator alat angkutan dan tenaga produksi. Upah yang didapat lulusan SMK dengan jabatan tenaga produksi atau operator alat angkutan adalah sebesar 1,08 juta/bulan. Upah tersebut lebih tinggi dibanding lulusan sekolah yang lain dalam posisi yang sama yaitu 898 ribu rupiah. Nilai upah lulusan SMK secara umum juga lebih tinggi dibanding upah minimum Kota Salatiga yaitu 843.469 rupiah per bulan (Pemda Prov Jateng, 2010).

Upah tertinggi lulusan SMK terdapat pada jabatan tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan yaitu 5 juta rupiah/bulan. Jumlah lulusan SMK di Salatiga yang menduduki jabatan tersebut sekitar yang 146 orang atau 1,1 persen dari keseluruhan lulusan SMK yang ada. Jika dibandingkan dengan lulusan tingkat sekolah lain yang bekerja dalam jabatan yang sama, proporsi lulusan SMK yang menjabat tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan adalah 16,3 persen sedangkan lulusan SMA umum sebesar 34,1 persen dan lulusan universitas sebesar 26,4 persen. Jumlah tenaga kerja lulusan SMK yang menduduki jabatan sebagai tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan relatif sedikit karena mereka harus bersaing dengan lulusan pendidikan tinggi dan SMA, selain itu porsi untuk jabatan tersebut jumlahnya relatif terbatas. Jabatan-jabatan puncak seperti kepemimpinan dan ketatalaksanaan biasanya hanya dapat dicapai oleh

lulusan yang sudah bekerja cukup lama dan memiliki pengalaman cukup banyak.

#### IV. SIMPULAN

Sekolah Menengah Kejuruan di Salatiga memberikan sumbangan tenaga kerja di Kota Salatiga yang cukup besar. Proporsi tenaga kerja lulusan SMK terhadap keseluruhan tenaga kerja di Salatiga pada tahun 2010 sekitar 17,9 persen, lebih tinggi dibanding proporsi nasional yaitu 8,35 persen (Kemenakertrans, 2012). Akan tetapi sebagian lulusan SMK juga belum bisa bersaing untuk diterima di pasar kerja karena ada sekitar 12 persen lulusan SMK yang masih menganggur. Angka pengangguran ini ternyata lebih tinggi dibanding angka pengangguran dari tingkat sekolah yang lain. Rata-rata upah tenaga kerja lulusan SMK juga masih lebih rendah dibanding dengan lulusan SMA, yang memberikan fakta bahwa *rate of return* pendidikan kejuruan belum memuaskan. Dengan demikian pendidikan kejuruan perlu berbenah baik dari sisi input maupun proses belajar mengajar agar lulusannya memiliki daya saing yang tinggi. Input dalam pendidikan kejuruan meliputi kuantitas dan kualitas guru, pendanaan dan sarana prasarana seperti fasilitas laboratorium, dan tempat praktek. Permasalahan masing-masing sekolah dalam pendidikan berbeda-beda, sehingga pembenahan tersebut bergantung pada jenis masalah yang dihadapi sekolah.

Di sisi lain, sebagian lembaga pendidikan kejuruan di Salatiga telah mampu mengantarkan peserta didik

memiliki daya saing yang tinggi di pasar kerja. Hal ini dapat dilihat dari adanya kerja sama antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan industri. Sebagian lulusan bahkan telah mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan sebelum dinyatakan lulus. SMK N 2 Salatiga telah membangun kerjasama dengan dunia industri dan usaha baik skala nasional, multinasional maupun internasional. Saat ini terdapat 122 perusahaan yang bekerja sama dengan SMK N 2 Salatiga yang terdiri dari 115 perusahaan skala nasional, 6 perusahaan multinasional dan 1 perusahaan luar negeri. Jaringan kerja sama ini telah berdampak pada tingginya daya serap pasar kerja terhadap lulusan. Berdasar data profil SMKN 2 di Salatiga, persentase lulusan SMKN 2 tahun 2004-2008 yang terserap di dunia kerja mencapai lebih dari 80 persen. Lulusan tahun 2010 yang terserap ke dunia kerja sebanyak 63,42 persen, akan tetapi persentase ini diyakini akan terus meningkat karena sebagian besar lulusan akan berusaha untuk tetap mendapatkan pekerjaan. Hanya saja sebagian dari mereka harus menunggu sampai mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Selain itu, sebagian lulusan SMK N 2 yang meneruskan ke perguruan tinggi akan segera masuk ke pasar kerja sehingga secara langsung akan menambah jumlah lulusan yang bekerja.

Berkaitan dengan fakta tersebut di atas, pemerintah perlu memfasilitasi dan membuat strategi agar lembaga pendidikan yang telah berdiri dapat meningkatkan kualitasnya terutama dalam membangun hubungan dengan dunia usaha dan industri. Kemitraan antara lembaga pendidikan yang sudah berhasil dan belum berhasil perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pengembangan pendidikan dan pelatihan juga perlu disesuaikan dengan potensi unggulan yang ada di daerah. Kesesuaian antara dunia pendidikan dan potensi unggulan daerah akan berdampak pada optimalisasi pengelolaan sumber daya yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi permintaan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Sabir. 1990. Migrasi dan Produktivitas Tenaga Kerja di Sulawesi Tenggara, Thesis S2, Pasca Sarjana Universitas Indonesia
- Bappenas, BPS dan UNFPA. 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia (*Indonesia Population Projection*), 2010-2035. Bappenas, BPS dan UNFPA Indonesia.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah. 2008. Keterkaitan pendidikan dan penyediaan lapangan kerja di Jawa Tengah
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga. 2010. Profil Pendidikan Kota Salatiga 2009/2010
- Finch, Curtis R. and Crunkilton, John R., 1984, Curriculum Development in Vocational and Technical Education: Planning, Content, and Implementation. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Kemenakertrans. 2012. Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2010-2025 Bidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Muhson, Wahyuni, Supriyanto & Mulyani. 2012. Analisis Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi Dengan Dunia Kerja, Jurnal *Economia*, Volume 8, Nomor 1, April 2012
- Pemda Provinsi Jateng. 2010. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 561.4/69/2010 Tentang Upah Minimum pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
- Pemerintah Kabupaten Salatiga. 2008. Penyusunan *Master Plan* Pendidikan Kota Salatiga tahun anggaran 2008.
- Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi, Kementerian tenaga kerja dan Transmigrasi RI , <http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/>
- Simanjuntak. 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia : Jakarta
- Susiani, Ratna. 2009. Kajian Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) SMK Negeri 2 Salatiga dan Hubungannya dalam Pengembangan Wilayah Sekitarnya, Tesis Program Pasca Sarjana, Magister Teknik dan Pengembangan Wilayah, Universitas Diponegoro, Semarang
- SMK N 2 Salatiga. 2011. Profil SMK N 2 Salatiga, tahun 2011



## PANDUAN PENULISAN JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

Naskah yang akan diterbitkan dalam Jurnal Kependudukan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah adalah karya asli yang belum pernah dipublikasikan di media cetak lain maupun elektronik.
2. Naskah dapat berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan buku, dan jenis tulisan ilmiah lainnya.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan menggunakan tata bahasa yang benar.
4. Naskah ditulis dengan menggunakan model huruf Times New Roman, font 12, margin atas 4 cm, margin bawah, 3 cm, margin kanan 3 cm, dan margin kiri 4 cm, pada kertas berukuran A4 minimal 5000 kata, diketik 1,5 spasi dengan program Microsoft Word. Setiap lembar tulisan diberi halaman.
5. Isi naskah terdiri dari:
  - a. Judul ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Judul harus mencerminkan isi tulisan, bersifat spesifik dan terdiri atas 10-15 kata.
  - b. Identitas Penulis yang diletakkan di bawah judul, meliputi nama dan alamat lembaga penulis serta alamat email
  - c. Abstrak dan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan jumlah kata antara 100-150. Isi abstrak menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan.
  - d. Pendahuluan yang berisi tentang justifikasi pentingnya penulisan artikel, maksud/tujuan menulis artikel, sumber data yang dipakai, dan pembabakan penulisan.
  - e. Tubuh/inti artikel berisi tentang isi tulisan, pada umumnya berisi tentang kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, dan pendirian penulis. Bagian inti artikel dapat dibagi menjadi beberapa subbagian yang jumlahnya bergantung kepada isu/aspek yang dibahas.
  - f. Kesimpulan berisi temuan penting dari apa yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.
  - g. Tampilan tabel, gambar atau grafik harus bisa dibaca dengan jelas dan judul tabel diletakkan diatas tabel, sedangkan judul gambar atau grafik diletakkan dibawah gambar atau grafik serta dilengkapi dengan penomoran tabel/gambar/grafik.
  - h. Acuan Pustaka diupayakan menggunakan acuan terkini (lima tahun terakhir)
- i. Penulisan daftar Pustaka mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - Kutipan dalam teks: nama belakang pengarang, tahun karangan dan nomor halaman yang dikutip  
Contoh: (Jones, 2004:15), atau Seperti yang dikemukakan oleh Jones (2004:15).
  - Kutipan dari buku: nama belakang, nama depan penulis. tahun penerbitan. *Judul buku*. kota penerbitan: penerbit.  
Contoh: Horowitz, Donald. 1985. *Ethnic Groups in Conflict*, Berkeley: University of California.
  - Kutipan dari artikel dalam buku bunga rampai: nama belakang, nama depan pengarang. tahun. "judul artikel" dalam nama editor (Ed.), *Judul Buku*. nama kota: nama penerbit. Halaman artikel.  
Contoh: Hugo, Graeme. 2004. "International Migration in Southeast Asia since World War II", dalam A. Ananta dan E.N.Arifin (Eds.), *International Migration in Southeast Asia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. hal: 28—70.
  - Kutipan dari artikel dalam jurnal: nama belakang, nama depan penulis, tahun penerbitan. "Judul artikel", *Nama Jurnal*, Vol (nomor Jurnal): halaman.  
Contoh: Hull, Terence H. 2003. "Demographic Perspectives on the Future of Indonesian Family", *Journal of Population Research*, 20 (1):51—65.
  - Kutipan dari *website*: dituliskan lengkap alamat *website*, tahun dan alamat URL dan html sesuai alamatnya. *Tanggal download*.  
Contoh: World Bank. 1998. <http://www.worldbank.org/data/countrydara/countrydata.html>. Washington DC. Tanggal 25 Maret.
  - Catatan kaki (*footnote*) hanya berisi penjelasan tentang teks, dan diketik di bagian bawah dari lembaran teks yang dijelaskan dan diberi nomor.
6. Naskah dikirim melalui email [jki.ppklipi@yahoo.com](mailto:jki.ppklipi@yahoo.com) dan [ppk-lipi@rad.net.id](mailto:ppk-lipi@rad.net.id).
7. Kepastian pemuatan/penolakan naskah akan diinformasikan melalui e-mail.
8. Redaksi memiliki kewenangan untuk merubah format penulisan dan judul tulisan sesuai dengan petunjuk penulisan, serta mengatur waktu penerbitan.

ISSN 1907-2902  
Nomor Akreditasi 560/AU1/P2MI-LIPI/09/2013

**Jurnal**  
Vol. 8 No. 2, 2013

# KEPENDUDUKAN INDONESIA

Masalah Demografis dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau  
*Anna Triningsih*

Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun di "Daerah Seribu Pesantren":  
Masalah Sosial-Ekonomi, Politik, dan Budaya  
*Makmuri Sukarno*

Penduduk Pribumi dalam Politik Pertolongan Bencana Krakatau 1883  
*Erlita Tantri*

Mobilitas Penduduk dan Risiko Penularan HIV & AIDS: Kasus di Provinsi Bali  
*Sri Sunarti Purwaningsih*

Tantangan Sosial Ekonomi Pengangguran Usia Muda di Indonesia  
*Vanda Ningrum*



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

ISSN 1907-2902



9 771907 290214